

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN SISTEM GANDA
(PSG) DALAM MEMPERSIAPKAN SISWA MEMASUKI DUNIA KERJA
(Studi Kasus Di SMK Pancasila 5 Wonogiri Program Keahlian Administrasi
Perkantoran Tahun Diklat 2011/2012)**



SKRIPSI

Oleh:
LISTIANA
K 7408233

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Listiana

NIM : K7408233

Jurusan/Program Studi : PIPS/Pendidikan Ekonomi

Menyatakan bahwa skripsi saya berjudul **"ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN SISTEM GANDA (PSG) DALAM MEMPERSIAPKAN SISWA MEMASUKI DUNIA KERJA (Studi Kasus Di SMK Pancasila 5 Wonogiri Program Keahlian Administrasi Perkantoran Tahun Diklat 2011/2012)"** ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Selain itu sumber informasi yang dikutip dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Surakarta, Juni 2012



Yang membuat pernyataan

Listiana

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN SISTEM GANDA
(PSG) DALAM MEMPERSIAPKAN SISWA MEMASUKI DUNIA KERJA
(Studi Kasus Di SMK Pancasila 5 Wonogiri Program Keahlian Administrasi
Perkantoran Tahun Diklat 2011/2012)**



SKRIPSI

**Ditulis Dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana
Pendidikan Program Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan Administrasi
Perkantoran Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012**

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Persetujuan Pembimbing**Pembimbing I**

Dra. C. Dyah S. Indrawati, M.Pd
NIP. 19611122 198903 2 001

Pembimbing II

Susantiningrum, S.Pd., SE., M.AB
NIP. 19761229 200501 2 002

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertimbangkan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan

Pada hari : Rabu

Tanggal : 20 Juni 2012

Tim Penguji Skripsi

Nama Terang

Tanda Tangan

Ketua : Drs. Ign. Wagimin, M.Pd

Sekretaris : Dr. Djoko Santoso Th, M.Pd

Anggota I : Dra. Cicilia Dyah S. i, M.Pd

Anggota II : Susantiningrum, S.Pd., SE., MAB.

Disahkan oleh

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret

Dekan,



Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.

NIP. 196007271987021001

v

ABSTRAK

Listiana. **ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN SISTEM GANDA (PSG) DALAM MEMPERSIAPKAN SISWA MEMASUKI DUNIA KERJA (Studi Kasus di SMK Pancasila 5 Wonogiri Program Keahlian Administrasi Perkantoran Tahun Diklat 2011/2012)**. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2012.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program PSG dalam mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja, (2) Untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang menghambat SMK Pancasila 5 wonogiri untuk melaksanakan program PSG dalam mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja, (3) Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan pihak SMK Pancasila 5 Wonogiri dalam mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan starategi tunggal terpancang. Sumber data terdiri dari informan, tempat, peristiwa, dokumen dan arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan analisis dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive snowball sampling*, dengan menggunakan teknik tersebut penelliti mengambil sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian, informan dapat bertambah atau berganti sesuai dengan tujuan penelitian dan apabila data yang diperoleh telah cukup maka pengumpulan data dihentikan Validitas data yang digunakan adalah trianggulasi sumber dan metode. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian, usaha SMK Pancasila 5 Wonogiri untuk melaksanakan program PSG dalam mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja adalah melalui pelaksanaan Proses Belajar Mengajar, praktik kerja industri (prakerin) dari program PSG dan uji sertifikasi keahlian. Dengan adanya pelaksanaan program tersebut, maka prakerin dari program PSG dilaksanakan dengan tiga tahap yaitu: persiapan pelaksanaan prakerin, pelaksanaan prakerin, dan penarikan prakerin. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pihak SMK Pancasila 5 Wonogiri mengalami hambatan yaitu: (a) Kurangnya dana untuk penyelenggaraan pendidikan, (b) kurangnya sarana laboratorium dalam proses pendidikan, (c) Belum adanya uji dan sertifikasi profesi, (d) Kurang sesuai nya jenis pekerjaan yang ada di Institusi Pasangan (IP). Adapun usaha yang dilakukan SMK Pancasila 5 Wonogiri untuk mengatasi hambatan tersebut adalah, (a) Memfungsikan unit produksi, (b) Menambah sarana laboratorium untuk proses pendidikan, (c) Mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk membantu agar uji sertifikasi profesi dapat segera terselenggara, (d) Penyesuaian Jenis pekerjaan yang ada di IP dengan program mata diklat yaitu dengan adanya monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci: Analisis, Pendidikan Sistem Ganda (PSG), Siswa Memasuki Dunia Kerja.

ABSTRACT

Listiana, AN ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION OF A MULTIPLE SYSTEM EDUCATION (MSE) PROGRAM IN PREPARING THE STUDENTS ENTERING WORK REALM (A Case Study on the Office Administration Skill Program of SMK Pancasila 5 Wonogiri in the school year of 2011/2012). Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Surakarta Sebelas Maret University, June 2012.

The objectives of research are (1) to find out how the implementation of PSG program in preparing the students entering work realm, (2) to find out the factors inhibiting the SMK (Vocational Middle School) Pancasila 5 Wonogiri in implementing the MSE program in preparing the students entering work realm, and (3) to find out the measures the SMK Pancasila 5 Wonogiri takes in coping with such the constraints.

The research employed a qualitative approach with descriptive method and single embedded strategy. The data source consisted of informant, place and event, as well as document and archive. Techniques of collecting data used were interview, observation and document analysis. The sampling technique used was purposive snowball sampling, using this technique, the author took the sample consistent with the researcher objective, informant could be increased or replaced corresponding to the objective of researcher and when the data obtained had been sufficient, the data collection was stopped. The data validity technique used was source and method triangulations. Technique of analyzing data used was an interactive model of analysis.

Based on the result of research, the measures the SMK Pancasila 5 Wonogiri had undertaken to implement the MSE program in preparing the students entering work realm included Teaching-Learning Process implementation, industrial on-the-job training from PSG program and skill certification test. With the implementation of such the programs, industrial on-the-job training of MSE program was carried out in three stages: preparation, implementation, and withdrawal. In its implementation, however, the SMK Pancasila 5 Wonogiri faced such constraints as: (a) limited fund for organizing education, (b) limited laboratory infrastructures in education process, (c) no professional test and certification, (d) less compatibility of job type existing in the Partner Institution (PI). The measures the SMK Pancasila 5 Wonogiri to cope with such the constraints included (a) to function the production unit, (b) to increase the number of laboratory infrastructures for education process, (c) to request the government to help the implementation of professional certification test immediately, and (d) to adjust the job type existing in the PI with the course program by means of monitoring and evaluating.

Key Word: *An Analysis, Multiple System Education, Students Entering Work Realm.*

MOTTO

Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu`.
(QS Al-Baqoroh: 45)

Jangan katakan dirimu kuat, melainkan tunjukkan bahwa dirimu yang terhebat.
(NN)

Cinta yang dibersihkan oleh air mata akan menyisakan kemurnian dan keindahan yang abadi.
(Kahlil Gibran)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua dan adik Saya, terimakasih banyak atas segala doa, dukungan, dan nasehat yang telah diberikan selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik.

Saudara-saudaraku (keluarga besar), terimakasih banyak atas segala dukungan selama ini yang telah diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik..

Dewi, Anik, Uik (maigocha) saudari-saudari seperjuanganku yang menyelesaikan studi bersama, yang selalu menghibur dan memberikan dukungan saat senang maupun susah untuk menyelesaikan skripsi ini..

Arum, Dienda, Iin, Puji, Listari serta semua teman PAP'08 teman seperjuanganku yang selalu memberikan motivasi, masukan dan solusi saat saya menemui kendala dalam menyusun skripsi.

Yunita Permatasari, Vita Premasnasari, Upi Rianantika, Diska Asani, Kiki Amalia, Nisa, teman-teman yang selalu membrikan semangat, inspirasi, dan solusi selama melaksanakan studi.

Kakakku yang selalu menghibur dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini, *thanks for all* (hari ini adalah awal yang indah untuk kita mulai semua)

Semua rekan-rekan Pendidikan Ekonomi 2008

Almamater UNS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Pelaksanaan Program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) Dalam Mempersiapkan Siswa Memasuki Dunia Kerja untuk memenuhi sebagai persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan. Namun dengan bantuan berbagai pihak, hambatan tersebut dapat teratasi hingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M. Pd, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Para Pembantu Dekan FKIP, yang telah memberikan izin penulisan skripsi.
2. Drs. Syaiful Bachri, M. Pd, Ketua Jurusan P.IPS FKIP dan Sekretaris Jurusan P.IPS, yang telah memberikan persetujuan skripsi.
3. Dr. Wiedy Murtini, M.Pd Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Sekretaris Prodi. Ekonomi yang telah memberikan ijin untuk menyusun skripsi.
4. Drs. Wagimin, M.Pd Ketua Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Administrasi Perkantoran dan Sekretaris BKK PAP yang telah memberikan ijin untuk menyusun skripsi.
5. Dra. C. Dyah S. Indrawati, M.Pd sebagai Pembimbing I yang telah memberikan semangat, bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi terselesaikannya skripsi ini.
6. Susantiningrum, S.Pd., SE., M.AB sebagai Pembimbing II yang telah memberikan semangat, bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi terselesaikannya skripsi ini.
7. Drs. Hery Sawiji, M.Pd selaku pembimbing akademik, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menjadi mahasiswa di BKK PAP.

8. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Ekonomi BKK PAP yang turut memberikan bimbingan dan motivasi guna penyelesaian skripsi.
9. UPT Perpustakaan UNS dan Perpustakaan FKIP yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi.
10. Bapak Drs. Sutarno. M.Pd selaku Kepala SMK Pancasila 5 Wonogiri beserta Bapak dan Ibu Guru yang telah memberikan ijin dan membantu penyelesaian skripsi.
11. Drs. Sulardi, M.Pd selaku guru AP dan Kepala Tata Usaha beserta Staff Administrasi dan siswa SMK Pancasila 5 Wonogiri yang memberikan data tertulis dan membantu kelancaran penyusunan skripsi.
12. Bapak (terimakasih atas segala pengorbanan dan doanya), Ibu (surgaku di bawah telapak kakimu), adik (yang setia menemani hari-hariku), kalian semua penyemangat hidupku.
13. Teman-teman mahasiswa PAP angkatan 2008 terima kasih untuk kebersamaan yang Insya Allah bermanfaat.
14. Berbagai pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat peneliti sebutin satu persatu

Semua bantuan dan dorongan yang peneliti terima dari berbagai pihak merupakan kebaikan yang tidak pernah terlupakan dan semoga Alloh SWT membalas semua budi baiknya. Peneliti masih menyadari karya ini masih jauh dari sempurna untuk itu semua saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat sebagai sumbangan pemikiran bagi yang berkepentingan.

Surakarta, Juni 2012

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori dan Hasil Penelitian yang Relevan	8
1. Pendidikan Kejuruan	8
2. Pendidikan Sistem Ganda (PSG)	15
3. Tahap-Tahap Pelaksanaan Program PSG	28
4. Dunia Kerja	42
5. Hasil Penelitian yang relevan	52
B. Kerangka berpikir	55

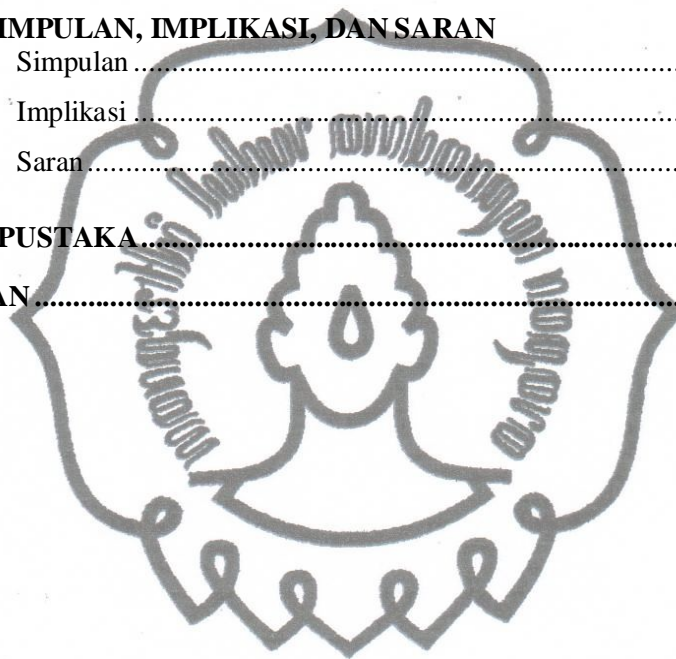
BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	58
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	59
C. Data dan Sumber Data	60
D. Teknik Sampling	61
E. Pengumpulan Data	63
F. Uji Validitas Data.....	65
G. Analisis Data.....	68
H. Prosedur Penelitian.....	70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

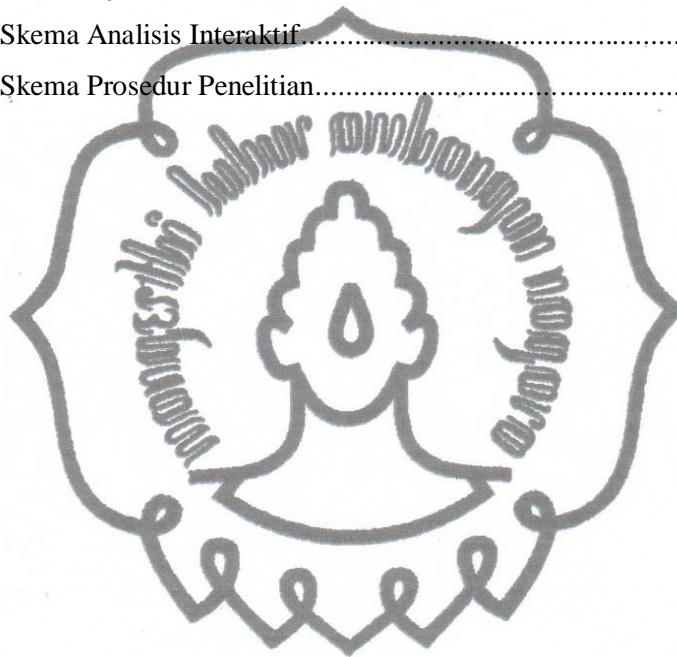
A. Deskripsi Lokasi/Objek Penelitian	73
1. Sejarah Berdirinya SMK Pancasila 5 Wonogiri	73
2. Letak Geografis SMK Pancasila 5 Wonogiri.....	74
3. Visi, Misi, dan Tujuan SMK Pancasila 5 Wonogiri	74
4. Nilai-Nilai Pedoman Bertindak dan Perilaku.....	77
5. Keadaan Guru, Karyawan, dan Siswa	77
6. Sarana dan Prasarana SMK Pancasila 5 Wonogiri.....	78
7. Struktur Organisasi	79
B. Deskripsi Temuan Penelitian	83
1. Pelaksanaan Program PSG SMK Pancasila 5 Wonogiri.....	83
2. Hambatan SMK Pancasila 5 Wonogiri dalam Melaksanakan Program PSG untuk Mempersiapkan Siswa Memasuki Dunia Kerja.....	103
3. Usaha SMK Pancasila 5 Wonogiri untuk Mengatasi Hambatan dalam Melaksanakan Program PSG	106
C. Pembahasan	110
1. Pelaksanaan Program PSG SMK Pancasila 5 Wonogiri.....	111
2. Hambatan SMK Pancasila 5 Wonogiri dalam Melaksanakan	

Program PSG untuk Mempersiapkan Siswa Memasuki Dunia Kerja.....	115
3. Usaha SMK Pancasila 5 Wonogiri untuk Mengatasi Hambatan dalam Melaksanakan Program PSG	118
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	
A. Simpulan	121
B. Implikasi	124
C. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN.....	127



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir	57
Gambar 2. Skema Uji Validitas Data.....	65
Gambar 3. Skema Analisis Interaktif.....	70
Gambar 4. Skema Prosedur Penelitian.....	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Jadwal Penelitian	127
2. Daftar Wawancara	128
3. Field Note	132
4. Struktur Organisasi	149
5. Daftar Guru dan Karyawan	150
6. Daftar Peralatan dan Kebutuhan Peralatan Praktik	152
7. Struktur dan Muatan kurikulum	154
8. Kelompok Kerja Pelaksanaan Program PSG	157
9. Jadwal Pelaksanaan PSG	158
10. Penilaian dan Laporan PSG	161
11. Data Siswa Kelas X, XI, dan XII	162
12. Daftar Institusi Pasangan dan Pembimbing PSG	163
13. Daftar Pembagian Tempat PSG	164
14. Tata Tertib PSG	165
15. Susunan Acara Penyerahan dan Susunan Acara Penarikan Peserta PSG ..	167
16. Surat Pemberitahuan PSG	169
17. Surat Tugas PSG dan Surat Permohonan Tempat PSG	172
18. Surat Serah Terima Peserta PSG dan Do'a Serah Terima Peserta PSG ...	174
19. Surat Ijin Penarikan PSG dan Surat Penarikan Peserta PSG	176
20. Agenda Kehadiran Peserta PSG dan Agenda Kegiatan Harian PSG	178
21. Format Penilaian PSG di DUDI	180
22. Lembar Saran dan Kritik Pelaksanaan Program PSG	181
23. Foto-Foto	182
24. Surat Permohonan izin Penyusunan Skripsi	183
25. Surat keputusan dekan FKIP tentang Izin Penyusunan Skripsi	184
26. Surat Permohonan Izin Observasi	185
27. Permohonan Surat Pengantar Izin Penelitian	186

28. Surat Rekomendasi dari BAKESBANGPOL DAN LINMAS	188
29. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	189



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Ketatnya persaingan dalam memasuki dunia kerja, para calon tenaga kerja dituntut untuk memiliki mental, pengetahuan dan keterampilan yang memadai sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Persaingan tersebut tidak hanya dengan orang Indonesia saja tetapi dengan orang-orang dari Negara lain, karena dari waktu ke waktu akan semakin banyak perusahaan asing yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia setiap perusahaan menginginkan tenaga kerja yang benar-benar profesional, serta mampu menguasai bahasa asing terutama bahasa Inggris.

Keadaan ini merupakan tantangan bagi dunia pendidikan khususnya dalam menyiapkan peserta didiknya agar siap berkompetisi dalam memasuki dunia kerja, berbagai macam usaha dilakukan oleh dunia pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan profesional, pengetahuan, ketrampilan serta wawasan yang luas.

Pendidikan sangatlah penting untuk berkompetisi di dunia kerja serta untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan hidup bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Hal ini diperjelas dalam visi pendidikan nasional yang mengutamakan kemandirian, mempunyai keunggulan untuk meraih kemajuan dan kemakmuran berdasar nilai-nilai Pancasila. Sedangkan misi pendidikan nasional adalah menciptakan sistem, iklim, dan proses pendidikan yang demokratis dan mengutamakan mutu, mampu mengembangkan manusia dan kehidupan masyarakat Indonesia yang cerdas, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan, kreatif, inovatif, sehat, berdisiplin, bertanggungjawab, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan

tercapainya tujuan pendidikan nasional maka juga akan mencetak output-output berupa SDM yang berkualitas menjadi salah satu asset terpenting dalam pembangunan nasional.

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu, jalur pendidikan formal, informal dan nonformal. Jalur pendidikan formal adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang, maka sekolah disebut sebagai lembaga pendidikan formal, sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang diadakan diluar lembaga formal seperti pendidikan dalam keluarga, dan pendidikan nonformal adalah satuan pendidikan yang tidak berjenjang seperti pendidikan keluarga, kelompok belajar, Balai Latihan Kerja (BLK), dan satuan lembaga lainnya yang sejenis. Pendidikan yang termasuk jalur pendidikan formal terdiri atas pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus (UU Sidiknas Tahun 2003 Pasal 15)

Salah satu jenjang pendidikan yang menghasilkan calon tenaga kerja tingkat menengah adalah pendidikan menengah kejuruan karena Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia telah diarahkan pada tujuan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Untuk mewujudkan tujuan ini, maka pelaksanaan PSG pada prinsipnya merupakan kebijakan publik dalam bentuk pendidikan keahlian profesional yang diwujudkan dengan memadukan secara sistematis dan senantiasa sinkron antara program pendidikan di SMK dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung pada dunia kerja. Manfaat PSG sebagaimana dijelaskan Depdiknas (2009: 23) adalah “1) Menumbuhkan sikap kerja yang tinggi; 2) siswa mendapatkan kompetensi yang tidak didapatkan di sekolah; 3) Siswa dapat memberikan kontribusi tenaga kerja di perusahaan; 4) Memberi motivasi dan meningkatkan etos kerja siswa; 5) Mempererat hubungan kerjasama antara sekolah dengan institusi pasangan; 6) Memungkinkan untuk industri memberikan bantuan

kepada sekolah, misal magang guru, bantuan praktek, dan; 7) Sebagai promosi tamatan SMK”.

SMK Pancasila 5 Wonogiri merupakan salah satu sekolah kejuruan bidang Bisnis dan Manajemen yang salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan lulusan yang dapat diserap oleh dunia kerja. Upaya yang dilakukan oleh SMK Pancasila 5 Wonogiri dalam memperbaiki kualitas kelulusan SMK yang dinilai masih kurang relevan dengan dunia kerja adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan proses belajar-mengajar dikelas di ikuti dengan pelaksanaan Program Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Proses belajar-mengajar dikelas adalah suatu yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif.

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kemampuan atau kompetensi yang dimiliki lulusan lembaga pendidikan, termasuk dalam hal ini Sekolah Menengah Kejuruan Pancasila 5 Wonogiri. Sebagaimana dijelaskan dalam Visi dan Misi SMK Pancasila 5 Wonogiri, bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan kejuruan diorientasikan kepada terciptanya calon-calon tenaga kerja siap pakai yang memiliki segenap keterampilan dan kompetensi profesional sesuai dengan kebutuhan industri-industri yang relevan.

Selanjutnya, SMK Pancasila 5 Wonogiri sebagai institusi pendidikan vokasional dalam menyelenggarakan pembelajaran menggabungkan antara teori dan praktik secara seimbang dengan orientasi pada kesiapan kerja lulusannya. Kurikulum yang digunakan mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), walaupun saat ini sudah menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Namun demikian, antara KBK dan KTSP sama-sama memiliki tujuan yang difokuskan pada sistem pembelajaran keahlian (*apprenticeship of learning*) pada kejuruan-kejuruan khusus (*specific trades*). Kelebihan pendidikan vokasional ini, antara lain, siswa secara langsung dapat mengembangkan keahliannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan atau bidang tugas yang akan dihadapinya.

Sangat disadari bahwa, mempersiapkan siswa yang memiliki berbagai kompetensi pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyiapkan siswa yang memiliki kemampuan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang bermutu tinggi. Dengan memiliki kompetensi semacam itu, siswa diharapkan mampu untuk menghadapi dan mengatasi segala macam akibat dan adanya perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Berdasarkan uraian tersebut, maka PSG sangatlah penting, khususnya bagi perkembangan kompetensi lulusan dan umumnya dalam perkembangan pembangunan pendidikan yang berdampak langsung dalam mendorong perekonomian di Indonesia.

Penerapan kebijakan PSG yang menggambarkan perubahan mendasar dari model penyelenggaraan pendidikan sebelumnya (*schooling system*) ke arah sistem ganda (*dual responsibility*), dimana perusahaan atau institusi kerja lainnya menjadi institusi pasangan (IP) dari SMK dalam pelaksanaannya, merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Perubahan ke arah sistem ganda menuntut pihak SMK untuk melakukan pengembangan penyelenggaraan PSG agar mampu memberikan layanan pendidikan secara optimal dalam memenuhi dinamisasi kebutuhan pendidikan masyarakat.

Dengan adanya Praktik Kerja dan Industri (Prakerin) merupakan program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di sekolah untuk mempersiapkan siswa atau lulusan dalam memasuki dunia kerja. Melalui praktek kerja dan industri (Prakerin) siswa SMK Pancasila 5 Wonogiri diterjunkan langsung ke dunia usaha dan industri agar dapat mengetahui lingkungan kerja yang sebenarnya sehingga para siswa tersebut setelah lulus akan menjadi lulusan yang siap kerja sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Berdasarkan pengamatan peneliti, permasalahan yang dirasakan oleh sekolah dalam pelaksanaan PSG, antara lain: 1) Kurangnya dana untuk penyelenggaraan pendidikan; 2) kurangnya sarana laboratorium dalam proses pendidikan seperti

komputer dan mesin-mesin kantor lainnya; 2) Belum adanya uji sertifikasi profesi; 3) tidak sesuai jenis pekerjaan yang ada di Institusi Pasangan (IP). Sementara permasalahan yang dihadapi oleh industri atau Institusi Pasangan (IP) antara lain: belum dimilikinya persepsi tentang keuntungan PSG bagi industri, dan kurangnya kesadaran tentang peningkatan keefektifan, efisiensi, dan kualitas dalam pelaksanaan pelatihan di industri.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan PSG dalam mempersiapkan siswa SMK dalam berkompetisi di dunia kerja. Untuk mengkaji permasalahan tersebut di atas maka peneliti tuangkan dalam bentuk penelitian dengan judul “ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN SISTEM GANDA (PSG) DALAM MEMPERSIAPKAN SISWA MEMASUKI DUNIA KERJA (Studi Kasus di SMK Pancasila 5 Wonogiri Program Keahlian Administrasi Perkantoran Tahun Diklat 2012)”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Menurut Jujun S. Suriasumantri (2005: 312) : “Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kita carikan jawabannya”. Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut diatas maka masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana usaha SMK Pancasila 5 Wonogiri mempersiapkan siswa dalam melaksanakan Pendidikan Sistem Ganda?
2. Hal-hal apa saja yang menghambat pihak SMK Pancasila 5 Wonogiri melaksanakan Program Pendidikan Sistem Ganda dalam mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja?
3. Sejauhmana usaha pihak sekolah SMK Pancasila 5 Wonogiri untuk menanggulangi hambatan tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Menurut Jujun S. Suriasumantri (2005: 313) “Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan”. Jadi tujuan merupakan standar/patokan yang akan dituju peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian berdasarkan masalah yang telah dirumuskan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana usaha SMK Pancasila 5 Wonogiri mempersiapkan siswa dalam melaksanakan Pendidikan Sistem Ganda.
2. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menghambat pihak SMK Pancasila 5 Wonogiri melaksanakan Program Pendidikan Sistem Ganda dalam mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja.
3. Untuk mengetahui sejauhmana usaha pihak sekolah SMK Pancasila 5 Wonogiri untuk menanggulangi hambatan tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

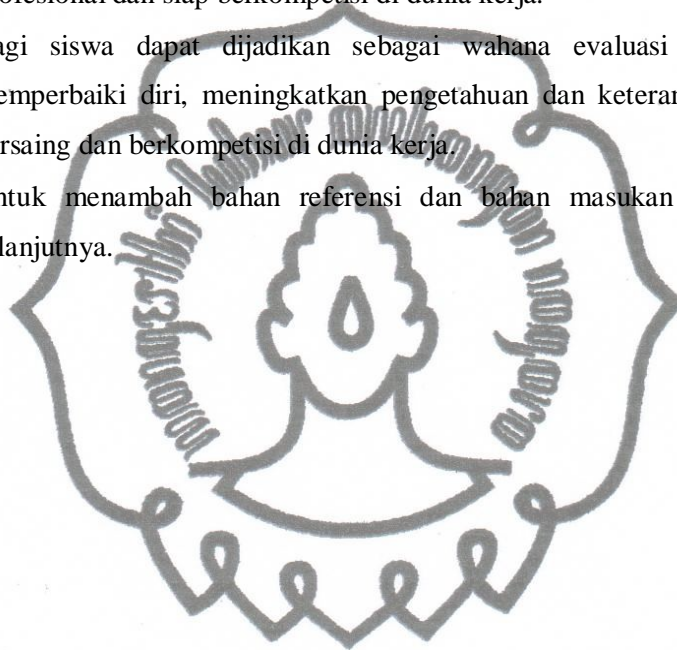
Penelitian ini penting karena menghasilkan informasi secara rinci dan faktual yang bermanfaat dalam menjawab permasalahan penelitian baik secara teoretis maupun secara praktis. Secara teoretis untuk langkah pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut dan secara praktis berwujud aktual, yaitu pemecahan masalah secara nyata. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Menambah dan memperluas pengetahuan tentang Ilmu Pendidikan, Khususnya Pendidikan Kejuruan dan Ilmu tentang Manajemen Sumber Daya Manusia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak sekolah dapat dijadikan sebagai wahana evaluasi diri agar melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara optimal dan berkualitas dalam usahanya untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan siap berkompetisi di dunia kerja.
- b. Bagi siswa dapat dijadikan sebagai wahana evaluasi diri agar mau memperbaiki diri, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar siap bersaing dan berkompetisi di dunia kerja.
- c. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori dan Hasil Penelitian Yang Relevan

1. Pendidikan Kejuruan

a. Pengertian Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang harus digalakkan dalam menyiapkan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja. Sebab pendidikan kejuruan ini merupakan upaya yang menyediakan stimulus berupa pengalaman belajar dan interaksi dari dunia luar siswa untuk mengembangkan potensinya dalam memasuki dunia kerja. Pendidikan kejuruan adalah alternatif yang tepat dalam menghadapi persaingan global terutama persaingan calon tenaga kerja dalam bersaing untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Hal tersebut sama dengan pendapat para ahli sebagai berikut:

Pendidikan kejuruan adalah suatu bentuk pengembangan bakat pendidikan dasar terampil dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang dipandang sebagai latihan keterampilan, bukan program terminal yang mempersiapkan siswa kepada pilihan maksimal untuk melanjutkan studi dan atau mendapatkan pekerjaan (Hamalik, 1990: 24).

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan menengah kejuruan tersebut untuk mengasah dan mengembangkan bakat dan keterampilan dasar yang dimiliki oleh siswa yang nantinya untuk latihan atau praktik di dunia kerja nyata, sehingga pendidikan kejuruan tersebut mengutamakan pengembangan *skill* yang nantinya untuk masa depan siswa dalam mendapatkan pekerjaan maupun melanjutkan studi.

Pendapat lain tentang pendidikan kejuruan adalah sebagai berikut:
“Pendidikan Kejuruan adalah pendidikan yang menyediakan

pengalaman rangsangan visual kesadaran efektif dan keterampilan psikomotorik sedemikian rupa sehingga menunjang proses pengembangan vokasional yang terdiri dari penajagan, pemantapan dan pelestarian seseorang dalam meniti karirnya di lapangan pekerjaan” (UU Sisdiknas nomor 20 Pasal 15 Tahun 2003).

Berdasarkan batasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud pendidikan menengah kejuruan adalah suatu bentuk pendidikan yang menyediakan dan mengutamakan pengembangan bakat, dasar keterampilan psikomotorik dan pendidikan keterampilan dalam rangka memasuki dunia kerja.

Untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, maka pengembangan program pendidikan kejuruan harus mengacu pada aturan-aturan tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Hamalik. Berdasarkan kriteria-kriteria pendidikan kejuruan terdiri dari:

- 1) Program pendidikan kejuruan harus mempersiapkan siswa untuk memasuki pekerjaan pilihan tanpa mengabaikan aspek-aspek pendidikan umum.
- 2) Kualitas program bersifat luwes, memudahkan siswa untuk mengikuti program latihan bila mereka sudah siap dan mampu melaksanakan dan atau melaksanakannya.
- 3) Kualitas program melayani dan mengorientasikan orang-orang dewasa pada kesempatan kerja. (1990: 93)

Kriteria di atas menunjukkan bahwa program pendidikan kejuruan bukan hanya memberikan pelajaran keterampilan kepada individu untuk mendapatkan kehidupan yang layak tapi juga menjadikan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan kejuruan berorientasi pada pekerjaan dan programnya dipersiapkan untuk dunia kerja. Jadi, pendidikan kejuruan bukan hanya memberikan keterampilan kerja tetapi juga memberikan bekal bagaimana bekerja yang efektif dan efisien.

b. Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan

Supaya program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat terlaksana dengan baik, maka perlu memperhatikan tujuan dari SMK yang tercantum dalam GBPP Depdiknas (2004) adalah sebagai berikut:

1) Tujuan Umum

- Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Tuhan YME.
- Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga Negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab.
- Mengembangkan potensi peserta didik agar mereka memiliki wawasan kebangsaan, memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia.
- Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup serta memanfaatkan Sumber Daya Alam yang efektif dan efisien.

2) Tujuan Khusus

- Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, maupun bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya.
- Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karier, ulet dan gigih dalam berkompetisi, mampu beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional yang ada dalam bidang keahlian yang diminatinya
- Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri dikemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- Membekali peserta didik dengan kompetisi-kompetisi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih (hlm. 6).

Untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut di atas, SMK telah melaksanakan kegiatan belajar-mengajar atas dasar PSG. Pengertian PSG sendiri yaitu “Suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di

sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja secara terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian professional tertentu” (Dikmenjur Dikdasmen Depdikbud, 1994: 7).

Sehingga dari tujuan SMK di atas antar tujuan umum dan khusus berbeda, apabila tujuan umum lebih bertujuan kepada bangsa dan Negara supaya jadi warga negara yang baik, dan tujuan khusus lebih kepada materi pembelajaran yang terdapat dalam SMK tersebut agar menjadi manusia yang produktif serta profesional sesuai dengan bidangnya, jadi tujuan SMK ini lebih membimbing anak didik untuk berkompetisi di dunia kerja.

c. Kebijakan *Link and Match*

Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1993 yang dikutip oleh Tilaar (1995) telah digariskan sasaran bidang pembangunan jangka panjang kedua dalam hal ini bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan yang dirumuskan sebagai berikut:

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang makin sejahtera lahir dan batin secara adil dan merata, terselenggaranya pendidikan nasional dan pelayanan kesehatan yang makin bermutu dan merata yang mampu mewujudkan manusia luhur, tangguh, sehat, cerdas, patriotik, disiplin, kreatif, produktif, dan professional, makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dengan meningkatnya peradapan, harkat, dan martabat manusia Indonesia dan memperkuat jatidiri dan kepribadian bangsa (hlm. 576).

Dari kebijakan ini telah jelas betapa besar sumbangan pendidikan dalam pembangunan jangka panjang kedua, yaitu mengembangkan peserta didik sebagai ilmuwan dan professional yang sanggup menerapkan ilmu pengetahuan dan professional yang sanggup menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam teknologi dan seni dalam kehidupan masyarakat. Jadi pelaksanaan kebijakan *link and match* telah sesuai dengan pesan-pesan yang terkandung dalam GBHN dan untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut kita perlu melihat fakta-fakta mengenai pendidikan, yaitu kurangnya relevansi

program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat yang menimbulkan keluhan terhadap output lembaga pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga lulusan tidak dapat diserap oleh industri.

Dengan adanya kekurangan tersebut maka, Tilaar mengemukakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melaksanakan prinsip *link and match*, sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kurikulum pendidikan
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana
- 3) Meningkatkan kualitas tenaga pengajar
- 4) Perbaikan program pendidikan (1995: 577)

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melaksanakan prinsip *link and match* seperti yang telah dipaparkan oleh Tilaar, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Kurikulum Pendidikan

Kurikulum pendidikan kita harus disusun dengan memperhitungkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini berkembang di masyarakat. Jika tidak maka lembaga pendidikan akan selalu ketinggalan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, namun kesenjangan itu dapat diperkecil dengan cara mendekatkan lembaga pendidikan dengan dunia industri dengan mengadakan pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

- 2) Peningkatan sarana dan prasarana

Untuk meningkatkan relevansi program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat maka diperlukan dukungan yang memadai dalam bentuk sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana digunakan untuk mengadakan penelitian dibidang industri dan praktik-praktik lainnya. Apabila sarana dan prasarana tersebut dapat dipenuhi maka tidak akan sulit melaksanakan kebijakan *link and match*.

3) Meningkatkan kualitas tenaga pengajar

Apabila kita ingin mengembangkan pendidikan secara optimal, maka kita harus menarik tenaga-tenaga pengajar harus dapat bersaing dengan tenaga-tenaga yang ada di dunia kerja. Hal ini berarti bahwa kualifikasi penghargaan terhadap tenaga pengajar sama dengan penghargaan yang diperoleh tenaga yang bekerja di bidang industri dan sebaliknya tenaga industri dan jasa. Selain itu perlu adanya fleksibilitas tenaga mengajar yang sewaktu-waktu dapat ditugaskan bekerja di bidang industri dan sebaliknya tenaga industri diberikan kesempatan untuk mengabdikan di dunia pendidikan dalam waktu tertentu.

4) Perbaiki program pendidikan

Program-program pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan hendaknya mengarah pada kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan agar ada relevansi antara program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai relevansi program pendidikan perlu ada kerjasama antara akademisi dengan praktisi di dunia industri dan jasa. Dengan adanya relevansi program pendidikan diharapkan kebijakan *link and match* dapat dilaksanakan dengan baik.

Dengan adanya langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melaksanakan *link and match* tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu pendidikan diharapkan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengikuti kemajuan teknologi. Hal ini untuk mencapai relevansi program pendidikan yang bekerjasama antara akademisi dengan praktisi di dunia industri dan usaha.

d. Relevansi dan Kualifikasi Tamatan Sekolah Menengah Kejuruan

Ciri utama yang membedakan antara pendidikan kejuruan dan pendidikan umum yaitu bahwa pendidikan kejuruan berorientasi pada penyiapan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja. Dengan demikian

salah satu tolok ukurnya adalah rentang waktu memperoleh pekerjaan. Tamatan SMK dapat dikatakan memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan dunia kerja apabila, “a) masa tunggu tamatan sampai memperoleh pekerjaan relative singkat dan pendek, b) Para lulusannya bekerja sesuai dengan program atau bidang keahlian yang di berikan dan c) Tingkat partisipasi lulusan di dunia kerja tinggi” (Slamet P.H., 2008: 15).

Relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan pembangunan serta dunia industri semakin di rasakan karena beberapa kecenderungan, yaitu a) Semakin tingginya tuntutan kerja yang sejalan dengan tuntutan pembangunan, b) Prsaingan dalam memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif serta membutuhkan keahlian dalam satu bidang tertentu, c) Tingginya jumlah lulusan tetapi tidak diikuti dengan pertumbuhnya lapangan pekerjaan.

Dari pendapat di atas dapat dirumuskan bahwa kualifikasi tamatan SMK yang berbasis teknologi menengah dapat ditunjukkan melalui beberapa faktor antara lain:

- a) Masa tunggu tamatan sampai memperoleh pekerjaan relatif pendek.
- b) Tingkat penguasaan tamatan pada bidang keahlian kejuruan relatif tinggi.
- c) Tingkat partisipasi tamatan di dunia kerja tinggi.
- d) Dimilikinya kemandirian dalam bekerja sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

Jadi sekolah menengah kejuruan, suatu bentuk pendidikan yang mengembangkan bakat dan ketrampilan siswa yang diperoleh dalam sekolah maupun luar sekolah. Pendidikan yang diperoleh dalam sekolah yaitu belajar dan pembelajaran (teori), sedangkan pendidikan di luar sekolah yaitu di dunia usaha dan industri untuk mendapatkan pengalaman kerja (praktik). Sehingga pendidikan kejuruan diharapkan mampu membekali peserta didik yang berkompeten agar mampu mengembangkan diri dikemudian hari.

2. Pendidikan Sistem Ganda (PSG)

a. Pengertian Pendidikan Sistem Ganda

PSG atau mungkin lebih akrab dikenal dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Praktik Kerja Industri (Prakerin), adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional, yang memadukan secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dan program perusahaan yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional. Dimana keahlian profesional tersebut hanya dapat dibentuk melalui tiga unsur utama yaitu ilmu pengetahuan, teknik dan kiat. Ilmu pengetahuan dan teknik dapat dipelajari dan dikuasai kapan dan dimana saja kita berada, sedangkan kiat tidak dapat diajarkan tetapi dapat dikuasai melalui proses mengerjakan langsung pekerjaan pada bidang profesi itu sendiri.

Bahwasannya pengertian PSG adalah “PSG dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional dibidangnya. Melalui PSG diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang profesional tersebut” (Depdiknas, 1997: 21). Dimana para siswa yang melaksanakan Pendidikan tersebut diharapkan dapat menerapkan ilmu yang didapat dan sekaligus mempelajari dunia industri. Tanpa diadakannya PSG kita tidak dapat langsung terjun ke dunia industri karena kita belum mengetahui situasi dan kondisi lingkungan kerja. Selain itu perusahaan tidak dapat mengetahui mana tenaga kerja yang profesional dan mana tenaga kerja yang tidak profesional. PSG memang harus dilaksanakan karena dapat menguntungkan semua pihak yang melaksanakannya.

Dalam konsep sistem ganda pada SMK di Indonesia, pengertian dari PSG sendiri yaitu sebagai berikut:

Suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penugasan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai

suatu tingkat keahlian profesional tertentu (Dikmenjur, Dikdasmen Depdikbud, 1994: 7).

Dari pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa PSG suatu program pendidikan SMK yang menerkaitkan dengan dunia usaha dan industri sebagai praktik kerja secara nyata, maka teori yang di peroleh dalam sekolah dapat di praktikan di lapangan kerja, hal ini di laksanakan supaya siswa mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bekerja.

Sedangkan dalam kurikulum SMK 2004, yang dimaksud dengan PSG, Depdiknas (2004) adalah:

Pola penyelenggaraan diklat yang dikelola bersama-sama antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri atau asosiasi profesi sebagai institusi pasangan (IP), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi dan sertifikasi yang merupakan suatu kesatuan program dengan menggunakan berbagai bentuk alternative pelaksanaan, seperti *day release*, *block release*, dan sebagainya (hlm. 8).

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Sistem Ganda (PSG) merupakan program bersama antara SMK dengan dunia usaha atau industri, dimana proses pendidikan dan pelatihan di laksanakan di dua tempat yaitu di sekolah dan di dunia usaha atau industri. Kemudian untuk pengenalan tahap awal sebelum siswa terjun latihan ke dunia usaha dan industri, sekolah juga harus menyelenggarakan unit produksi.

b. Dasar dan Tujuan Pendidikan Sistem Ganda

Pelaksanaan PSG pada pendidikan menengah kejuruan didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah, PP Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional. Kepmendikbud No.

0490/U/1992 tentang SMK dan Kepmendikbud No. 080/U/1993 tentang Kurikulum SMK, sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. (UUSPN, Bab IV, pasal 10, ayat (1)).
- (2) Penyelenggaran Sekolah menengah dapat bekerja sama dengan masyarakat terutama dunia usaha atau industri dan para dermawan untuk memperoleh sumber daya dalam rangka menunjang pelaksanaan dan pengembangan pendidikan. (PP 29, Bab XI, pasal 29, ayat (1)).
- (3) Pengadaan dan pendayagunaan sumbr daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan atau keluarga peserta didik. (UUSPN, Bab VIII, pasal 33)
- (4) Masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. (UUSPN, Bab XIII, pasal 47, ayat (1)).
- (5) Peran serta masyarakat dapat berbentuk pemberian kesempatan untuk magang dan atau latihan kerja. (PP 39, Bab III, Pasal 4, butir (8)).
- (6) Pemerintah dan masyarakat menciptakan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. (PP 39, Bab VI, pasal 8, ayat (2)).
- (7) Pada sekolah menengah dapat dilakukan uji coba gagasan baru yang diperluka dalam rangka pengembangan pendidikan menengah. (PP 29, Bab XIII, pasal 32, ayat (2)).
- (8) Kerjasama SMK dengan dunia usaha terutama bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian program SMK dengan kebutuhan dunia kerja yang diusahakan dengan asas saling menguntungkan. (Kepmendikbud No. 0490/U/1992, pasal 33).
- (9) SMK dapat memilih pola penyelenggaraan pengajaran sebagai berikut:

- a) Menggunakan unit produksi sekolah yang beroperasi secara professional sebagai wahana penialitian kejuruan.
- b) Melaksanakan sebagai kelompok mata pelajaran keahlian kejuruan di sekolah, dan sebagian di dunia usaha atau industri.
- c) Melaksanakan kelompok mata pelajaran keahlian kejuruan sepenuhnya dimasyarakat, dunia usaha dan industri (Kepmendikbud No. 080/U/1993, Bab IV, butir C.1. (kurikulum SMK)).

Dari PP di atas mengenai dasar kurikulum SMK dapat disimpulkan bahwa pendidikan dapat dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan di luar sekolah. Diadakannya dua jalur tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian program SMK dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

Sedangkan tujuan diselenggarakannya PSG berdasarkan konsep Sistem Ganda pada SMK di Indonesia, Dikmenjur Dikdasmen depdikbud (1994) adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian professional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.
2. Memperkokoh *link and match* antara sekolah dengan dunia kerja.
3. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan penelitian tenaga kerja yang berkualitas professional.
4. Memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan (hlm. 8).

Adapun mengenai sasaran utama yang diharapkan dalam sistem ganda adalah mengoptimalkan hasil pembelajaran yang berarti berusaha untuk mencapai tujuan pendidikan kejuruan secara maksimal, serta berusaha menghasilkan lulusan lembaga pendidikan kejuruan yang memiliki keterampilan professional dan sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.

c. Komponen Pendidikan Sistem Ganda

Setelah mengetahui dasar dan tujuan diadakannya program PSG, maka disini akan membahas mengenai komponen PSG itu ada apasaja. PSG sebagai suatu sistem pendidikan dan pelatihan memiliki Komponen / Sub sistem yaitu:

1) Program Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan

Program Pendidikan dan pelatihan kejuruan harus disusun secara bersama-sama antara SMK dengan institusi pasangan, bisa dilakukan melalui proses sinkronisasi antara kurikulum SMK dengan tuntutan keahlian (kompetensi) yang ada di Industri dunia kerja.

2) Sumber daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia disini meliputi tenaga kependidikan dan pelatihan (Guru/Instruktur), dan tenaga non kependidikan. Pada prinsipnya SDM yang diperlukan oleh intitusi pelaksana pendidikan dalam rangka pelaksanaan program PSG antara lain adalah tenaga yang memiliki kompensasi pendidikan dan keahlian kejuruan serta harus memiliki wawasan yang luas.

3) Fasilitas Pendidikan

Dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda, proses pembelajaran dilakukan didua tempat yaitu di sekolah dan di industri atau perusahaan, maka penyediaan fasilitas pendidikan harus diarahkan pada fasilitas yang mendukung pada pembentukan kemampuan atau kompetensi dasar untuk menyiapkan siswa memasuki praktik pada unit produksi dan industri.

4) Manajemen Pendidikan

Dalam konteks pendidikan sistem ganda, peranan manajemen pendidikan memegang peran yang sangat penting, hal ini menyangkut perencanaan pendidikan, pelaksanaan pendidikan termasuk pemberdayaan guru dan instruktur, serta pengawasan, monitoring dan

evaluasi yang dilakukan bersama antara SMK dengan Institusi pasangannya.

5) Siswa

Dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda, siswa bukan saja sebagai obyek didik tetapi juga sebagai subyek, karena yang dipelajari bukan saja yang ada di ruang kelas dan bengkel atau laboratorium tetapi siswa juga melakukan sendiri untuk beradaptasi dengan tatanan budaya dan perilaku yang berlaku di industri atau yang disebut dengan etos kerja. Hal ini tidak bisa dipelajari di sekolah.

6) Biaya

Dalam pelaksanaan PSG yang berlangsung di dua tempat, maka konsekuensi biaya menjadi tanggungan bersama antara SMK dengan Institusi Pasangan sesuai dengan beban yang disepakati bersama.

7) Institusi Pasangan (IP)

Dalam pelaksanaan PSG, IP menjadi komponen yang mutlak ada, karena tidak mungkin bisa dilaksanakan proses pembelajaran yang mengarah pada kompetensi jika tidak ada pasangan industri atau dunia kerja sebagai wahana (lingkungan kerja) dimana siswa bisa belajar keahlian dan profesional sesuai dengan tuntutan dunia kerja (Ahmad Sonhadji K.H. 1998: 24).

Komponen-komponen PSG yang telah dijabarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara program pendidikan dan pelatihan kejuruan, SDM, fasilitas pendidikan, manajemen pendidikan, siswa, biaya dan Institusi Pasangan saling berkaitan satu sama lain. Sehingga dapat terlaksananya program PSG yang dilaksanakan di SMK dengan pihak Institusi Pasangan, apabila salah satu diantara komponen tersebut tidak ada maka program PSG tidak akan berjalan dengan maksimal.

d. Sistem Pembimbingan Siswa Pendidikan Sistem Ganda

Pembimbingan menduduki peran strategi dalam keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Petugas pembimbing dapat perseorangan, (guru yang ditunjuk) dan atau tim khusus yang terdiri dari guru di sekolah dengan instruktur dari dunia kerja. Adapun tugas dari pembimbing, Ahmad Sonhadji K.H. (1998) adalah sebagai berikut:

- a) Turut serta secara aktif mengadakan seleksi bagi calon siswa program PSG
- b) Pengkondisian siswa peserta program PSG, sebelum melaksanakan kegiatan praktik keahlian pada IP.
- c) Melaksanakan pelatihan dan bimbingan bagi siswa secara sistematis berdasarkan program dan jadwal yang telah disepakati.
- d) Mengadakan seleksi siswa sebelum melakukan praktik keahlian.
- e) Melakukan penilaian secara kontinyu terhadap kegiatan
- f) Mengadakan ujian kompetensi terhadap siswa PSG yang telah selesai melaksanakan praktik keahlian pada IP.
- g) Memberikan dorongan kepada siswa PSG agar selalu aktif dan tekun serta antusias mengikuti kegiatan belajar maupun praktik.
- h) Memberikan peringatan atau hukuman kepada siswa PSG sesuai dengan sifat pelanggaran yang berlaku di IP (hlm. 26).

Dari pendapat di atas, maka tugas dari pembimbing PSG sangat berperan penting dalam melaksanakan program PSG dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan selesainya kegiatan tersebut. Serta bertanggung jawab penuh dalam terselenggaranya program, tidak hanya melatih dan membimbing tetapi juga memberikan dorongan kepada siswa supaya berperan aktif, tekun dan antusias untuk melaksanakan program PSG tersebut.

e. Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Sistem Ganda

Monitoring dan evaluasi PSG dilaksanakan untuk mengendalikan proses implementasi dalam rangka menguji keterlaksanaan dan konsistensi perencanaan dan tahapan kegiatan pelaksanaan sehingga dapat menentukan pencapaian target yang diharapkan. Monitoring dapat dilakukan selama proses

pelaksanaan berjalan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan kesesuaian antara perencanaan dalam perbaikan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dan mengembalikan arah kegiatan sesuai rencana sebelumnya.

Secara khusus monitoring berguna untuk:

- a) Memantau setiap tahapan proses kegiatan selama program berjalan secara berkala, untuk melihat konsistensi antara kegiatan yang direncanakan dengan pelaksanaan.
- b) Mencapai ketercapaian program dan mengidentifikasi permasalahan yang di hadapi selama program berjalan, sebagai masukan untuk pembinaan dan perbaikan serta perencanaan ulang. (Dikmenjur Dikdasmen Depdikbud 1997: 15).

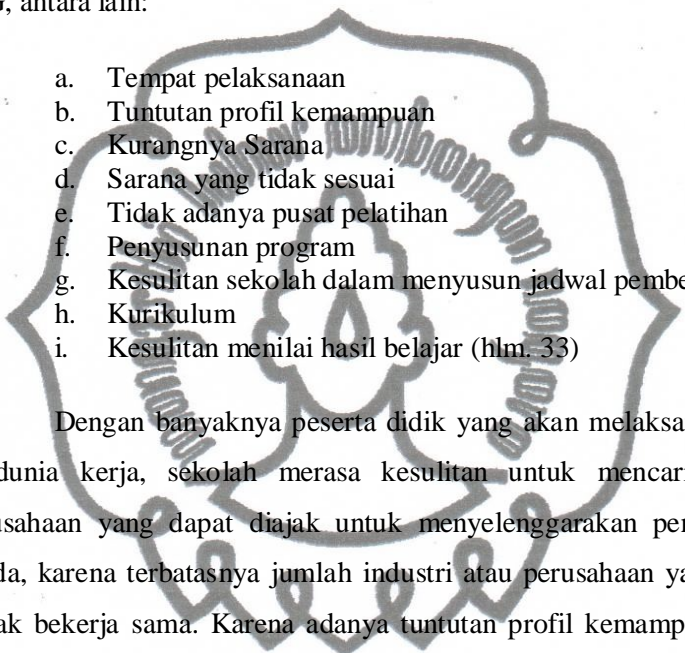
Agar pelaksanaan monitoring dapat berjalan dengan baik dan lancar serta mencapai tujuan maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Persiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PSG
 - (1) Menyusun proposal kegiatan monitoring dan evaluasi
 - (2) Pembentukan tim pelaksanaan monitoring dan evaluasi
 - (3) Penyusunan perangkat monitoring dan evaluasi
 - (4) Melakukan koordinasi dengan instansi atau pelaksana program (SMK dan Institusi Pasangan).
- b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PSG
 - (1) Petugas monitoring dan evaluasi PSG
 - (2) Organisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PSG
 - (3) Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi PSG
 - (4) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi (Ahmad Sonhadji K.H., 1998: 25).

Sehingga monitoring harus dilaksanakan sesuai dengan hal-hal seperti di atas, supaya nantinya PSG dapat berjalan dengan lancar, dan sebelumnya antara pihak sekolahan serta pihak instansi harus saling bekerjasama untuk tercapainya pelaksanaan PSG dengan baik, namun tidak semuanya lancar pasti ada kendala atau problematika pada saat pelaksanaan PSG yang akan dibahas selanjutnya.

f. Problematika Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda

Tidak semua kegiatan dalam pendidikan dapat berjalan dengan baik, namun juga terdapat problem-problem yang menghalanginya, seperti dijelaskan oleh Mamiek Slamet (1996) Problematika dalam penyelenggaraan PSG, antara lain:

- 
- a. Tempat pelaksanaan
 - b. Tuntutan profil kemampuan
 - c. Kurangnya Sarana
 - d. Sarana yang tidak sesuai
 - e. Tidak adanya pusat pelatihan
 - f. Penyusunan program
 - g. Kesulitan sekolah dalam menyusun jadwal pembelajaran
 - h. Kurikulum
 - i. Kesulitan menilai hasil belajar (hlm. 33)

Dengan banyaknya peserta didik yang akan melaksanakan pelatihan di dunia kerja, sekolah merasa kesulitan untuk mencari industri atau perusahaan yang dapat diajak untuk menyelenggarakan pendidikan sistem ganda, karena terbatasnya jumlah industri atau perusahaan yang layak untuk diajak bekerja sama. Karena adanya tuntutan profil kemampuan yang harus dipenuhi oleh tamatan dalam program pendidikan tertentu setelah lulus SMK, maka industri atau perusahaan yang diajak kerjasama sulit untuk menyesuaikan dengan profil kemampuan yang di harapkan oleh sekolah.

Jenis dan jumlah sarana yang ada di sekolah memenuhi syarat untuk mendidik anak agar memiliki keterampilan dasar sebelum melaksanakan pelatihan di dunia kerja. Selain itu sekolah juga merasa sulit untuk mencari industri yang memiliki sarana yang sesuai dengan tuntutan profil kemampuan yang diharapkan agar peserta didik menjadi tenaga professional dalam bidang tertentu, tidak adanya pusat pendidikan dan pelatihan akan menyebabkan kurang terpenuhinya tenaga industri untuk membimbing peserta didik yang ada di industri tersebut, akibatnya pembelajaran di industri kurang terarah dan

tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum. Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sistem Ganda di sekolah dan di dunia kerja perlu adanya program bersama antara sekolah dan dunia kerja untuk menyusun program pendidikan dan pelatihan. Namun untuk menyusun program bersama menjelang awal tahun ajaran sulit untuk dilaksanakan, karena kesibukan masing-masing.

Sekolah kesulitan dalam menyusun jadwal pembelajaran. Kesulitan ini terjadi karena mata pelajaran dasar umum (normativ), dan pengetahuan tentang mata pelajaran produktif serta keterampilan dasar dilaksanakan di sekolah, sedangkan keterampilan keahlian dilaksanakan di dunia kerja. Kurikulum yang berlaku di sekolah kurang sinkron dengan keadaan institusi pasangannya. Maka dari itu penyusunan kurikulum perlu didefinisikan dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi industri yang diajak kerjasama. Dalam menilai hasil belajar, timbul kesulitan. Kesulitan timbul karena pembelajaran ada di dua tempat, yaitu di sekolah (oleh guru) dan di industri (oleh instruktur).

Dalam menyelenggarakan PSG terdapat beberapa kendala dan hambatan Sumarso (1996) antara lain:

- “a) Jumlah dan jenis usaha industri (DUDI), b) Belum adanya kerjasama yang baik, c) pemahaman konsep PSG yang belum benar, d) Kurangnya pengkondisian, sistem pembimbingan, dan penilaian yang belum dilaksanakan dengan baik, e) keterlibatan sekolah belum efektif dan kurang baiknya monitoring dan evaluasi” (hlm. 19).

Dunia usaha dan industri adalah mitra utama SMK dalam penyelenggaraan Program PSG. Namun seringkali pihak SMK sulit untuk mendapatkan perusahaan atau industri yang bisa untuk diajak kerjasama. Hal ini karena terbatasnya jumlah dan jenis usaha atau industri dilingkungan sekolah. Kerjasama yang kurang antara pihak SMK dengan DUDI bisa mengakibatkan penyelenggaraan program PSG tidak optimal. Sementara itu seringkali, penyelenggaraan PSG hanya dianggap sebagai salah satu kewajiban sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan tanpa memahami konsep PSG

yang sesungguhnya. Pengkondisian, sistem pembimbingan dan penilaian belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan pihak sekolah maupun institusi pasangan kurang serius dalam menyelenggarakan program PSG. Pada saat pelaksanaan praktik kerja industri (prakerin), seringkali pihak SMK menyerahkan siswa sepenuhnya kepada pihak IP tanpa diikuti dengan pengawasan dan penilaian yang berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas diambil kesimpulan bahwa ada beberapa kendala dalam pelaksanaan PSG antara lain:

- a) Kurangnya kesesuaian antara bidang keahlian siswa di sekolah dengan jenis pekerjaan di IP.
- b) Kurangnya kerjasama antara sekolah dan perusahaan sehingga timbul adanya konsep pemahaman yang berbeda-beda.
- c) Kurang dilakukan pengkondisian dan pembekalan kepada siswa sehingga sikap mental, sikap kerja dan bekal dasar tidak mendukung pelatihan.
- d) Kurikulum yang kurang sinkron dengan kondisi yang ada didalam perusahaan sehingga pelaksanaan PSG belum bisa dilaksanakan secara efektif.
- e) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSG belum dilaksanakan secara baik.

g. Institusi Pasangan

1) Pengertian Institusi Pasangan

Hardono dalam makalahnya menyatakan, “ IP adalah dunia kerja yang dapat memberikan kemampuan profesi sesuai dengan tuntutan tinggi jabatan pekerjaan dan telah mengadakan kesepakatan dalam bentuk ikatan kontrak kerjasama”. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memberikan definisi Institusi Pasangan adalah dunia kerja seperti dunia usaha dan industri, instansi pemerintah yang telah mengadakan kesepakatan dengan SMK baik secara lisan maupun tertulis untuk

bekerjasama dalam pelaksanaan PSG, yang memiliki aktivitas kerja sesuai dengan jurusan atau program keahlian yang ada di SMK yang bersangkutan. Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa IP adalah dunia usaha/industri yang digunakan sebagai tempat penelitian dan praktik kerja siswa SMK atas dasar program kerjasama yang formal. IP tersebut hendaknya memiliki aktivitas kerja yang sesuai dengan jurusan atau program keahlian yang ada di SMK yang bersangkutan.

2) **Kriteria dalam mencantumkan Institusi Pasangan**

Kriteria dalam pemilihan atau penentuan IP Harry S. Hartono dan Agung Purwadi, (1998) yaitu:

- (1) Kesesuaian jenis pekerjaan dengan industri
- (2) Adanya sarana yang diperlukan
- (3) Diklat
- (4) Ketenagaan
- (5) Daya tampung
- (6) Lokasi dan jarak
- (7) Ketersediaan industri dan jasa (hlm. 31)

Kesesuaian jenis pekerjaan dengan industri artinya yang dipilih sebagai institusi pasangan baik itu yang besar atau kecil sekalipun, jenis pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan program studi yang ada di sekolah. Sarana yang ada pada industri pasangan sebaiknya tingkat teknologinya mendukung tuntutan kemampuan yang diinginkan oleh program studi yang diselenggarakan sekolah. Yang perlu dicatat adalah sarana yang ada di dunia industri/jasa harus lebih memadai sebab hampir tidak ada manfaatnya jika SMK memaksa diri tetap bekerjasama dengan dunia industri/jasa yang sarannya tidak memadai.

Industri atau jasa calon IP dalam pelaksanaan praktik kerja dan industri sebaiknya mempunyai bagian pendidikan dan latihan (diklat). Instruktur dalam Prakerin sangat dibutuhkan, oleh karena itu industri sebaiknya memiliki tenaga kerja tersebut. Industri calon IP sebaiknya dapat menampung siswa dengan jumlah siswa yang akan dikirim, tetapi pada kenyataannya mungkin sulit, sebab umumnya daya tampung terbatas. Sebagai jalan keluarnya prakerin dilakukan secara bertahap.

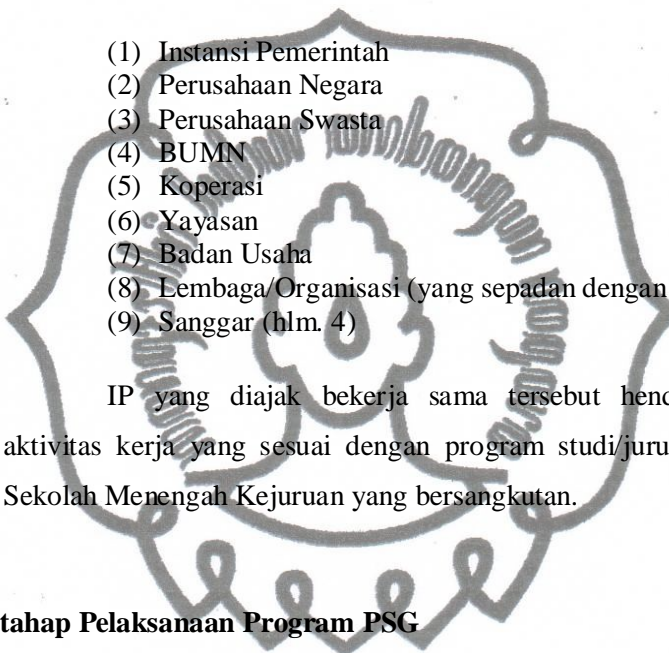
Kriteria lokasi dan jarak ini luwes dan ringan dibanding kriteria lainnya, artinya walaupun jarak DUDI relatif jauh, sekolah tentu masih dapat memikirkan jalan keluarnya. Sebaiknya lokasi tersebut tidak terlalu jauh dari lokasi sekolah dan atau tempat tinggal siswa. Ketersediaan DUDI ini mutlak, sebab walaupun kriteria di atas dapat dipenuhi oleh sekolah tetapi pihak industri/perusahaan calon IP tidak bersedia diajak kerjasama untuk melaksanakan prakerin, maka kriteria-kriteria di atas praktis tidak berhubungan seluruhnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa industri/usaha sebagai IP harus mempertimbangkan beberapa hal yang satu sama lain saling berkaitan.

3) Kerjasama dengan Institusi Pasangan

Sesuai dengan tujuan SMK yaitu mampu menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai, adanya PSG diharapkan mampu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan relevan dengan dunia usaha dan industri sebagai tempat bagi siswa untuk mengembangkan dan meningkatkan bakat yang dimilikinya. Diharapkan juga apa yang dilatihkan di sekolah dengan praktik di IP tidak jauh berbeda. Kedua belah pihak akan saling melengkapi dan saling

membutuhkan. Kerjasama itu bisa dilaksanakan dalam bentuk praktik kerja lapangan atau Pratek kerja industri (Prakerin).

Institusi pasangan dalam program PSG Dikmenjur Dikdasmen Depdikbud, (1997) dapat berupa:

- 
- (1) Instansi Pemerintah
 - (2) Perusahaan Negara
 - (3) Perusahaan Swasta
 - (4) BUMN
 - (5) Koperasi
 - (6) Yayasan
 - (7) Badan Usaha
 - (8) Lembaga/Organisasi (yang sepadan dengan program SMK)
 - (9) Sanggar (hlm. 4)

IP yang diajak bekerja sama tersebut hendaknya memiliki aktivitas kerja yang sesuai dengan program studi/jurusan yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan yang bersangkutan.

3. Tahap-tahap Pelaksanaan Program PSG

Menurut Slameto (2003), bahwa “membimbing adalah suatu aktivitas mencari, menemukan dan melihat pokok masalah” (hlm. 92). Sehingga pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri dan perwujudan dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan.

Jadi lebih rinci menguraikan bahwa “bimbingan (*guidance*) mempunyai hubungan dengan *guiding* : *Showing a Way* (menunjukkan jalan), *conducting* (menuntun), *giving instruction* (memberikan petunjuk), *regulating* (mengatur) *governing* (mengarahkan), *giving advice* (memberikan nasehat)”.

Dengan memiliki sejumlah persyaratan seperti di atas, maka baik guru kejuruan diharapkan mampu melaksanakan tugas pembimbingan terhadap siswa PSG dengan baik, terarah dan efektif. Dikmenjur menjelaskan tentang ruang lingkup tugas pembimbing PSG, baik pada waktu siswa melakukan praktik dasar kejuruan maupun melaksanakan praktik keahlian pada lini produksi di dunia usaha / industri (1997: 25).

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mempersiapkan siswa melaksanakan PSG harus menunjukkan adanya keserasian antara kematangan fisik dan mental serta pengalaman belajar sehingga individu mempunyai kemampuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam hubungannya dengan pekerjaan, tanpa mengalami kesulitan, hambatan, serta dapat praktik dengan hasil yang maksimal. Kesiapan guru mempersiapkan siswanya dalam melaksanakan PSG untuk berkompetisi di dunia kerja dapat dicapai melalui proses belajar-mengajar di kelas, melalui praktik kerja industri serta uji dan sertifikasi. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

Dalam persiapan melaksanakan program PSG tidak terlepas dari proses belajar mengajar di kelas, sehingga dari proses belajar mengajar tersebut yang nantinya sebagai bekal siswa dalam melaksanakan prakerin di DUDI, selanjutnya sebagai bukti bahwa siswa telah melaksanakan prakerin, maka siswa dapat mengikuti uji dan sertifikasi keahlian, untuk lebih rincinya akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Proses Belajar-Mengajar

1) Pengertian Proses

Kata proses berasal dari bahasa latin *Processus* yang berarti berjalan ke depan. Kata ini memiliki makna urutan langkah atau kemajuan yang mengarah pada suatu sasaran atau tujuan. Menurut Uzer Usman (2011) “Proses adalah interaksi semua komponen atau unsur yang terdapat dalam belajar-mengajar yang satu sama lainnya saling berhubungan (*interdependent*) dalam ikatan untuk mencapai tujuan”

(hlm. 4). Sedangkan menurut Tarigan (1990) “Proses berfungsi sebagai alat menemukan dan mengembangkan konsep, dengan pengembangan konsep dalam proses belajar mengajar menghasilkan sikap dan nilai dalam diri siswa” (hlm. 10).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses adalah urutan langkah yang menyangkut tingkah laku dimana satu sama lain saling berhubungan (*interdependent*) dalam ikatan untuk mencapai suatu tujuan.

2) Pengertian Belajar

Menurut Hamalik (2008: 27), “Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan”.

Pendapat lain mengenai pengertian belajar, Slameto (2003), “suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya” (hlm. 2).

Sedangkan menurut Dimiyati dan Mudjiono, “belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri” (2009: 7).

Dari pendapat para ahli tersebut di atas dapat dikemukakan hal-hal yang penting tentang belajar, yaitu:

- a) Belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku
- b) Perubahan itu bersifat menetap dan menuju ke pribadi seutuhnya.
- c) Perubahan yang terjadi karena adanya suatu latihan atau pengalaman.

3) Pengertian Mengajar

Mengajar Usman (2011: 6), "Mengajar adalah suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan proses belajar". Pengertian ini mengandung makna bahwa guru dituntut untuk dapat berperan sebagai organisator proses belajar-mengajar hendaknya guru mampu memanfaatkan lingkungan, baik yang ada di dalam kelas maupun diluar kelas. Sedangkan pengertian mengajar sesuai dengan simpulan Sardiman A.M (2007) mengemukakan, "Mengajar adalah menyediakan kondisi optimal yang merangsang serta mengarahkan kegiatan belajar anak didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai atau sikap yang dapat membawa perubahan tingkah laku maupun pertumbuhan sebagai pribadi" (hlm, 47).

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa mengajar adalah suatu usaha mengarahkan anak didiknya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai atau sikap yang dapat membawa perubahan tingkah laku dalam kegiatan mengajar guru harus mampu membantu perkembangan anak didik secara optimal baik jasmani maupun rohani. Sedangkan fungsi pokok dalam mengajar itu adalah menyediakan kondisi yang kondusif dalam arti yang berperan aktif dan banyak melakukan kegiatan adalah siswa sedangkan guru hanya berfungsi sebagai pembimbing.

4) Pengertian Proses Belajar-Mengajar

Mengenai pengertian proses belajar mengajar Uzer Usman (2011) berpendapat, "Proses belajar-mengajar adalah suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu" (hlm. 4). Menurut Djago Tarigan, "Proses Belajar-

Mengajar yaitu suatu proses kegiatan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian program pengajaran” (1990: 38).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa proses belajar-mengajar adalah suatu kesatuan kegiatan yang tidak terpisahkan antara siswa yang belajar dan guru yang mengajar dan antara dua kegiatan ini terjadi interaksi yang saling menunjang dan melibatkan komponen belajar-mengajar.

b. Pelaksanaan Praktek Kerja dan Industri (Prakerin)

1) Pengertian Praktik Kerja dan Industri

Prakerin adalah bagian dari PSG sebagai program bersama antara SMK dan Industri yang dilaksanakan di dunia kerja dan industri. Praktik atau melakukan pelatihan dilapangan merupakan kegiatan yang harus ditempuh oleh siswa SMK dalam bentuk praktik industri pada awal pelaksanaan PSG.

Adapun pengertian prakerin lain adalah pola penyelenggaraan diklat yang dikelola bersama-sama antara SMK dengan industri atau asosiasi profesi sebagai IP, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan sertifikasi yang merupakan satu kesatuan program dengan menggunakan berbagai bentuk alternatif pelaksanaan, seperti *day release*, *block release*, dan sebagainya (Dikmenjur, 2008).

Dari pendapat di atas bahwa prakerin suatu bentuk program pendidikan untuk membekali ketrampilan kepada siswa yang dilaksanakan di dunia kerja nyata setelah pihak SMK dan IP saling kerja sama untuk membantu siswa mengasah ketrampilan yang dimilikinya.

Sedangkan pengertian lain dari prakerin, Anwar (2004) menyatakan:

Bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu (hlm. 50).

Jadi dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prakerin adalah suatu komponen praktik keahlian profesi, berupa kegiatan secara terprogram dalam situasi sebenarnya untuk mencapai tingkat keahlian dan sikap kerja profesional yang dilaksanakan di industri.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang disebutkan bahwa pengertian Prakerin sebagai berikut:

Program wajib yang harus diselenggarakan oleh sekolah khususnya SMK dan pendidikan luar sekolah serta wajib diikuti oleh siswa atau warga belajar. Penyelenggaraan Prakerin akan membantu peserta didik untuk memantapkan hasil belajar yang diperoleh di sekolah serta membekali siswa dengan pengalaman nyata sesuai dengan program studi yang dipilihnya (Dikmendikti, 2003).

Dari pernyataan tersebut, maka dalam penelitian ini Prakerin didefinisikan sebagai penyelenggaraan pendidikan yang mengintegrasikan kegiatan pendidikan (teori) di sekolah dengan kegiatan pendidikan (praktik) di dunia industri. Dengan kata lain bahwa praktik kerja industri adalah suatu strategi dimana setiap siswa mengalami proses belajar melalui bekerja langsung (*learning by doing*) pada pekerjaan yang sesungguhnya. Dengan praktik kerja industri ini peserta didik memperoleh pengalaman dengan bahan kerja serta membiasakan diri dengan perkembangan-perkembangan baru.

2) Tujuan Praktik Kerja dan Industri

Penentuan tujuan merupakan titik awal dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manajemen. Penentuan tujuan yang jelas dapat

digunakan sebagai penentu arah, pedoman dalam pelaksanaan maupun sebagai salah satu alat evaluasi dari pelaksanaan tersebut.

Adapun tujuan dari prakerin, Anwar (2004), menyatakan:

- a) Siswa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dunia kerja yang sesungguhnya.
- b) Siswa memiliki tingkat kompetensi standar sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh dunia kerja.
- c) Siswa menjadi tenaga kerja yang berwawasan mutu, ekonomi, bisnis, kewirausahaan dan produktif.
- d) Siswa dapat menyerap secara nalar teknologi dan budaya kerja untuk kepentingan pengembangan dirinya (hlm. 44).

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, pada dasarnya pelatihan di dunia kerja melalui program praktek kerja industri atau sering disebut *on the job training* bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja yang sesungguhnya agar peserta didik menguasai kompetensi keahlian produktif terstandar, menginternalisasi sikap, nilai dan budaya industri yang berorientasi pada standar, mutu, nilai-nilai ekonomi dan jiwa kewirausahaan serta membentuk etos kerja yang kritis, produktif dan kompetitif.

3) Manfaat Praktik Kerja dan Industri

Seorang ahli yang membahas prakerin menyatakan manfaat yang dapat diperoleh dari prakerin adalah sebagai berikut:

- a) Bagi Siswa
 - (1) Hasil belajar akan lebih bermakna, karena setelah tamat akan memiliki keahlian profesional sebagai bekal mencari kerja dan mengembangkan diri secara berkelanjutan.
 - (2) Waktu yang diperlukan untuk mencapai keahlian profesional lebih singkat karena telah dilatih pada saat sekolah.
 - (3) Keahlian profesional yang diperoleh dapat mengangkat harga diri dan kepercayaan diri peserta didik yang selanjutnya dapat mendorong mereka untuk meningkatkan keahlian profesionalnya pada tingkat yang lebih tinggi.

b) Bagi Sekolah

- (1) Terjaminnya pencapaian tujuan pendidikan untuk memberi keahlian profesional bagi peserta didik.
- (2) Tanggungan biaya pendidikan menjadi ringan.
- (3) Terdapat kesesuaian antara program pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja.
- (4) Memberi keputusan bagi penyelenggara pendidikan.

c) Bagi Dunia Usaha dan Dunia Industri

- (1) Dapat mengetahui secara tepat kualitas peserta didik yang belajar dan bekerja di perusahaan.
- (2) Pada batas-batas tertentu selama masa pendidikan peserta didik tenaga kerja yang dapat memberi keuntungan.
- (3) Dapat memberi tugas kepada peserta didik untuk mencari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang relevan.
- (4) Memberi keputusan bagi DUDI karena ikut serta menentukan hari depan bangsa (Anwar, 2004: 50-51).

Dari manfaat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan prakerin diharapkan setiap siswa mampu mengikuti kegiatan kerja serta memahami kegiatan kerja yang dilakukan di DUDI agar siswa tersebut dapat mencapai serta mendapatkan sesuatu yang baik dan berguna bagi dirinya serta agar siswa tersebut mampu menunjukkan kinerjanya secara maksimal apa yang telah dilakukannya selama berada di DUDI sehingga mampu membuat dirinya diperhitungkan di DUDI. Selain itu membentuk mental dan motivasi siswa SMK sebagai tenaga kerja yang siap kerja serta mampu mandiri serta berjiwa pekerja keras, jujur, bertanggungjawab serta ulet dalam bekerja.

4) Ciri Pelaksanaan Praktik Kerja dan Industri

Pembelajaran di dunia kerja melalui program prakerin merupakan bagian integral dalam program diklat secara menyeluruh, karena itu materi yang dipelajari dan kompetensi tamatan yang telah ditetapkan. Mengingat teori yang dipelajari di SMK kadang-kadang berbeda dengan

yang terjadi di DUDI, maka pihak SMK harus benar-benar dapat menyiapkan peserta didik sesuai dengan karakteristik dan tuntutan dunia kerja tempat siswa berlatih. Penyiapan peserta didik tersebut bukan hanya menyangkut dasar-dasar kompetensinya, melainkan juga menyangkut kesiapan fisik, mental, wawasan dan orientasi kerja yang benar.

Adapun ciri pembelajaran dilihat dari prakerin atau *On The Job Training* (OJT) adalah sebagai berikut:

- a) Peserta diklat yang mengikuti pelatihan di industri adalah mereka yang memenuhi persyaratan minimal yang telah ditetapkan, baik pada saat penerimaan maupun pada saat pemilihan program diklat.
- b) Kegiatan pelatihan di industri dilaksanakan sesuai dengan program bersama yang telah disepakati.
- c) Lamanya peserta berada di suatu industri, ditentukan sesuai atas dasar jumlah waktu pelatihan yang telah disyaratkan.
- d) Kegiatan pelatihan di industri dilaksanakan sesuai dengan program bersama yang telah disepakati.
- e) Industri dapat melakukan pemilihan peserta dan memberikan pembekalan kemampuan tambahan, agar benar-benar siap dan memenuhi standar minimal sesuai dengan persyaratan kerja yang ada.
- f) Pelaksanaan pembelajaran di industri dilengkapi dengan perangkat antara lain jurnal kegiatan peserta, termasuk daftar kemajuan hasil belajar peserta, perangkat monitoring, kontrak kerja (jika diperlukan), asuransi kecelakaan kerja bagi peserta dan lain-lain yang dianggap perlu.
- g) Kegiatan pembelajaran berbasis kompetensi dilakukan setelah penyimpan komponen-komponen atau saran pembelajaran dipastikan kesiapannya proses pembelajaran (Depdikbud-Pedoman Pelaksanaan Kurikulum SMK, 1999: 7)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikemukakan bahwa sistem pembelajaran, yang dilihat dari prakerin mempunyai ciri-ciri, yaitu peserta diklat yang mengikuti pelatihan di industri adalah mereka yang telah ditetapkan pada saat penerimaan maupun pada saat pemilihan program diklat, pelaksanaannya sesuai dengan program yang telah disepakati bersama, lamanya peserta berada di industri ditentukan sesuai waktu pelatihan yang telah disyaratkan, pihak industri dapat memilih peserta, pelaksanaan pembelajaran yang telah dilengkapi dengan perangkat yaitu jurnal kegiatan peserta, *monitoring*, kontrak kerja, asuransi kecelakaan kerja dan perangkat lain yang diperlukan sesuai dengan industri yang ditempati.

Dari semua pemaparan di atas yang tentang prakerin, maka dalam penelitian ini dapat menyimpulkan bahwasannya melaksanakan prakerin yang disebut sebagai salah satu program dari PSG terdapat tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- a) Tahap Persiapan, yang meliputi beberapa kegiatan, yaitu:
 - (1) Persiapan Perangkat administrasi prakerin, meliputi : buku jurnal siswa prakerin, buku saku/petunjuk siswa prakerin, buku jurnal untuk pembimbing, surat permohonan prakerin ke institusi pasangan, surat pengantar pengiriman siswa ke industri, blangko surat keterangan prakerin , dan blangko *monitoring*.
 - (2) Pemetaan Prakerin Pemetaan prakerin merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh kejelasan tentang berbagai hal, diantaranya adalah kejelasan pihak yang terlibat serta jadwal kegiatan prakerin.
 - (3) Pembekalan Prakerin Sebelum siswa diterjunkan untuk melakukan praktik kerja industri maka kepada para siswa

perlu diberikan pembekalan. Pembekalan tersebut dilakukan untuk pembenahan mental dan etos kerja siswa. Adapun materi pembekalannya adalah 1) Orientasi dunia usaha atau industri, 2) Tugas dan kewajiban siswa prakerin di dunia usaha/industri, 3) Petunjuk pengisian buku-buku prakerin seperti jurnal prakerin, pembuatan laporan dan sebagainya, 4). Pembenahan sikap siswa selama di dunia Usaha/Industri, dan 5) Latihan. Adapun petugas yang memberikan pembekalan terdiri atas guru sekolah dan instruktur dari IP.

(4) Pembentukan pembimbing Prakerin Pembimbing ini bertugas membimbing siswa prakerin mulai saat penerjunan, monitoring, penarikan sampai pengujian hasil prakerin. Biasanya untuk satu IP terdiri atas 5 sampai 10 siswa dibimbing oleh satu orang pembimbing dari sekolah. Para pembimbing diwajibkan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan pada siswa yang dibimbingnya agar selama prakerin dapat melakukan kewajiban seperti yang diharapkan.

b) Tahap Pelaksanaan

- (1) Penerjunan siswa prakerin Pelaksanaan prakerin dimulai dengan penerjunan siswa ke IP. Proses penerjunan ini dilakukan secara formal di sekolah, dan dilepas oleh kepala sekolah untuk selanjutnya oleh masing-masing pembimbing diserahkan pada institusi pasangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi awal siswa prakerin oleh pembimbing. Setelah diterjunkan maka pada para siswa peserta prakerin akan dimonitor oleh pembimbing.

Kegiatan ini dilakukan selama prakerin dan dilakukan oleh pembimbing.

(3) Penarikan siswa prakerin. Proses penarikan siswa prakerin dilakukan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.

c) Tahap Evaluasi

(1) Uji kompetensi prakerin

Evaluasi pelaksanaan prakerin dimulai dengan melakukan uji prakerin di sekolah oleh pembimbing prakerin bagi siswa. Dalam rangka melakukan uji satu persatu untuk mendapatkan hasil akhir tentang hasil prakerin yang dilakukan. Ujian serta penilaian kompetensi prakerin dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak sekolah dan pihak dari IP.

(2) Lokakarya hasil prakerin

Selain evaluasi persiswa proses evaluasi atas kegiatan prakerin juga dilakukan secara komperhensif oleh sekolah dalam bentuk lokakarya. Hasil lokakarya tersebut pada akhirnya dirumuskan untuk menjadi dokumen guna perbaikan pada pelaksanaan prakerin pada periode berikutnya.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program PSG melalui prakerin adalah dengan diketahuinya jumlah lulusan yang terserap dipasaran kerja.

c. **Ujian dan Sertifikasi Keahlian**

1) **Pengertian ujian dan sertifikasi keahlian**

Ujian dan sertifikasi keahlian adalah suatu proses pemberian pengakuan keahlian dan kewenangan peserta dan atau tamatan dalam

melaksanakan tugas-tugas pekerjaan tertentu, melalui suatu proses sistem pengujian keahlian yang mengacu kepada standar keahlian yang berlaku dan diakui dilapangan kerja.

Ujian dan sertifikasi keahlian dibagi dalam dua kategori:

a) Ujian dan sertifikasi kompetensi

Menurut Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN), “Uji kompetensi adalah penguasaan kemampuan yang dipersyaratkan yang berlaku di industri tertentu dan atau dasar tuntutan”. Sedangkan dalam sistem pengujian dan sertifikasi PSG dijelaskan bahwa “Ujian kompetensi adalah suatu bentuk evaluasi hasil belajar yang melibatkan pihak pemakai dan lembaga-lembaga profesi sehingga strategi untuk memperoleh tamatan yang memiliki kemampuan produksi sesuai dengan standar yang dipersyaratkan pemakai” (1995: 6). Dasar yang dijadikan patokan dalam menetapkan jenis dan tingkat keahlian yang diujikan dan dicantumkan pada sertifikat kompetensi adalah standar keahlian yang berlaku di lapangan pekerjaan tertentu.

b) Ujian dan sertifikasi profesi

Keberhasilan peserta didik mencapai kemampuan sesuai dengan standar profesi, dilakukan melalui proses ujian profesi. Materi ujian profesi, pelaksanaan ujian dan penentuan hasil disepakati dan dilakukan oleh suatu tim ujian profesi yang anggotanya terdiri atas unsure SMK, industri/perusahaan pasangan, asosiasi profesi dan organisasi pekerja.

Menurut Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN).”Uji profesi adalah proses pengukuran dan penilaian penguasaan keahlian seseorang berdasarkan penguasaannya terhadap standar kemampuan yang dipersyaratkan untuk dinyatakan ahli dan berwenang pada bidang pekerjaan tertentu, sesuai standar

resmi (baku) yang berlaku pada suatu jenis keahlian tertentu”. Dasar yang dijadikan patokan dalam menetapkan jenis dan tingkat keahlian yang ditujukan dan dicantumkan pada sertifikat profesi, sepenuhnya mengacu kepada standar keahlian dan sertifikasi yang berlaku pada bidang profesi yang bersangkutan sehingga kewenangannya mengeluarkan sertifikat profesi sepenuhnya berada pada asosiasi terkait.

2) Tujuan Ujian dan Sertifikasi Keahlian

Menurut GBPP kurikulum SMK (1997), ujian sertifikasi keahlian bertujuan untuk:

- a) Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap keahlian yang dimiliki peserta baik yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan di SMK, maupun yang diperoleh diluar proses tersebut.
- b) Mendorong peserta untuk meraih penguasaan kompetensi terstandar, sehingga mudah untuk dipasarkan.
- c) Memacu SMK untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan dengan mutu standar (hlm. 17).

Jadi ujian sertifikasi keahlian bertujuan untuk memberikan pengakuan atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya bahwa siswa tersebut telah melaksanakan pelatihan yang dilaksanakan di dunia usaha dan industri, sehingga sertifikasi tersebut dapat digunakan untuk mencari pekerjaan, sebagai bukti bahwa telah memperoleh pengalaman bekerja.

Sehingga dari semua pembahasan di atas mengenai kesiapan yang dilakukan guru kepada siswa untuk melaksanakan program PSG terdapat tiga cara, yaitu proses belajar mengajar sebagai pendidikan yang dilakukan didalam sekolah, pelaksanaan prakerin yang dilaksanakan di DUDI sebagai pendidikan diluar sekolah sebagai

pembekalan siswa untuk memasuki dunia kerja yang termasuk dalam program PSG, serta uji dan sertifikasi sebagai bukti konkrit keberhasilan kemampuan sesuai dengan mencapai standar profesi setelah melaksanakan prakerin. Jadi ketiga hal tersebut antara teori dan praktek saling berkaitan sebagai terlaksananya program PSG yang terdapat dalam SMK untuk pembekalan peserta didik dalam memasuki dunia kerja dan industri.

4. Dunia Kerja

a. Pengertian Dunia Kerja

Dalam membahas dunia kerja kita tidak akan terlepas dari masalah pekerjaan, yang dimaksud dengan pekerjaan adalah kegiatan manusia untuk memperoleh pendapatan. Menurut Usman “Pekerjaan profesional memerlukan bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Pekerjaan professional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan pekerjaannya” (2011: 14). Setiap manusia akan selalu membutuhkan pekerjaan guna melangsungkan hidupnya karena pekerjaan merupakan sarana bagi kita untuk mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-harinya, disamping itu juga ada unsur-unsur pribadi lainnya seperti untuk mengaktualisasi diri, menguji kemampuan diri juga sekaligus kita mungkin dapat melayani orang lain melalui jasa kita atau dengan apa yang kita kerjakan dalam pekerjaan kita. Bekerja mengandung arti melaksanakan suatu tugas yang diakhiri dengan karya yang dapat dinikmati. Dapat pula diartikan bekerja adalah aktivitas manusia baik itu fisik maupun mental dan dasarnya adalah bawahan dan mempunyai tujuan untuk mendapatkan kepuasan. Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi.

Dunia kerja pada saat ini harus berkompetensi. Kompetensi menurut kurikulum SMK (2004) mengartikan bahwa “Kemampuan seseorang yang disyaratkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu pada dunia kerja dan ada pengakuan resmi atas kemampuan tersebut” (hlm. 6).

Sedangkan menurut Cut Zurnali, “kompetensi diartikan sebagai bakat, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dapat melakukan perilaku kognitif, afektif dan psikomotor dengan sebaik-baiknya” (2010: 75).

Dari definisi di atas kompetensi dapat digambarkan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab serta kemampuan yang dikuasai oleh seseorang, sehingga mereka dapat melakukan perilaku kognitif, afektif dan psikomotor. Berikut akan dijelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi dinamika pasar kerja.

1) Tenaga Kerja (*manpower*)

Tenaga kerja adalah daya manusia untuk melakukan pekerjaan. Pengertian umum tersebut sesuai dengan pengertian tenaga kerja yang dimuat dalam UU Pokok Ketenagakerjaan No. 14 tahun 2003 yaitu “Seseorang yang mampu melakukan pekerjaan dengan baik guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Sebagian dari jumlah penduduk usia kerja yang mempunyai pekerjaan dan yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi secara aktif atau pasif mencari pekerjaan disebut angkatan kerja. Dengan kata lain juga dapat dikatakan bahwa angkatan kerja ialah bagian penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. Menurut Yudo Swasono dan Endang Sulistyaningsih (1987) “Angkatan kerja (*labour force*) adalah bagian dari penduduk (usia kerja) baik yang bekerja maupun yang cari kerja yang masih mau dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan” (hlm. 20).

2) Kesempatan Kerja (*employment*) dan lowongan (*vacancy*)

Istilah *employment* dari bahasa Inggris berasal dari kata kerja *to employ* yang berarti menggunakan dalam suatu proses atau mempekerjakan, atau usaha memberikan pekerjaan disertai sumber kehidupan. Jadi *employment* berarti keadaan orang yang sedang mempunyai pekerjaan atau keadaan penggunaan tenaga kerja. Penggunaan istilah *employment* sehari-hari biasa dinyatakan dengan jumlah orang yang dimaksudkan sejumlah yang ada dalam pekerjaan atau mempunyai pekerjaan. Pengertian istilah ini mempunyai dua unsur yaitu lapangan/kesempatan kerja dan orang yang dipekerjakan atau yang melakukan pekerjaan tersebut.

Menurut Yudo Swasono dan Endang Sulistyaningsih, “Kesempatan kerja (*employment*) mengandung pengertian lapangan pekerjaan dan lapangan untuk bekerja, yang ada dari suatu kegiatan ekonomi (produksi)” (1987: 20). Dengan demikian kesempatan kerja adalah termasuk lapangan kerja yang masih lowong dan yang sudah diduduki. Dari yang masih lowong tersebut (yang mengandung arti adanya kesempatan) menimbulkan kebutuhan akan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja yang secara riil diperlukan oleh perusahaan/lembaga penerima kerja pada tingkat upah, posisi dan syarat tertentu melalui advertensi dan lain-lain itulah yang dinamakan lowongan (*vacancy*). Berdasarkan pada Modul Bursa Kerja 4 A (2001). “Lowongan pekerjaan adalah pekerjaan yang belum ada atau belum cukup jumlah orang yang melaksanakannya, terjadi karena perluasan usaha, perubahan teknik berproduksi atau karena ada tenaga kerja yang karena sesuatu hal berhenti dari pekerjaannya dan harus diisi dengan tenaga baru” (hlm: 4).

Untuk SMK, dunia kerja bagi siswa didiknya lebih difokuskan kepada DUDI. Tuntutan dunia industri saat ini, tenaga kerja haruslah

terampil dan ahli dalam bidang tertentu yang didasari oleh ilmu pengetahuan yang cukup. Hal ini dikarenakan semua dunia usaha industri menginginkan produk yang dihasilkan dapat bermutu dan dapat diterima masyarakat. Kegiatan dunia usaha industri adalah mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam proses pengolahan inilah sangat dibutuhkan tenaga kerja professional. Untuk lulusan SMK sebagai tenaga kerja tingkat menengah biasanya akan mengisi lowongan kerja disektor usaha industri sebagai tenaga kerja pengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau mengerjakan tugas-tugas administrasi diperusahaan tempatnya bekerja.

b. Kondisi Sumber Daya Manusia Indonesia

Saat ini kualitas SDM Indonesia berada pada posisi bawah bila dibandingkan dengan kualitas sumber daya manusia Negara-negara lain di dunia. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia disinyalir karena rendahnya mutu pendidikan dan berbagai faktor baik input, proses, maupun faktor pendukung lainnya. Hal ini sepenuhnya disadari oleh pihak Depdiknas. Dikmenjur menyatakan “Masalah mutu dan relevansi masih menjadi sorotan tercermin dari ketidakpuasan pihak yang berkepentingan terhadap tamatan SMK khususnya dunia usaha dan industri” (1994: 11).

Rendahnya SDM Indonesia juga diakibatkan kurangnya penguasaan IPTEK, dimana sikap mental dan penguasaan IPTEK yang tinggi pada setiap SDM Indonesia menjadi subyek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu dimensi daya saing dalam SDM semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang harus dikedepankan. Salah satu problem struktural yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah bahwa pendidikan merupakan subordinasi dari pembangunan ekonomi. Pada era

sebelum reformasi pembangunan dengan pendekatan fisik begitu dominan. Hal ini sejalan dengan kuatnya orientasi pertumbuhan ekonomi. (www.emperordeva.wordpress.com)

Permasalahan tersebut muncul pada kondisi SDM Indonesia saat ini adalah semakin besarnya angka pengangguran. Hal ini dikarenakan para tamatan lembaga pendidikan yang melamar pekerjaan di perusahaan kebanyakan belum memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang diharapkan perusahaan tersebut. Sehingga mereka akan kalah dalam berkompetisi dengan pekerja lainnya dimana, perusahaan pasti akan memilih pelamar yang memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan kepribadian yang maksimal. Untuk itu peningkatan kualitas pendidikan mutlak diperlukan agar terjadi peningkatan kualitasnya, sehingga mampu bersaing dalam pencari kerja yang berasal dari negara manapun juga, sebagai dampak dari kebutuhan globalisasi di bidang ketenakerjaan.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang dituntut oleh Dunia Industri atau Perusahaan yaitu melalui program Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau dikenal dengan Indonesia *Qualification Framework* (IQF).

Pengertian dari KKNI adalah “kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan suatu ukuran pencapaian proses pendidikan sebagai basis pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang (baik yang diperoleh secara formal, non formal, in formal, atau otodidak)”, (www.dikti.go.id). Dengan adanya KKNI ini menurut Dirjen akan merubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata dari Ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, in formal atau otodidak) yang akuntabel dan transparan.

Sehingga dari pengertian di atas KKNI akan membangun kesadaran mutu para penyelenggara pendidikan di Indonesia untuk menghasilkan

kualitas SDM yang sesuai dengan persyaratan dunia industri. Pendidikan yang dapat dilakukan di sekolah, di dunia industri maupun dari kegiatan sehari-harinya. Sehingga dengan demikian akan mengasah ketrampilan serta dapat mengembangkan kualitas SDM yang profesional sesuai dengan bakat yang dimilikinya.

Dari pengertian KKNi terdapat juga karakteristik unsur KKNi menurut Dirjen dalam bukunya edisi 1 yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan (*knowledge*) dideskripsikan sebagai penguasaan teori dan keterampilan oleh seseorang pada suatu bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang fakta dan informasi yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan untuk keperluan tertentu.
- 2) Keahlian (*know-how*) dideskripsikan sebagai penguasaan teori dan keterampilan oleh seseorang pada suatu bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang metodologi dan keterampilan teknis yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan untuk keperluan tertentu.
- 3) Keterampilan (*skill*) dideskripsikan sebagai kemampuan psikomotorik (termasuk *manual dexterity* dan penggunaan metode, bahan, alat dan instrumen) yang dicapai melalui pelatihan yang terukur dilandasi oleh pengetahuan (*knowledge*) atau pemahaman (*know-how*) yang dimiliki seseorang mampu menghasilkan produk atau unjuk kerja yang dapat dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif.
- 4) Afeksi dideskripsikan sebagai sikap (*attitude*) sensitif seseorang terhadap aspek-aspek di sekitar kehidupannya baik ditumbuhkan oleh karena proses pembelajarannya maupun lingkungan kehidupan keluarga atau masyarakat secara luas.
- 5) Kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya.
- 6) Capaian Pembelajaran merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja (2010: 20)

Sehingga dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam tenaga kerja harus mempunyai bekal pengetahuan yang banyak selain pengetahuan juga harus mempunyai keahlian, ketrampilan, afeksi dan kompetensi yang baik. Dengan demikian pendidikan akan dapat menciptakan SDM yang siap pakai di dunia industri.

Dalam KKNi pencapaian jenjang program pendidikan terdapat sembilan urutan jenjang pendidikan dan SMK menduduki urutan ke-dua. Pendidikan tersebut wajib menghasilkan lulusan dengan kualifikasi minimal setara dengan kualifikasi KKNi pada jenjang pendidikan yang sama, supaya dapat mencapai tujuan umum dan tujuan khusus. Menurut Dirjen dalam bukunya edisi 1, “Tujuan umum mencakup hal-hal yang dapat mendorong integrasi antara sektor-sektor terkait, sedangkan tujuan khusus mencakup aspek-aspek strategis pengembangan kerangka dan jenjang kualifikasi tersebut” (2010: 9). Tujuan umum dan tujuan khusus dari KKNi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan Umum dari KKNi adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan sumberdaya manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing internasional.
- 2) Mendorong peningkatan mutu dan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional.
- 3) Membangun proses pengakuan yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja yang diakui oleh dunia kerja secara nasional dan/atau internasional
- 4) Meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

- 5) Mendorong perpindahan pelajar, mahasiswa, dan tenaga kerja antara negara berbasis kesetaraan kualifikasi.

Tujuan Khusus dari KKNi adalah sebagai berikut:

- 1) Memperoleh korelasi positif antara mutu luaran, capaian pembelajaran dan proses pendidikan di perguruan tinggi.
- 2) Mendorong penyesuaian capaian pembelajaran dan penyetaraan mutu lulusan pendidikan tinggi pada tingkat kualifikasi yang sama
- 3) Menjadi pedoman pokok bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan mekanisme pengakuan terhadap hasil pembelajaran lampau (*recognition of prior learning*) atau kekayaan pengalaman yang dimiliki seseorang.
- 4) Menjadi jembatan saling pengertian antara perguruan tinggi dan pengguna lulusan sehingga secara berkelanjutan membangun kapasitas dan meningkatkan daya saing bangsa terutama dalam sektor sumberdaya manusia.
- 5) Memberi panduan bagi pengguna lulusan untuk melakukan penyesuaian kemampuan atau kualifikasi dalam mengembangkan program-program belajar sepanjang hayat (*life long learning programs*).
- 6) Menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional.
- 7) Memperoleh pengakuan negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia.
- 8) Memfasilitasi pengembangan mekanisme mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas dan kerjasama pendidikan tinggi antar negara di dunia.

c. Persyaratan dan Kualifikasi yang Dituntut oleh Industri atau Perusahaan

Menurut Randall S. Schuller dan Sussan E. Jackson (1997), “Kategori utama perusahaan dalam memilih karyawan yang akan bekerja pada perusahaan adalah:

- 1) Pengetahuan, keterampilan dan kemampuan
- 2) Kepribadian, mitra dan kesuksesan” (hlm. 287)

Peralatan bantu yang dapat digunakan untuk menilai pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengalaman dan kepribadian pelamar adalah dengan cara mengadakan tes-tes penerimaan. Menurut Handoko (1995) jenis tes penerimaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan karyawan yang memenuhi syarat untuk bekerja pada perusahaan meliputi tes psikologis, tes pengetahuan dan *performance test*”.

1) Tes psikologi (*psychological test*)

Tes psikologi adalah berbagai peralatan tes yang mengukur atau menguji kepribadian atau tempramen, bakat, minat, kecerdasan dan keinginan berprestasi. Bentuk tes ini mencakup:

a) Tes kecerdasan

Tes kecerdasan dilakukan untuk menguji kemampuan mental pelamar dalam hal daya pikir secara menyeluruh dan logis.

b) Tes kepribadian

Hasil dari tes kepribadian akan mencerminkan kesediaan bekerja sama, sifat kepemimpinan dan unsur-unsur kepribadian yang lain.

c) Tes bakat

Tes bakat dilakukan untuk mengukur kemampuan potensial yang dapat dikembangkan.

d) Tes minat

Tes minat dilakukan untuk mengukur antusiasisme pelamar terhadap suatu jenis pekerjaan.

e) Tes prestasi

Tes prestasi dilakukan untuk mengukur kemampuan para pelamar selama ia mengikuti kegiatan pendidikan di bangku sekolah.

2) Tes Pengetahuan (*Knowledge Test*)

Tes pengetahuan dilakukan untuk menguji informasi atau pengetahuan yang dimiliki para pelamar. Pengetahuan yang diujikan harus sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan.

3) *Performance test*

Yaitu bentuk tes yang mengukur kemampuan para pelajar untuk melaksanakan beberapa bagian pekerjaan yang akan dipegangnya. Sebagai contoh tes mengetik untuk calon pengetik (hlm. 89)

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa persyaratan-persyaratan yang di tuntut oleh perusahaan atau instansi adalah

1) Persyaratan umum

Persyaratan umum adalah persyaratan yang digunakan secara umum untuk setiap calon tenaga kerja. Persyaratan umum itu antara lain: usia, jenis kelamin dan status.

2) Persyaratan khusus

Persyaratan khusus antara lain meliputi: Kemampuan, keahlian, pengalaman, kepribadian, serta minat dan kesukaan.

Menurut Robert Katz dalam bukunya Stephen P. Robbins keahlian mencakup tiga hal yaitu:

- (a) *Human Skill* (kemampuan manusiawi) adalah kemampuan seseorang untuk bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain baik perorangan maupun kelompok.
- (b) *Technical Skill* (kemampuan teknis) adalah kemampuan seseorang menerapkan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan bidangnya.
- (c) *Conceptional Skill* (kemampuan konseptual) adalah kemampuan mental untuk menganalisis situasi yang rumit (2002: 7).

Sehingga dari pemaparan di atas seorang calon tenaga kerja yang memiliki bekal keahlian, yaitu *human skill*, *technical skill*, dan *conceptional skill*, mereka akan mempunyai kemampuan bekerja sama dengan orang lain, mampu menerapkan pengetahuan yang didapatnya dari sekolah ke dalam

tugas yang dibebankan kepadanya. Dan apabila mereka menghadapi situasi yang rumit maka mereka akan berusaha memecahkannya tanpa kenal menyerah dengan pengetahuan yang ada padanya dan kemampuan mental yang dimilikinya.

5. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan penelaahan dari hasil yang terdahulu yang diperlukan untuk mempertajam penelitian yang akan di lakukan.

a. **Wahyu Adi. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2005. Penerapan Model Pendidikan Sistem Ganda Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Keterampilan Lulusan Pada SMK Negeri 2 Surakarta.** Hasil penelitian dari Wahyu Adi menyimpulkan bahwa, dari hasil sajian data dapat di simpulkan sebagai berikut:

- a) Proses pelaksanaan model pendidikan sistem ganda di SMK Negeri 2 Surakarta sebagai upaya peningkatan mutu keterampilan lulusan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (a) proses penyusunan program pendidikan dan latihan, (b) pola sinkronisasi pendidikan dan latihan, (c) Praktik kerja industri, (d) Pembimbingan siswa praktik, (e) Pengisian jurnal kegiatan , (f) Monitoring dan evaluasi kerja praktik dan (g) Pengujian dan sertifikasi.
- b) Penerapan pendekatan pembelajaran di SMK Negeri 2 Surakarta berbasisi kompetensi (*competency based learning*), berbasis produksi (*production based learning*), pembelajaran tuntas (*mastery learning*), belajar penemuan (*discovery-inquiry*) dan kolaboratif (*cooperative and collaboration learning*).
- c) Faktor yang menghambat penerapan model PSG di SMK Negeri 2 Surakarta dalam upaya meningkatkan mutu keterampilan lulusan: (a) belum dimiliki persepsi yang sama antara sekolah dengan industri pasangannya dalam penyusunan program pendidikan dan pelatihan, (b)

Hasil penelitian siswa selama praktik kerja di industri belum dilakukan konversi kedalam mata diklat terkait, (c) Penelitian siswa praktik kerja baru sebatas pada prestasi selama bekerja langsung di industri dengan menggunakan format penelitian dari sekolah.

- d) Indikator yang dijadikan kriteria peningkatan mutu keterampilan tamatan dari penyelenggaraan model PSG, yaitu: (a) Penguasaan keahlian yang tertera sebagaimana dalam kesepakatan bersama serta penilaian prestasi kerja siswa oleh industri berdasar acuan patokan, (b) Pengakuan keahlian oleh industri belum dianggap cukup, sehingga setelah praktik industri siswa dilibatkan dalam uji, (c) banyak industri mempersyaratkan kepada calon peserta praktik melalui proses seleksi dan (d) Suatu keterampilan dan penguasaan keahlian akan lebih sempurna jika ditempuh lewat pengalaman kerja melalui PSG.

- b. **Wahyu Nurharjanto, FISIP Universitas Sebelas Maret, 2008. Dalam penelitiannya yang berjudul *Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Ganda di Sekolah Kejuruan*.** Penelitian ini berawal dari masalah bagaimana pelaksanaan PSG serta hambatan apa yang ditemukan dalam pelaksanaan PSG. Sehingga hasil dari penelitian ini, yaitu:

Dengan mengacu pada konsep implementasi dari Ripley dan Franklin (1986) maka dapat dikatakan bahwa dari sisi kepatuhan, proses pelaksanaan program Pendidikan Sistem Ganda di SMK Negeri 2 Klaten telah dilaksanakan sesuai dengan standar aturan yang ada yaitu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya. Tidak adanya keluhan yang muncul baik sasaran kebijakan menunjukkan bahwa semua proses pelaksanaan sangat berlangsung dengan baik.

- c. Jenna Petrosky. 2006. *The German Dual Educational System: Evolving Needs For a Skilled Workforce.*

<http://www.lehigh.edu/~incntr/publications/perspectives/v14/petrosky.pdf>

The success of the German dual educational system has understandably attracted much attention from many other industrial nations. Many have spoken of installing such a system in the United States, though several obstacles are often cited. For example, businesses in the United States cannot concentrate on long-term goals as easily as in Germany because U.S. companies must compete for stockholder investments. In Germany much funding comes from banks. Secondly, Germany has a more powerful union movement than the United States, with 46 percent of the German workforce represented by labor unions. In the U.S., workforce unionization varies significantly by state, ranging from 3.8 percent in South Carolina to 28.9 percent in New York. ("Labor Base pp. 2-3) Finally, many believe that apprentice programs similar to Germany's dual system would not work because of a difference in employer attitudes in the two countries. More specifically, it is believed that German executives, unlike those in the United States, have a greater sense of civic responsibility that extends beyond the desire to maximize profits. (Clark, p. 917) In reality, it is unlikely that an exact replica of the German dual system could be installed anywhere outside of Germany. Regardless, other countries could improve the quality of their labor by examining this highly successful system.

Meanwhile, the system faces several challenges within its own borders. The unfolding of the European Union will undoubtedly test and influence the dual educational system. The evolution of the concept of agility, while reinforcing the necessity of a skilled workforce, increases the requirements of the current educational structure. Nonetheless, it is highly unlikely that the dual educational system as it is known today will diminish in importance. While the immediate future may lead to some changes, Germany will fight to

keep its system intact. As Wolfgang Zapf explains, "There is much tradition in the apprenticeship system. The government will not easily turn away from these programs." Given the success of the system as measured by international product standards, German companies will not allow the government to lose sight of the apprenticeship system either.

Jadi dari kedua jurnal penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, persamaan yang terdapat dalam jurnal penelitian dengan yang akan diteliti disini adalah sama-sama meneliti bagaimana pelaksanaan PSG serta hambatan dan cara menanggulangi hambatan tersebut. Namun dalam penelitian ini juga terdapat perbedaan yang ada dalam jurnal tersebut adalah perbedaan yang ada pada jurnal wahyu adi yaitu disini lebih meneliti model yang dilaksanakan dalam PSG serta disini juga lebih membahas kurikulumnya dan perbedaan yang terdapat dalam jurnal wahyu nurhardjanto hanya membedakan kalo penelitian nurhardjanto evaluasi implementasi program PSG, sedangkan dalam penelitian saya lebih kepada menganalisis bagaimana penyelenggaraan program PSG apakah hambatan yang dialami dan bagaimana cara menanggulangi serta untuk mengetahui sejauh mana PSG mampu meningkatkan siswa dalam memasuki dunia kerja. Menurut Jenna Petrosky dengan adanya PSG dapat memperkuat tenaga kerja yang terampil, meningkatkan persyaratan arus pendidikan terstruktur serta dapat meningkatkan kualitas siswa dalam memasuki dunia kerja.

B. Kerangka Berpikir

Saat ini dunia kerja dan masyarakat selalu menuntut agar dunia pendidikan dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional dibidangnya. Oleh karena itu SMK sebagai sarana pendidikan yang selalu dicari oleh orang-orang yang ingin cepat kerja berupaya sebaik mungkin agar berbagai tuntutan dari dunia kerja dan masyarakat dapat terealisasi, siswa didiknya memiliki kesiapan untuk

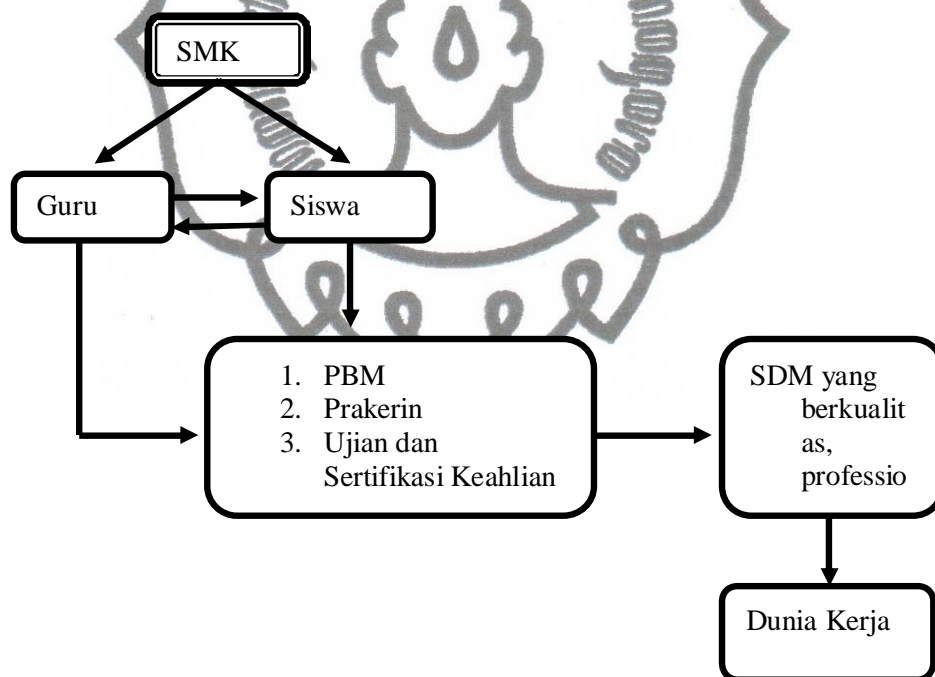
berkompetisi di dunia kerja dan para tamatan mempunyai bekal pengetahuan, keahlian, pengalaman dan mental yang tinggi.

Usaha untuk mempersiapkan siswa SMK dalam berkompetisi di dunia kerja antara lain melalui proses belajar-mengajar di kelas dimana interaksi belajar-mengajar baik itu secara langsung maupun tidak langsung terjadi antara guru dan siswa. Kemudian untuk lebih mematangkan siswa agar nantinya memiliki keahlian yang siap untuk diterjunkan di dunia kerja maka SMK bekerja sama dengan dunia usaha dan industri untuk melakukan program PSG yaitu dilaksanakannya Prekerin. Selain itu pihak SMK juga mengadakan pengujian dan sertifikasi keahlian untuk mengetahui apakah siswa telah siap atau belum untuk memasuki dunia kerja. Dalam usahanya untuk membentuk kualitas tamatan yang siap pakai dan mempunyai keahlian yang profesional, pihak SMK harus menyesuaikan penyiapan berdasarkan tuntutan di dunia kerja saat ini. Begitu juga dengan pemerintah harus melakukan penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan jaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Proses belajar-mengajar di kelas dilaksanakan dengan sebaik mungkin oleh SMK sebagai usaha untuk mengarahkan anak didiknya supaya memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai atau sikap yang dapat membawa perubahan tingkah laku pada diri siswa. Sebagaimana yang telah tertera dalam GBPP Depdiknas Tahun 2004 tentang tujuan SMK, yang salah satunya adalah menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah. Kemudian salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkannya adalah dengan mencanangkan program PSG. Realisasi dari program ini adalah diselenggarakannya praktik kerja dan industri (parkerin). Dengan adanya parkerin, siswa tidak hanya dihadapkan pada proses belajar-mengajar di kelas saja, tetapi siswa langsung diterjunkan di lapangan kerja yang sebenarnya, yaitu di institusi yang telah ditunjuk oleh sekolah. Dari sini dapat diketahui sejauhmana tingkat pemahaman siswa terhadap pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka dapat di sekolah.

Parkerin memiliki peran yang sangat penting bagi siswa SMK karena kegiatan ini sangat membantu untuk membentuk siswa menjadi sumber daya yang siap pakai, berkualitas dan profesional. Kemudian untuk memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap keahlian yang diperoleh melalui proses belajar-mengajar di kelas maupun dari pengalaman belajar di dunia usaha/industri, diadakanlah ujian dan sertifikasi keahlian yang mengacu pada standar keahlian yang berlaku dan diakui di lapangan pekerjaan.

Secara sistematis kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu penelitian

1. Tempat penelitian

Penentuan tempat atau lokasi penelitian berkaitan erat dengan adanya data atau informasi yang bisa diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diketengahkan dalam penelitian. Untuk melaksanakan penelitian ini peneliti mengambil tempat di SMK Pancasila 5 Wonogiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Di SMK Pancasila 5 Wonogiri tersedia data untuk penelitian tentang pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda dalam mempersiapkan siswa SMK memasuki dunia kerja.
- b. Di SMK Pancasila 5 Wonogiri terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program Pendidikan Sistem Ganda.
- c. SMK Pancasila 5 Wonogiri merupakan SMK dalam bidang Bisnis dan Manajemen yang telah melaksanakan Prakerin sebagai pelaksanaan Program Pendidikan Sistem Ganda.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak disetujuinya proposal penelitian sampai dengan terselesaikannya laporan penelitian ini selama 6 (enam) bulan yakni dari bulan Januari 2012 hingga bulan Juni 2012, (jadwal terlampir).

B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menentukan, menggambarkan, dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam menyelesaikan masalah tersebut diperlukan adanya suatu pendekatan. Pendekatan penelitian ilmiah, dibedakan menjadi tiga macam: yaitu kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif.

Sesuai dengan judul penelitian dan jenis data yang dikumpulkan mengenai program PSG dalam mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Iskandar (2008), “Pengertian kualitatif adalah penelitian yang berpegang kepada paradigma naturalistik atau fenomenologi”. (hlm. 187). Sedangkan Moleong (2006) berpendapat bahwa:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (hlm. 6)

Selain itu, menurut David William (1995) menyatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.” (Moleong, 2006: 5)

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian dimana seorang peneliti memperoleh data dari latar belakang alamiah (*natural setting*) yang berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang ada atau lisan dari orang-orang atau perilaku orang yang menjadi objek penelitian. Peneliti dalam penelitian kualitatif harus mampu menetapkan fokus penelitian, memilih informan yang mampu memberikan informasi tentang masalah yang diteliti, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menyajikan data, melakukan verifikasi dan membuat kesimpulan atas temuan di lapangan sebagai jawaban dari masalah yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi penelitian deskriptif dengan pendekatan tunggal terpancang. Tunggal artinya penelitian ini hanya fokus pada satu masalah yaitu pelaksanaan program Pendidikan Sistem Ganda dalam mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja. Terpancang artinya peneliti terjun ke lapangan sudah memiliki bekal berupa asumsi-asumsi atau teori yang sudah ada. Hal ini tercermin dalam pembuatan proposal penelitian sebelum peneliti terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data.

C. Data dan Sumber Data

Data tidak akan diperoleh tanpa adanya sumber data. Walaupun suatu penelitiannya menarik, namun sumber datanya tidak tersedia, maka tidak akan punya arti karena tidak akan bisa diteliti dan dipahami. Menurut Sutopo (2006), “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa dan tingkah laku, dokumen dan arsip serta berbagai benda lain. Informan adalah orang yang dipandang mengetahui permasalahan yang dikaji dalam penelitian dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti” (hal. 57).

Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Narasumber (*Informant*)

Informan adalah orang yang dipandang mengetahui permasalahan peneliti dan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti. Informan yang diharapkan dapat memberikan data-data dan informasi tentang permasalahan penelitian antara lain:

- a. Kepala sekolah
- b. Guru
- c. Siswa
- d. Institusi Pasangan (IP) tempat siswa melaksanakan prakerin

Sebagai informan kunci adalah Kepala Sekolah dan IP, kemudian informan akan berkembang sesuai dengan kebutuhan yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Tempat dan Peristiwa

Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan permasalahan juga merupakan salah satu jenis sumberdaya yang digunakan oleh peneliti. Sutopo menyatakan bahwa “Dari pemahaman lokasi dan lingkungannya peneliti dapat secara cermat mencoba mengkaji dan secara kritis menarik kemungkinan simpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitiannya” (2006: 60). Data dan informasi juga dapat diperoleh dari peristiwa, aktivitas, atau perilaku

sebagai sumber data yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Dari peristiwa atau aktivitas dapat diketahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyesuaikan sendiri secara langsung. Tidak semua peristiwa dapat diamati secara langsung, kecuali peristiwa atau aktivitas yang sedang berlangsung ketika penelitian dilakukan. Dalam hal ini, kajian peristiwa didapatkan dari cerita informan atau dokumen yang ada.

Adapun tempat dan peristiwa menjadi sumber data karena dalam pengamatan harus sesuai dengan konteks dan situasi sosial yang melibatkan tempat, pelaku dan peristiwa. Tempat dan peristiwa yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini adalah peristiwa di SMK Pancasila 5 Wonogiri dan di IP tempat siswa melaksanakan prakerin.

3. Dokumen dan Arsip

Dokumen merupakan bahan tertulis/benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dalam mengkaji dokumen sebaiknya tidak hanya mencatat apa yang tertulis, tetapi juga berusaha menggali dan menangkap makna dari dokumen tersebut

Dalam penelitian ini dokumen dan arsip yang digunakan meliputi segala bentuk dokumen dan arsip yang berkaitan dengan permasalahan. Dokumen dan arsip dimanfaatkan sebagai sumber data dalam penelitian, karena dokumen dan arsip dapat menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa rekaman hasil wawancara, data siswa peserta prakerin beserta penempatannya, daftar nilai PBM, prakerin serta uji kompetensi, daftar inventaris sekolah, foto-foto, data guru dan karyawan SMK Pancasila 5 Wonogiri serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

D. Teknik Sampling (Cuplikan)

Teknik sampling digunakan untuk menyelesaikan dan memfokuskan permasalahan agar pemilihan sampel lebih mengarah pada tujuan penelitian. Menurut

Sutopo (2002) menyatakan bahwa “Teknik cuplikan merupakan suatu bentuk khusus atau proses sebagai pemusatan atau pemilihan dalam penelitian yang mengarah pada seleksi.”(hlm. 55). Teknik sampling pada penelitian kualitatif digunakan untuk menyeleksi dan memfokuskan permasalahan agar dalam melaksanakan penelitian atau dalam memilih sampel lebih terarah dan tepat pada orang yang mengetahui permasalahan.

Pengambilan sampel data penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampel yang bertujuan, yaitu peneliti tidak menentukan sejumlah sampel, tetapi peneliti menentukan informan untuk diwawancarai guna memperoleh informasi tentang permasalahan yang diteliti. Moleong (2006) menyatakan bahwa “Maksud sampling dalam hal ini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (*constructions*)” (hlm. 224). Dengan demikian, tujuan dari teknik sampling bukan memusatkan pada adanya perbedaan – perbedaan yang nantinya dikembangkan dalam generalisasi.

Dalam menggali informasi dari informan, peneliti menggunakan teknik bola salju (*snowball sampling*). Yin (1987) menyatakan bahwa:

Snowball sampling merupakan penggunaan sampling tanpa persiapan tetapi mengambil orang pertama yang dijumpai dan selanjutnya dengan mengikuti petunjuknya untuk mendapatkan informan berikutnya sehingga mendapatkan data lengkap dan mendalam, ibarat bola salju yang menggelinding, semakin jauh semakin besar. (Sutopo,2002: 37)

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh data yang mendalam diperlukan informan yang dianggap menguasai masalah yang diteliti. Setelah keterangan dari informan dirasa cukup, informan tersebut akan diminta menunjukkan subjek lain yang dianggap mengetahui permasalahan ini lebih luas, sehingga diperoleh data yang mendalam dan benar-benar mendukung tercapainya tujuan penelitian. Dengan demikian jumlah sampel akan semakin besar seperti bola salju.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara khusus yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian. Data merupakan suatu hal yang sangat mendasar dan nantinya akan menentukan apakah penelitian tersebut dikatakan berhasil atau tidak. Menurut Iskandar pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yang lebih banyak digunakan yakni observasi berpartisipasi (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (2009: 137). Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Wawancara

Menurut Moleong (2006), "Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan itu" (hlm. 135). Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, "Wawancara adalah sebuah dialog lisan yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*)" (2006: 155).

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interviewing*) karena peneliti merasa tidak tahu mengenai apa yang terjadi sebenarnya dan ingin menggali informasinya secara mendalam dan lengkap. Dengan demikian wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan dengan tidak secara formal terstruktur guna menggali pandangan informasi yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya dilakukan kepada kepala sekolah, guru, siswa dan instansi pasangan tempat siswa melaksanakan prakerin. Pada teknik ini peneliti menggunakan panduan wawancara (*interview guide*) sebagai alat pendukung, sehingga wawancara berjalan dengan baik.

2. Observasi

Menurut Iskandar, Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan, pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan” (2009: 121). Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Sutopo (2006) yang menyatakan “Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, benda, serta rekaman gambar” (hlm. 75). Berdasarkan pendapat tokoh di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang sedang diamati. Dengan observasi kita dapat mengumpulkan informasi dan data yang berhubungan dengan ruang/tempat, pelaku, obyek, perbuatan, kejadian/peristiwa, waktu dan perasaan.

Melalui teknik ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada tempat dan objek yang diamati yaitu SMK Pancasila 5 Wonogiri dengan berperan secara pasif. Peneliti mengamati, memahami dan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan obyek penelitian yang meliputi berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi. Untuk mendapatkan data yang valid, pengamatan dilakukan beberapa kali di tempat yang sama.

3. Analisis Dokumen

Selain menggunakan observasi dan wawancara, pengumpulan data juga dilakukan dengan cara mencatat arsip atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada ditempat penelitian ataupun yang berada diluar penelitian, yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian. Sebagaimana yang disimpulkan oleh Suharsimi Arikunto (2006), “Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti

menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya” (hlm. 158).

Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data dan menganalisis dokumen dan arsip serta benda-benda lainnya yang terdapat pada obyek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang kesiapan siswa dalam berkompetisi di dunia kerja.

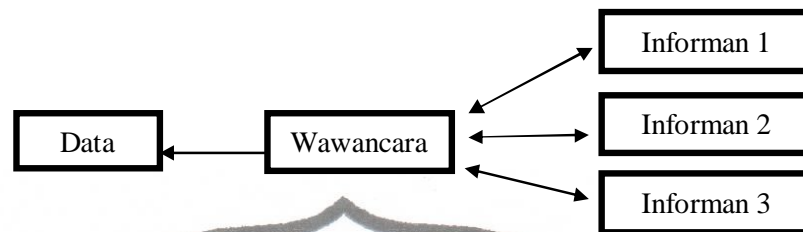
F. Uji Validitas Data

Dalam penelitian, untuk mendapatkan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan data yang didasarkan atas jumlah tertentu. Sutopo mengemukakan “Validitas data merupakan jaminan bagi kemantapan kesimpulan dan tarif makna sebagai hasil penelitian” (2006: 92). Penelitian ini menggunakan trianggulasi untuk menjamin validitas data.

Trianggulasi merupakan cara yang paling umum digunakan untuk memperoleh tingkat kepercayaan data. Menurut Moleong (2000) “Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut” (hlm. 178). Patton (1984) seperti yang dikutip oleh Sutopo dalam trianggulasi membedakan empat macam teknik trianggulasi sebagai cara untuk meningkatkan validitas data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Trianggulasi data (sumber)

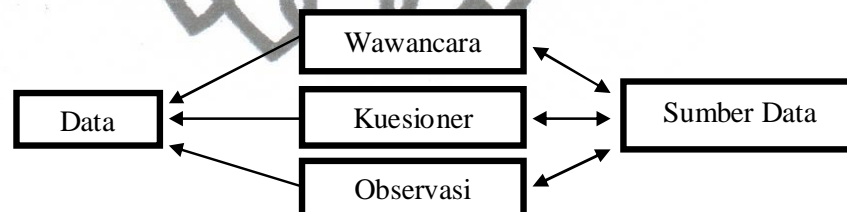
Cara ini mengarahkan penliti agar dalam mengupulkan data, peneliti wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari berbagai sumber data yang berbeda. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu, bisa lebih teruji kebenarannya bilamana dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda, baik kelompok sumber yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Teknik Trianggulasi Data/sumber
(Sutopo, 2006: 94)

2. Trianggulasi Metode

Trianggulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data sejenis tapi dengan metode atau teknik pengumpulan data yang berbeda, dalam teknik ini ditekankan pada penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda dan diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji kemantapan informasinya. Dengan menggunakan metode yang berbeda untuk suatu informasi yang sama, peneliti dapat menarik kesimpulan atas data yang digali secara lebih mantap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

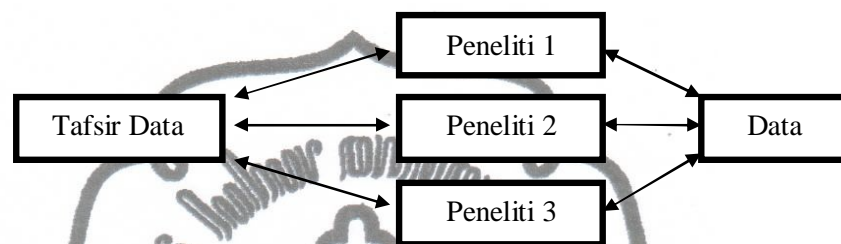


Gambar 3. Teknik Trianggulasi Metode
(Sutopo, 2006: 94)

3. Trianggulasi Peneliti

Trianggulasi peneliti adalah hasil penelitian baik data ataupun kesimpulan mengenai bagian tertentu ataupun keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti. Melalui cara ini diharapkan bisa terjadi pertemuan pendapat yang dapat memantapkan hasil penelitian. Dari pandangan dan tafsiran yang validitasnya dari beberapa peneliti. Dari pandangan dan tafsir yang dilakukan oleh beberapa

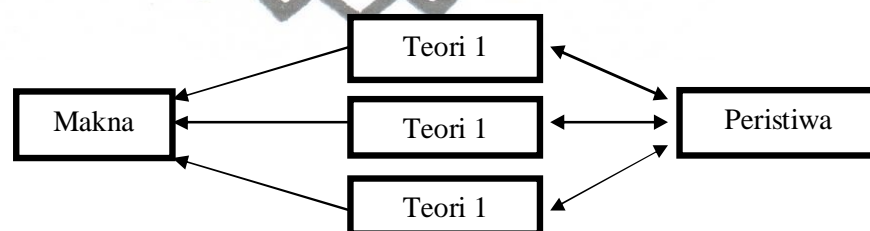
peneliti terhadap semua informasi yang berhasil digali dan dikumpulkan berupa catatan, diharapkan bisa terjadi pertemuan pendapat yang pada akhirnya bisa lebih memantapkan hasil penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4. Teknik Trianggulasi Peneliti
(Sutopo, 2006: 98)

4. Trianggulasi Teori

Yaitu dilakukan dengan menggunakan perspektif dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Dari beberapa perspektif yang digunakan, dapat diperoleh pandangan yang lebih lengkap, tidak hanya sepihak sehingga bisa dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh (2006: 94-99). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 5. Teknik Trianggulasi Teori
(Sutopo, 2006: 99)

Jenis triangulasi yang digunakan untuk mencapai validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Dalam triangulasi sumber, peneliti menggunakan beberapa narasumber yang berbeda untuk mengumpulkan data atau informasi sejenis, sehingga informasi yang diperoleh dari narasumber satu dapat dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari narasumber lainnya. Dalam

triangulasi metode, data hasil wawancara dilakukan uji keabsahan dengan sumber data hasil pengamatan atau juga dengan data dokumentasi sehingga diharapkan mutu dari keseluruhan proses pengumpulan data dalam penelitian ini menjadi valid atau absah.

G. Analisis Data

Analisis data biasanya dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data sampai diperoleh suatu kesimpulan. Menurut Moleong (2000) “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema, dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data” (hlm. 103).

Model interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses kerja ketiga komponen tersebut merupakan alur yang saling terkait satu sama lain. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sutopo, ” Masalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis secara berurutan dan saling susul menyusul” (2006: 107).

1. Pengumpulan Data.

Proses analisis data dimulai dengan pengumpulan data. Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu wawancara, observasi dan analisis dokumen. Pengumpulan data dilakukan selama data belum memadai dan akan dihentikan apabila data telah memadai untuk dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (*field note*). Reduksi data sudah dimulai sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, tentang

pemilihan kasus, pertanyaan yang diajukan dan tentang cara pengumpulan data yang dipakai. Pada suatu pengumpulan data berlangsung dan merupakan bagian dari analisis.

3. Penyajian Data.

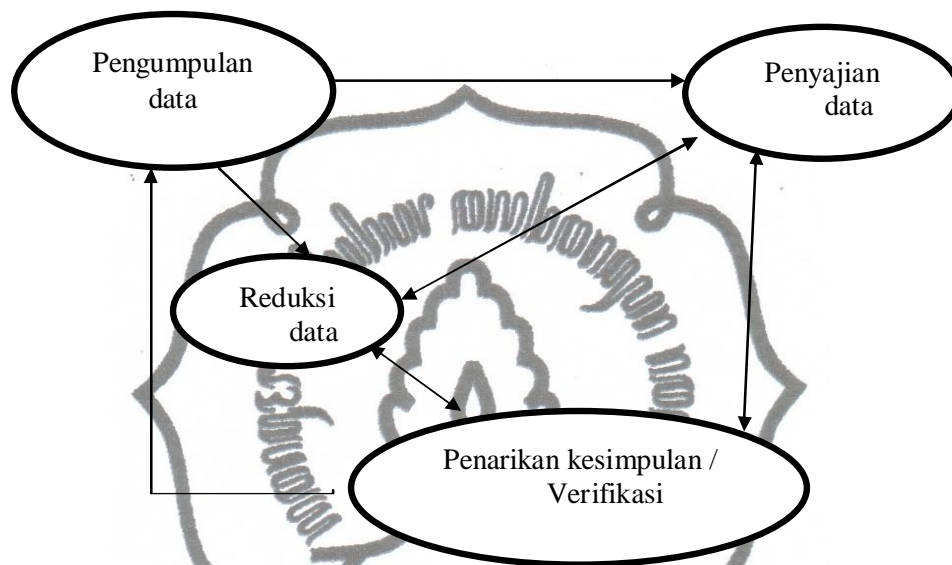
Proses selanjutnya adalah penyajian data, yaitu mengorganisir informasi secara sistematis untuk mempermudah dalam menggabungkan dan merangkai keterikatan antar data dalam menyusun penggambaran proses dan fenomena yang ada pada obyek penelitian. Dengan data yang tersaji akhirnya peneliti akan dapat menginterpretasikan fenomena yang ada dan membandingkan fenomena tersebut dengan teori yang relevan.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Merupakan proses konklusi-konklusi yang terjadi selama pengumpulan data dari awal sampai proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang perlu diverifikasi yang dapat berupa suatu pengulangan yang meluncur cepat, sebagai pemikiran kedua yang timbul melintas dalam peneliti. Pada waktu menulis dengan melihat kembali sebentar pada *field note*. Kesimpulan yang diambil mula-mula masih belum jelas dan masih bersifat sementara, tetapi kemudian meningkat sampai pada kesimpulan yang mantap yaitu pernyataan yang telah memiliki landasan yang kuat.

Dalam penelitian ini, kegiatan, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan bekerja secara siklus. Artinya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang saling terjalin pada sebelumnya, selama dan sesudah pengumpulan data dilapangan. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti berusaha untuk menarik kesimpulan berdasarkan semua hal yang didapat dalam kegiatan reduksi data maupun penyajian data. Apabila kesimpulan tersebut dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan reduksi maupun penyajian data atau mengalamikesulitan dalam penarikan kesimpulannya, maka peneliti kembali melakukan kegiatan pengumpulan data sampai diperoleh data yang dapat dianalisis dan menghasilkan kesimpulan yang mantap.

Untuk lebih jelasnya teknik analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6. Skema Analisis Data Model Interaktif

(Sumber : Sutopo, 2006: 108)

H. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah tata urutan atau langkah-langkah rinci yang harus ditempuh untuk melaksanakan penelitian. Hal ini guna mempermudah penulisan laporan penelitian, perlu ditetapkan prosedur penelitian dimana didalamnya dideskripsikan berbagai langkah-langkah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam penelitian.

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan sebelum penyusunan proposal dan pengurusan ijin penelitian. Pada tahap ini peneliti belum memulai

mengumpulkan data. Kegiatan yang dilakukan meliputi orientasi lapangan untuk pengenalan kondisi obyek penelitian serta untuk mempersiapkan fisik dan mental peneliti. Studi pendahuluan ini penting guna pengenalan dan pembentukan pemahaman awal peneliti terhadap fokus dan obyek penelitian agar ketika peneliti benar-benar terjun kelapangan dapat menentukan cara masuk yang tepat keobyek untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian.

2. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan sebelum peneliti terjun kelapangan seperti penyusunan proposal penelitian termasuk pengurusan izin penelitian dan persiapan pelaksanaan penelitian dilapangan. Persiapan yang dimaksud antara lain meliputi berbagai perlengkapan yang digunakan seperti alat tulis, alat perekam, rancangan biaya, dan pengaturan perjalanan.

3. Tahap Lapangan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pengumpulan data yang diperlukan. Bersamaan dengan proses pengumpulan data tersebut berlangsung pula proses analisis awal.

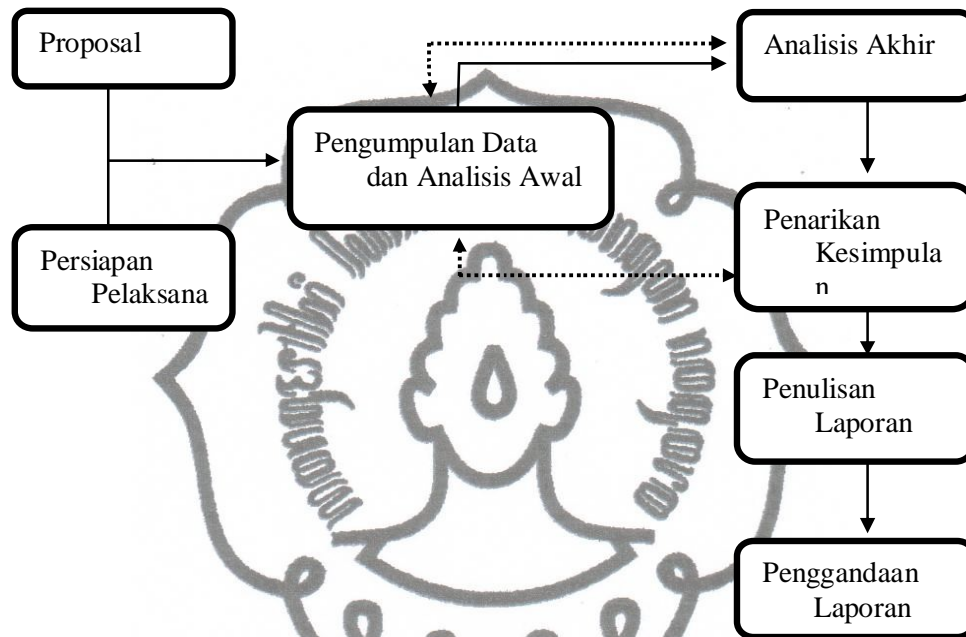
4. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini membaca, menelaah, menafsirkan, mengklasifikasikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh untuk mengambil kesimpulan. Analisis yang dilakukan merupakan analisis akhir dimana peneliti membandingkan data yang diperoleh dilapangan dengan teori yang relevan. Selanjutnya, berdasarkan analisis tadi dilakukan penarikan kesimpulan.

5. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian

Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian yang hasilnya berupa laporan penelitian berikutnya penggadaannya.

Secara singkat prosedur dalam penelitian dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 7. Skema Prosedur Penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan Pancasila 5 Wonogiri

SMK Pancasila 5 Wonogiri adalah Sekolah Kejuruan swasta tertua di Kabupaten Wonogiri, berdiri sejak 1 Januari 1969 SK pendirian no. 00/06/77/030, tanggal 03 Maret 1977. Pertamanya diberi nama SMEA Marhens kemudian pada tahun 1971 mengalami perubahan nama menjadi SMEA Nusantara. Sesuai dengan keputusan pemerintah pada tahun 2004 mengalami perubahan dari nama SMEA menjadi SMK, sehingga pada tahun tersebut juga berubah nama dari SMEA Nusantara menjadi SMK Pancasila 5 Wonogiri, dan pada saat ini SMK Pancasila 5 Wonogiri sudah berusia 42 tahun.

SMK Pancasila 5 Wonogiri bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Pancasila (YPP) Pusat Surakarta Cabang Wonogiri, Terakreditasi B (baik) dan merupakan Sekolah Berstandar Nasional/SSN. Diasuh berbagai disiplin ilmu dan didukung oleh 12 orang tenaga administrasi yang profesional. SMK Pancasila 5 Wonogiri pertama kali dikepalai oleh Bpk. Koesnioto, B.A pada tahun 1969 sampai tahun 1974, kemudian di gantikan oleh Bpk. Slamet Sutrisno, B.Sc dari tahun 1975-1980, pada tahun 1981-2002 digantikan oleh Bpk. Ts. Sumardjono, SH, kemudian digantikan lagi dan dikepalai oleh Bpk. Sutarno, M.Pd yang mengangkat dari YPP nomor SK 557/YPP.Cab/SK/Wng/VIII/2002, tertanggal 1 Agustus 2002 sampai dengan sekarang.

Sesuai dengan era globalisasi dan tanggapan akan prospek dan arah pembangunan, serta dalam rangka membantu pemerintah dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia maka SMK Pancasila 5 Wonogiri sebagai sekolah Menengah Kejuruan yang bertujuan mendidik dan mempersiapkan para siswa

sehingga setelah lulus memiliki kompetensi yang handal serta mampu berkompetisi di Era Globalisasi.

SMK Pancasila 5 Wonogiri sudah memiliki 3 (tiga) program keahlian, yaitu Akuntansi, Sekretaris (Administrasi Perkantoran) dan Manajemen Bisnis. SMK Pancasila 5 Wonogiri terus melakukan terobosan untuk meningkatkan mutu atau kualitas dan juga kuantitas siswanya. Hal tersebut ditujukan untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan lulusan atau out put dari SMK Pancasila 5 Wonogiri yang mampu bersaing di dunia kerja dengan kompetisi yang ketat, sadar akan hal tersebut maka mulai Tahun Diklat 2004/2005 SMK Pancasila 5 Wonogiri membuka Bidang Keahlian Baru, yaitu: Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sehingga sejak tahun ajaran 2004/2005 sampai sekarang ini SMK Pancasila 5 Wonogiri memiliki 4 (empat) program keahlian, yaitu Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Manajemen Bisnis, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2. Letak Geografis

Letak SMK Pancasila 5 Wonogiri sangat strategis karena terletak di Wonogiri kota pinggir jalan raya dan mudah dijangkau dari segala penjuru kota, karena SMK Pancasila 5 Wonogiri terletak di sebelah jembatan yang menghubungkan dari arah Ngadirojo menuju Wonogiri kota. Alamat lengkap SMK Pancasila 5 Wonogiri adalah Jl. Diponegoro No. 12, Pokoh, Wonoboyo, Wonogiri atau ± 200 meter dari alun-alun Wonogiri ke arah timur.

3. Visi dan Misi dan Tujuan SMK Pancasila 5 Wonogiri

a. Visi

- 1) Menciptakan tenaga kerja tingkat menengah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan Pembangunan Nasional baik saat ini maupun masa yang akan datang sejalan dengan kecenderungan globalisasi.
- 2) Membentuk dan menanamkan Jiwa Patriotisme dan Nasionalisme

b. Misi

- 1) Melaksanakan kebijakan pemerintah dalam rangka usaha menghasilkan tamatan yang berpotensi handal dan bersikap professional serta mampu mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan iptek melalui pelaksanaan Kurikulum SMK, Pendidikan Sistem Ganda, Manajemen transparan, pengembangan pelaksanaan Unit Produksi serta optimalisasi sumber daya yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- 2) Menghasilkan tamatan yang berjiwa Patriotisme dan Nasionalisme dan setia pada Pancasila dan UUD 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Tujuan

Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

1) Tujuan Umum

- a) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.
- c) Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan dan menghargai budaya bangsa Indonesia.
- d) Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup, serta memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien.

2) Tujuan Khusus

- a) Menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sifat profesional.
- b) Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, mampu berkompetisi dan mampu mengembangkan diri.
- c) Menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun yang akan datang.
- d) Menyiapkan peserta didik agar tamatannya menjadi warga negara yang produktif, adaptif dan kreatif.

3) Tujuan Program Keahlian Administrasi Perkantoran

- a) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik;
- b) Mendidik peserta didik agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab;
- c) Mendidik peserta didik agar dapat menerapkan hidup sehat, memiliki wawasan pengetahuan dan seni;
- d) Mendidik peserta didik dengan keahlian dan keterampilan dalam Program Keahlian Sekretaris/Adm. Perkantoran , agar dapat bekerja baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah;
- e) Mendidik peserta didik agar mampu memilih karir, berkompetisi, dan mengembangkan sikap profesional dalam Program Keahlian AP;
- f) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan;

4. Nilai-Nilai Pedoman dalam Bertindak dan Berperilaku

Nilai –nilai yang menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku dalam lingkungan SMK Pancasila 5 Wonogiri adalah sebagai berikut:

a. *Togetherness* (kebersamaan)

Menentukan tujuan bersama ,menganalisis dan menyelesaikan masalah bersama membagikan dan menyelesaikan tugas bersama serta mencapai hasil dan menikmatinya bersama;

b. *Transparence* (keterbukaan)

Adanya keterbukaan dalam pengelolaan Manajemen Sekolah meliputi semua aspek resoursis (sumber daya) yang ada di sekolah;

c. *The Right on The Right Place*

Pelimpahan tugas wewenang dan tanggung jawab kepada warga sekolah sesuai dengan kemampuan masing –masing dan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab ,disiplin ,inovatif,kreatif ,saling percaya dan saling menghargai;

d. *First-rate Service* (pelayanan prima)

Memberikan Pelayanan Prima kepada semua warga sekolah dan stakeholder dengan menerapkan prinsip A3 (attitude,attention dan action);

5. Keadaan Guru, Karyawan dan Siswa di SMK Pancasila 5 Wonogiri

Guru karyawan dan siswa merupakan komponen utama sekolah untuk mencapai visi misi sekolah. Pencapaian visi dan misi sekolah diperlukan interaksi dan kerjasama antar guru, karyawan dan siswa.

a. Guru

Guru merupakan fasilitator bagi siswa untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam penguasaan materi yang akan disampaikan kepada siswa. Guru yang ada di SMK Pancasila 5 Wonogiri berjumlah 45 guru, guru PNS (DPK) berjumlah 9 orang, sedangkan guru tetap yayasan 12 orang.

b. Karyawan

Karyawan Tata Usaha yang ada di SMK Pancasila 5 Wonogiri berjumlah 13 orang, karyawan tetap terdiri dari 9 karyawan .

c. Siswa

Jumlah siswa yang ada di SMK Pancasila 5 Wonogiri tahun diklat 2011/2012 sebanyak 505 siswa yang terdiri dari:

Kelas I : 185 siswa

Kelas II : 183 siswa

Kelas III : 137 siswa

6. Sarana dan Prasarana di SMK Pancasila 5 Wonogiri

Gambaran mengenai gedung dan alat perlengkapan sebagai sarana dan prasarana pendukung SMK Pancasila 5 Wonogiri dalam mewujudkan misi-misinya adalah :

a. Gedung Timur

1) Gedung Lantai 1

- a) Ruang kelas 1 Akuntansi
- b) Ruang kelas 1 Manajemen Bisnis
- c) Ruang praktik mengetik 1 Administrasi Perkantoran
- d) Ruang Bp
- e) Toilet

2) Gedung Lantai 2

- a) Ruang kelas 2 Administrasi Perkantoran
- b) Ruang kelas 1 Manajemen Bisnis
- c) Ruang bengkel komputer Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Gedung Barat

1) Gedung Lantai 1

- a) Ruang Guru
- b) Ruang Tata Usaha

- c) Ruang Kepala Sekolah
- d) Ruang Laboratorium bahasa inggris
- e) Ruang Laboratorium Komputer
- f) Ruang kelas 2 Teknologi Informasi dan Komunikasi
- g) Mushola
- h) Ruang Bp
- i) Ruang Perpustakaan
- j) Toilet
- 2) Gedung Lantai 2
 - a) Ruang kelas 4 Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - b) Ruang kelas 2 Akuntansi
 - c) Ruang kelas 1 Administrasi Perkantoran
 - d) Ruang Osis
 - e) Ruang Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi

7. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekolah adalah orang-orang yang duduk sebagai pelaksana dan penanggung jawab berbagai bidang tertentu dan ikut membantu terlaksananya proses belajar-mengajar yang lancar, tertib dan teratur. Adapun struktur organisasi SMK Pancasila 5 Wonogiri terdiri dari:

a. Kepala Sekolah

Merupakan pejabat sekolah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah serta bertanggung jawab kepada pemerintah kota dan Dinas Pendidikan.

b. Komite Sekolah

Merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekolah dan orang tua siswa untuk membantu terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan secara efektif dan efisien. Keanggotaan komite sekolah terdiri dari dua unsur yaitu

pihak sekolah dan pihak luar sekolah seperti orang tua siswa, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan sebagainya.

c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

Merupakan pejabat sekolah yang mempunyai wewenang menyelenggarakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan di sekolah yang berkaitan dengan KBM serta bertanggung jawab kepada sekolah atas terselenggaranya KBM tersebut.

d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

Merupakan pejabat sekolah yang mempunyai wewenang menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kegiatan kesiswaan dan penanganan ketertiban siswa serta bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam penyelenggaraan bidang kesiswaan.

e. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas

Merupakan pejabat sekolah yang mempunyai wewenang mengendalikan kegiatan promosi, informasi, komunikasi dan kerja sama dengan instansi lain dan *stakeholders* serta bertanggung jawab kepada kepala sekolah atas terwujudnya kerja sama dengan instansi lain dan *stakeholders* tersebut.

f. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana

Merupakan pejabat sekolah yang mempunyai wewenang merencanakan pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya sekolah serta bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam hal pemberdayaan sumber daya sekolah tersebut.

g. Kepala Tata Usaha

Merupakan pejabat sekolah yang mempunyai wewenang mengelola seluruh kegiatan yang berhubungan dengan administrasi dan ketatausahaan serta bertanggung jawab kepada kepala sekolah atas terselenggaranya kegiatan ketatausahaan.

h. Koordinator Perpustakaan

Merupakan pejabat sekolah yang mempunyai wewenang merencanakan dan menyediakan referensi berupa buku-buku yang berkaitan dengan materi sekolah maupun pengetahuan umum dan bertanggung jawab kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum terkaithal tersebut.

i. Ketua Program Keahlian

Merupakan pejabat sekolah yang mempunyai wewenang untuk merencanakan dan melaksanakan seluruh KBM praktek pada program keahlian masing-masing dan mengelola laboratorium sekolah.

j. Koordinator Bimbingan Konseling

Merupakan pejabat sekolah yang mempunyai wewenang merencanakan dan melaksanakan seluruh pelaksanaan Bimbingan Konseling/ Pengembangan Diri di layanan BK serta bertanggung jawab kepada kepala sekolah atas pelaksanaan Bimbingan dan Konseling/ Pengembangan Diri pada program tersebut.

k. Wali Kelas

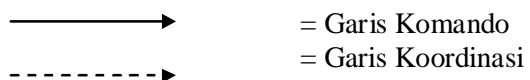
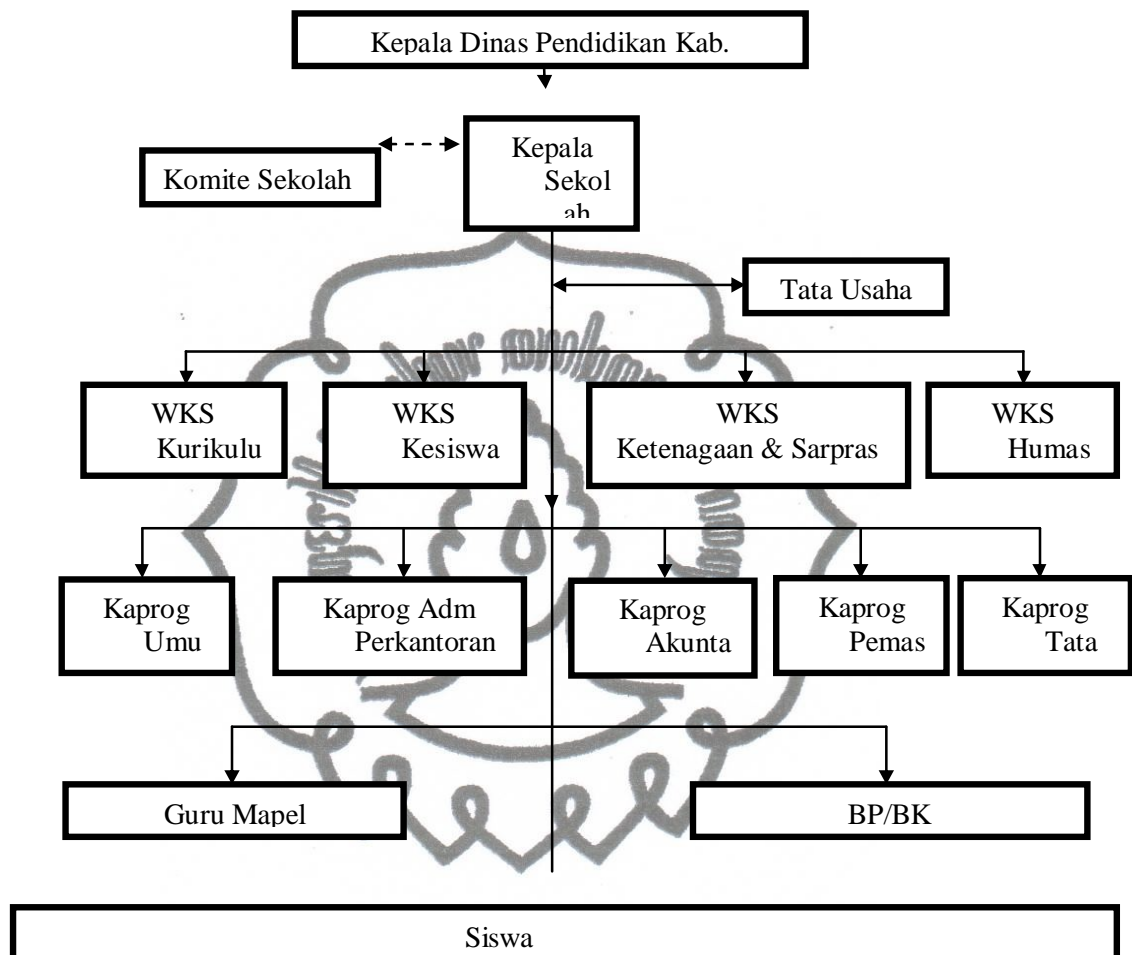
Merupakan pejabat sekolah yang mempunyai wewenang melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendampingan dan monitoring kelas serta bertanggung jawab kepada kepala sekolah atas terlaksananya pendampingan dan monitoring kelas.

l. Guru

Merupakan pejabat sekolah yang mempunyai wewenang melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan tugas mengajar dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah berkenaan dengan kegiatan KBM menurut tingkat yang dianjurkan.

m. Siswa

Merupakan peserta didik yang berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di SMK Negeri 1 Wonogiri serta bertanggung jawab terhadap segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 1 Surakarta



Kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Wakasek yang terdiri dari Wakasek Hubungan Industri dan Humas, Wakasek Keuangan dan Sarana Prasarana, Wakasek Kurikulum dan Wakasek Kesiswaan.

B. Deskripsi Temuan Penelitian

Permasalahan yang peneliti kaji dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan program pendidikan sistem ganda (PSG) dalam mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja. Hambatan yang dialami SMK Pancasila 5 Wonogiri dalam mempersiapkan siswa melaksanakan program PSG agar dapat memasuki dunia kerja dan usaha-usaha dalam mengatasi hambatan tersebut, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Pendidikan Sistem Ganda Dalam Mempersiapkan Siswa Memasuki Dunia Kerja

Pelaksanaan program PSG dalam mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja dicapai melalui Proses Belajar Mengajar di kelas, Praktek kerja dan industri (prakerin), dan uji sertifikasi keahlian. Apabila hal tersebut sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan nilai yang baik, maka dapat dikatakan bahwa para siswa tersebut sudah memiliki bekal yang cukup untuk dapat mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja. Hal tersebut senada dengan informasi dari informan 1 pada wawancara tanggal 02 April 2012 yang menyatakan,

“Untuk mempersiapkan siswa agar mereka memiliki skill dan pengetahuan hingga memiliki kesiapan kerja setelah mereka lulus nanti, kami berusaha untuk mengoptimalkan proses belajar-mengajar di kelas, kemudian menerjunkan siswa ke DUDI dengan program prakerin. Selain itu juga ada uji keahlian, ini untuk memberikan pengakuan kepada siswa atas kompetensi yang dimilikinya”.

Usaha yang telah dilakukan oleh SMK Pancasila 5 Wonogiri tidak lain adalah untuk mencetak siswa yang unggul bersaing di dunia kerja setelah lulus nanti. Dikarenakan saat ini persaingan untuk mendapatkan pekerjaan teramat ketat. Hal ini senada dengan informan 2 pada wawancara tanggal 03 April 2012 yang mengatakan

“Mbak, kalau lowongan pekerjaan untuk staff Administrasi banyak sekali yang melamar, akan tetapi yang diterima adalah yang memiliki

mental yang baik, kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang tinggi”.

Jadi jika para lulusan tidak memiliki mental yang baik, kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang tinggi maka ia akan kesulitan dalam mencari pekerjaan dan dengan keadaan seperti ini biasanya ia hanya akan ditempatkan dibagian produksi tapi apabila mereka mampu mengerjakan tes demi tes maka mereka pasti akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ilmu yang mereka tekuni.

Menghadapi realita seperti itu, maka pihak SMK Pancasila 5 Wonogiri tetap berusaha meningkatkan mutu lulusan dengan adanya program PSG diharapkan agar siswa lulusan SMK Pancasila 5 Wonogiri memiliki mental dan kemampuan yang sesuai dengan standar kualifikasi atau tuntutan dunia kerja. Seperti yang telah dikemukakan oleh informan 3 pada wawancara 04 April 2012 yang mengatakan:

“Mbak yang perlu diketahui oleh setiap lulusan dalam memasuki dunia kerja adalah pertama, nilai mereka harus bagus karena hal ini adalah persyaratan yang pertama kali dilihat. Kedua adalah mereka harus mempunyai kemauan dan semangat kerja yang tinggi, selain itu pengetahuan yang mereka dapat selama sekolah juga harus dikuasai dengan baik. Sehingga dengan adanya PSG siswa akan mendapatkan tambahan pengalaman bekerja, sehingga akan membentuk mental dan kemampuan siswa yang baik”.

Pada wawancara tanggal 02 April 2012, informan 1 menyatakan,

“Keterampilan yang harus dikuasai oleh anak lulusan AP yang terpenting adalah mereka harus bisa mengetik cepat dan mahir dalam mengoperasikan komputer, minimal Ms. Office, memiliki mental yang baik dan cekatan dalam mengerjakan apapun”.

Hal senada diungkapkan oleh informan 2 tanggal, 03 April 2012 yang menyatakan,

“Jurusan AP yang paling penting memiliki ketrampilan yang baik, misalnya trampil dalam menggunakan alat-alat perkantoran dan mampu mengoperasikan Ms. Office dengan baik”.

Berdasarkan informasi dari informan-informan di atas dapat diketahui bahwa yang harus dikuasai oleh setiap lulusan SMK yang nantinya akan bekerja sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sebagai modal untuk dapat berkompetisi di dunia kerja adalah menguasai pengetahuan dibidangnya, memiliki keterampilan di bidangnya, cetakan dalam bekerja, mampu bekerjasama dan terampil berkomunikasi.

Dengan adanya pernyataan di atas maka pihak SMK Pancasila 5 Wonogiri selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lulusan agar nantinya unggul bersaing memasuki dunia kerja. Selain itu juga menanamkan pada siswanya agar selalu dapat mengembangkan dirinya meskipun tidak bekerja pada bidang yang sesuai dengan kompetensinya. Untuk itu sekolah membekali siswa dengan pengetahuan kewirausahaan. Selain diberikannya mata diklat kewirausahaan, siswa juga dibekali dengan pengetahuan kewirausahaan melalui *product selling* (unit produksi). Dengan demikian, setelah siswa lulusan dari bangku SMK, selain bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya diharapkan juga siswa SMK Pancasila 5 Wonogiri dapat mengembangkan dirinya untuk berwirausaha.

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa pelaksanaan program PSG tidak terlepas dengan program kegiatan Proses Belajar Mengajar, program PSG, dan uji sertifikasi. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan program yang saling berkaitan satu sama lain dalam upaya mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti memandang perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu ketiga hal tersebut sebelum masuk pada permasalahan yang peneliti kaji pada penelitian ini.

a. Siswa Dilihat Dari PBM

Proses Belajar-Mengajar (PBM) merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan antara siswa yang belajar dengan guru yang mengajar dan antara kedua kegiatan ini terjadi interaksi yang saling menunjang. Apabila PBM dapat berjalan dengan baik maka siswapun juga akan memperoleh pengetahuan, kemampuan, keterampilan serta mental yang dapat dijadikan bekal dalam memasuki dunia kerja setelah mereka tamat nanti. Hal ini senada dengan informasi dari informan 1 pada wawancara tanggal 02 April 2012 yang menyatakan,

“Agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai, maka PBM juga harus dikelola dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan siswa, baik pengetahuan, kemampuan, keterampilan maupun mental mereka”.

Hal senada diungkapkan oleh informan 3 tanggal, 04 April 2012 yang menyatakan,

“Guru sangat memperhatikan siswanya pada saat PBM berlangsung supaya siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik mbak, sehingga pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan siswa dapat meningkat”.

Dengan adanya informasi tersebut dapat diketahui bahwa PBM yang telah dialami oleh siswa selama ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan mereka yaitu perkembangan pengetahuan, kemampuan, keterampilan serta mental mereka.

Ada beberapa komponen PBM yang kita ketahui, diantaranya adalah Guru dan Siswa. Siswa berlaku sebagai pencari, penerima dan penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan guru adalah seseorang yang sangat berperan dalam proses pencapaian tujuan terutama bagi siswa SMK agar siap dalam memasuki dunia kerja. Seperti yang telah diungkapkan oleh informan 2 pada wawancara 03 April 2012 yaitu,

“Sebelum siswa diterjunkan di dunia usaha/industri siswa terlebih dahulu dipersiapkan pengetahuannya yaitu melalui kegiatan belajar di kelas. Disini guru memegang peranan yang sangat penting, karena materi diklat yang ada, nantinya akan digunakan sebagai bekal bagi siswa untuk dapat melaksanakan prakerin dari program PSG”.

Hal ini senada dengan informan 1 pada wawancara tanggal 02 April 2012 yang menyatakan bahwa,

“Setelah melaksanakan PBM selama kelas I dan II, siswa akan diterjunkan langsung di DUDI, mereka akan melihat keadaan di dunia kerja secara langsung yaitu di IP. Jadi mereka juga harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup agar dapat menyesuaikan diri di tempat kerja nantinya”.

Hal senada diperkuat juga oleh informan 3 tanggal, 04 April 2012 yang menyatakan,

“Siswa sebelum diterjunkan ke DUDI, itu diberi pembekalan terlebih dahulu melalui PBM supaya nantinya mereka mempunyai pengetahuan yang cukup”.

Berdasarkan ketiga pendapat di atas, dapat diketahui bahwa keberhasilan PBM akan sangat menentukan kesiapan diri siswa dalam memasuki dunia kerja.

Salah satu tolok ukur untuk mengetahui keberhasilan PBM adalah dengan melihat nilai para siswa setelah mengikuti berbagai rangkaian kegiatan belajar. Informan 2 pada wawancara tanggal 03 April 2012 mengatakan,

“Hasil belajar atau nilai anak-anak juga tidak jelek-jelek banget kok mbak. Hanya sebagian kecil dan beberapa saja yang nilainya dibawah rata-rata dan mendekati nilai minimal. Itu juga karena faktor-faktor tertentu juga. Kebanyakan dari mereka telah menguasai materi dan juga prakteknya, seperti pada plajaran komputer. Mereka sudah lancar dalam menggunakan komputer, terutama Ms. Office”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan 1 tanggal, 02 April 2012 yang menyatakan,

“Hasil dari PBM siswa cukup memuaskan mbak, sehingga mereka apabila diterjunkan di DUDI sudah memiliki bekal yang cukup”.

Hal senada juga diperkuat oleh informan 3 tanggal, 04 April 2012 yang menyatakan,

“Siswa selama mengikuti PBM hasilnya sedang mbak, lebih dari cukup, ya cukup baik lah. Sehingga mereka sudah menguasai program keahlian masing-masing dan siap untuk di terjunkan di DUDI”.

Dengan pendapat tersebut terbukti bahwa prestasi siswa selama kelas 1 dan 2, cukup baik dan sebagian besar siswa telah benar-benar menguasai materi mata diklat yang disampaikan oleh guru. Mereka telah menguasai kompetensi keahlian pada masing-masing bidang diklatnya untuk nantinya digunakan sebagai bekal ketika diterjunkan langsung ke DUDI.

b. Siswa Melaksanakan Prakerin

Setelah menguasai kompetensi keahlian pada masing-masing bidang diklat, yaitu yang didapatkan selama duduk di kelas 1 dan 2 maka awal kelas 3 pada saat liburan sekolah siswa diterjunkan langsung ke dunia kerja melalui kegiatan prakerin. Pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui PBM di sekolah digunakan sebagai modal bagi para siswa untuk dapat menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh pihak IP. IP merupakan komponen penting dalam pelaksanaan PSG. Tanpa adanya IP maka PSG tidak dapat dilaksanakan, karena IP adalah tempat siswa dalam melakukan prakerin sebagai bentuk dari program PSG. Prakerin sangat berperan dalam pembentukan mental kerja siswa dan peningkatan pengetahuan, keterampilan serta kemampuan siswa. Dari informan 5 pada wawancara tanggal 09 April 2012 menyatakan,

“Saya sangat terbantu dalam kegiatan prakerin itu mbak, karena saya bisa tahu bagaimana bekerja yang sebenarnya itu dan pengalaman saya juga bertambah”.

Hal tersebut senada dengan informan 6 pada wawancara tanggal 09 April 2012 yang menyatakan,

“Dengan adanya prakerin dari program PSG saya menjadi lebih terampil dalam menggunakan alat-alat kantor mbak, yang ketika di sekolah hanya diajarkan teorinya saja. Saya juga berlatih bagaimana menyesuaikan diri dengan orang yang mula-mula tidak kenal yaitu karyawan kantor yang umurnya lebih tua dibandingkan dengan saya, disini saya bisa berkomunikasi dengan lebih baik serta bisa melaksanakan tugas dengan lebih teliti”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa prakerin yang dilaksanakan siswa, benar-benar sangat mempengaruhi perkembangan dirinya, meningkatkan ketahanan mental, pengetahuan, kemampuan serta keterampilan mereka.

Setelah melaksanakan prakerin, siswa memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja, karena selama melaksanakan prakerin di IP para siswa sudah bisa mengetahui tentang cara kerja di dunia kerja yang sesungguhnya dan sudah mengetahui lingkungan kerja yang sebenarnya. Rata-rata siswa SMK Pancasila 5 Wonogiri yang telah mengikuti prakerin sudah memiliki cara kerja yang baik karena para siswa tersebut sudah dibekali dengan pengetahuan yang cukup dari sekolah. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai yang diperoleh siswa selama melaksanakan prakerin, dimana nilai yang diperoleh siswa rata-rata diatas 7. Informan 10 pada wawancara tanggal 13 April 2012 mengatakan:

“Mereka bekerja bagus dan teliti. Dalam pengarsipan mereka menguasai mengetik manual maupun komputer juga baik walaupun kadang-kadang ada sedikit kesalahan tetapi itu hanya kesalahan kecil. Menurut saya mereka siap berkompetisi di dunia kerja setelah lulus nanti. Mereka dapat bekerja sesuai bidang yang mereka inginkan hanya tergantung ada tidaknya lowongan”.

Hal ini senada dengan pendapat informan 8 pada wawancara tanggal 13 April 2012 yaitu,

“Siswa SMK Pancasila 5 Wonogiri memiliki cara kerja yang bagus mbak walaupun kadang-kadang ada sedikit kesalahan tapi hal itu tidak fatal, kami berusaha memberi petunjuk kepada mereka agar hasil kerja mereka maksimal”.

Hal tersebut diperkuat oleh informan 9 tanggal, 13 April 2012 yang menyatakan,

“Siswanya sudah memiliki ketrampilan yang cukup baik mbak, namanya saja juga masih belajar kadang salah itu masih dibatas wajar mbak”.

Dari informasi tersebut menunjukkan bahwa siswa SMK Pancasila 5 Wonogiri memiliki cara kerja yang bagus selama melaksanakan tugas di IP.

Selama prakerin di IP, siswa juga telah dibimbing dan dilatih oleh pihak IP sehingga siswa sudah tidak canggung lagi jika mereka memasuki dunia kerja. Oleh karena itu setelah siswa melaksanakan prakerin maka siswa tersebut nantinya lebih siap dan mempunyai bekal yang cukup untuk memasuki dunia kerja. Hal tersebut dikarenakan selama siswa melaksanakan prakerin, para siswa tersebut mendapatkan penilaian dari IP yang merupakan pengakuan terhadap kinerja siswa selama berada di IP.

c. Siswa Melaksanakan Uji Sertifikasi

Uji sertifikasi merupakan tahap penilaian penguasaan keahlian yang telah dilakukan selama pelaksanaan pendidikan dan latihan. Menurut GBPP pedoman pelaksanaan kurikulum SMK, “Ujian dan sertifikasi keahlian dibagi dalam 2 kategori yaitu uji kompetensi dan ujian profesi”.

SMK Pancasila 5 Wonogiri belum bisa melaksanakan uji profesi. Sedangkan uji kompetensi sudah dapat dilaksanakan oleh SMK Pancasila 5 Wonogiri dengan bantuan IP dan wakil dari Depdiknas Pusat. Aspek penilaian meliputi aspek teknis yaitu tingkat penguasaan ketrampilan siswa dalam menyelesaikan pekerjaan dan aspek non teknis yaitu sikap dan perilaku siswa yang menyatakan disiplin, tanggungjawab, kretivitas, kemandirian, dan kerjasama. Informan 2 pada wawancara tanggal 03 April 2012 mengatakan,

“Uji kompetensi itu dilaksanakan hanya untuk siswa kelas 3 mbak, dan materinya praktek semua, dari situ kita bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan yang telah dimiliki siswa dan keterampilan yang telah dikuasai, serta perilaku siswa yang menyangkut pada kepribadiannya”.

Setelah uji kompetensi dilaksanakan, maka siswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat kompetensi jika memenuhi standar kelulusan yaitu nilai 7. Hal tersebut senada dengan informan 1 pada wawancara tanggal 02 April 2012 yang menyatakan,

“Untuk ujian kompetensi sekarang ini bidang yang diujikan adalah semua materi yang telah didapatkan oleh siswa, mulai dari materi kelas 1 sampai dengan materi kelas III, seperti tata cara bertelepon, mengetik buta dengan cepat, penguasaan komputer, pengarsipan dan menggunakan mesin-mesin kantor. Apabila dalam ujian tersebut siswa mendapatkan nilai dibawah standar yaitu nilai 7 maka ia tidak akan mendapatkan sertifikat karna dia dianggap tidak lulus dan belum layak diakui kompetensinya”.

Uji kompetensi yang telah dilaksanakan oleh para siswa kelas III SMK Pancasila 5 Wonogiri tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap kualitas lulusan nantinya. Dengan melihat hasil yang dicapai, masyarakat akan bisa berpendapat tentang mutu dan potensi yang dimiliki oleh alumni SMK Pancasila 5 Wonogiri. Untuk kelas III pada tahun ajaran ini, hasil uji kompetensi dari para siswanya sudah baik, tidak ada siswa yang mendapatkan nilai dibawah standar yaitu 7 kebawah. Rata-rata mereka mendapatkan nilai 7

keatas. Seperti pernyataan informan 3 pada wawancara tanggal 04 April 2012 berikut ini,

“Uji kompetensi kemarin hasilnya cukup memuaskan mbak, ternyata usaha-usaha yang telah dilakukan oleh sekolah membuahkan hasil, dengan nilai 7 keatas itu membuktikan bahwa mereka memang telah menguasai baik materi maupun praktek yang sebelumnya telah kami ajarkan dari semenjak kelas I, dan bagusya lagi mereka semua dikatalan lulus. Walaupn peralatan dan sarana belajar kami belum lengkap, seperti sarana laboratorium dan lain-lain, tapi itu semua bisa kita atasi dan temukan jalan keluarnya. Kami sangat senang dengan hasil yang dicapai oleh siswa kami”.

Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa setelah melaksanakan uji kompetensi dan melihat hasil yang diperoleh, siswa SMK Pancasila 5 Wonogiri dapat dinyatakan lebih siap untuk memasuki dunia kerja setelah lulus nanti. Berbagai keahlian dan keterampilan dalam bidang administrasi perkantoran telah dikuasai, serta diakui kompetensinya ditunjukkan dengan telah diberikannya sertifikat kompetensi dengan berbagai aspek penilaiannya.

Program PSG merupakan pembelajaran di dunia kerja. Ini adalah suatu strategi dimana para peserta mengalami proses belajar mengajar melalui kegiatan bekerja langsung (*Learning by Doing*) pada pekerjaan yang sesungguhnya. Pelaksanaan program PSG di SMK Pancasila 5 Wonogiri meliputi beberapa tahapan-tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan dan penarikan. Berdasarkan ketiga program di atas, prakerin masuk pada urutan yang kedua. Adapun penjelasannya yang lebih rinci adalah sebagai berikut:

a. Persiapan prakerin

Tahap persiapan merupakan tahap dimana siswa dibekali keterampilan sesuai dengan kompetensinya. Yang mana hal ini telah didapatkan pada saat proses belajar mengajar di sekolah. Dalam pelaksanaan prakerin ada beberapa hal yang dipertimbangkan pihak SMK Pancasila 5

Wonogiri antara lain persiapan peserta prakerin, pemilihan IP dan waktu pelaksanaan prakerin, dan sosialisasi tata tertib prakerin.

1) Persiapan peserta prakerin

Tujuan prakerin adalah melatih calon tenaga kerja yang mempunyai kompetensi atau keterampilan yang sesuai dengan bidangnya. Namun demikian, peserta prakerin harus sudah memiliki bekal berupa penguasaan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian masing-masing. Dalam hal ini kompetensi-kompetensi yang dimaksudkan adalah mengetik 10 jari buta, setenografi, menguasai komputer Ms. Office, membuat surat masuk dan surat keluar.

Peserta prakerin di SMK Pancasila 5 Wonogiri adalah siswa kelas 3, dengan demikian mereka telah memperoleh pembelajaran di kelas 1 dan 2 sehingga diharapkan mereka telah benar-benar memiliki kompetensi keahlian administrasi perkantoran. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh informan 2 tanggal 3 April 2012 yang menyatakan,

“Disini ya mbak, peserta program PSG itu yang harus menguasai dasar-dasar kejuruan dan program keahlian yang sesuai dengan programnya masing-masing, supaya pelaksanaan program PSG itu nantinya lancar, misalnya saja program AP minimal harus menguasai Ms. Office, setenografi, bisa mengetik 10 jari buta”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan 1 tanggal 2 April 2012 yang menyatakan,

“Seluruh peserta pelaksanaan prakerin itu baik anak administrasi perkantoran, penjualan, akuntansi dan teknik komputer jaringan itu sudah mendapatkan atau menguasai dasar-dasarnya terlebih dahulu dan harus menguasai program diklat masing-masing kejuruan, yaitu mereka dapat melalui proses belajar mengajar yang ada disekolah”.

Hal senada juga diperkuat oleh informan 3 tanggal 4 April 2012 yang menyatakan,

“Ya seluruh siswa yang akan melaksanakan prakerin dari program PSG itu sebelumnya diberi pembekalan dengan adanya PBM mbak, setelah itu seluruh siswa masing-masing harus menguasai program kejuruannya”.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa peserta prakerin di SMK Pancasila 5 Wonogiri adalah para siswa yang telah menguasai dasar-dasar kejuruan sesuai dengan programnya masing-masing, misalnya jurusan AP harus terampil mengetik menggunakan 10 jari buta, menguasai komputer minimal Ms. Office, menulis setenografi dengan cepat, dan membuat surat masuk maupun surat keluar.

2) Pemilihan IP dan Waktu pelaksanaan Program PSG.

Tempat pelaksanaan prakerin yang digunakan sebagai IP oleh SMK Pancasila 5 Wonogiri terdapat 4 tempat atau instansi, pemilihan tersebut dipilih dengan berbagai perhitungan utamanya di instansi pemerintahan, serta kesesuaian antara tempat IP dengan jurusan dan keterampilan dari siswa yang akan diterjunkan, dan disesuaikan dengan jumlah siswa yang melaksanakan program PSG masing-masing tempat IP terdapat 10-15 siswa. Hal ini senada dengan informan 1 tanggal 2 April 2012 yang menyatakan,

“Kami hanya bekerjasama dengan 4 instansi mbak untuk melaksanakan program dari PSG dengan adanya prakerin, terutama di instansi pemerintah”.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh informan 2 tanggal 3 April 2012 yang menyatakan,

“Instansi yang dijadikan tempat pelaksanaan PSG itu ada 4 tempat mbak, yaitu di Dinas pendidikan, Bappeda, DPPKAD, Dinas kependudukan dan catatan sipil”.

Hal tersebut juga diperkuat oleh informan 3 tanggal 4 April 2012 yang menyatakan,

“Kami sudah bekerjasama dengan beberapa instansi mbak, terutama di instansi pemerintahan seperti di dinas pendidikan sebagai orang tua kami tentunya, Bappeda, kemudian di Dinas Capil dan DPPKAD, hanya itu saja karena juga mengingat yang kelas III sekarang ini hanya 1 kelas”.

Waktu pelaksanaan prakerin yaitu selama 2 bulan pada saat kenaikan kelas II ke kelas III yang dilaksanakan pada masa liburan sekolah, yaitu sekitar tanggal 5 September-5 November. Hal tersebut sesuai dengan informan 3 tanggal 4 April 2012 yang menyatakan,

“Pelaksanaan program PSG disini dilaksanakan 2 bulan mbak, itu dilaksanakan pada waktu kenaikan kelas II ke kelas III”.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pendapat informan 2 tanggal 3 April 2012 yang menyatakan,

“Pelaksanaan prakerin itu dilaksanakan 2 bulan pada saat kenaikan ke kelas III mbak”.

Hal tersebut juga diperkuat oleh informan 1 tanggal 2 April 2012 yang menyatakan,

“PSG dilaksanakan 2 bulan mbak, pada saat kenaikan ke kelas III tanggal 5 September -5 November”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pemilihan IP untuk pelaksanaan prakerin, khususnya dilaksanakan di instansi pemerintahan yaitu, dinas pendidikan, BAPPEDA, DPPKAD, dinas kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan waktu pelaksanaannya dilaksanakan 2 bulan yang dimulai pada tanggal 5 September-5 November pada saat kenaikan kelas II ke kelas III.

- 3) Sosialisasi tata tertib PSG yang harus disepakati baik dari pihak sekolah maupun dari pihak Institusi Pasangan (IP).

Tata tertib PSG, bertujuan agar pelaksanaan prakerin dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun isi tata tertib prakerin adalah:

- a) Mematuhi peraturan yang berlaku dalam IP pada pelaksanaan kerja;
- b) Berada ditempat kerja 15 menit sebelum kerja dimulai;
- c) Mengenakan seragam Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Seragam OSIS);
- d) Berlaku sopan, jujur, bertanggung jawab, berinisiatif dan kreatif terhadap tugas-tugas yang diberikan selama menjalankan praktek;
- e) Memberi salam pada waktu datang dan mohon diri pada waktu meninggalkan (pulang);
- f) Memberitahukan kepada pembimbing IP atau perusahaan jika berhalangan hadir atau bermaksud meninggalkan tempat kerja sebelum waktunya pulang;
- g) Mentaati peraturan dalam penggunaan alat dan bahan yang dipakai dalam kerja;
- h) Membicarakan atau berkonsultasi dengan segera kepada pembimbing, apabila dalam bekerja menemui kesulitan;
- i) Membersihkan dan mengatur kembali alat atau bahan dengan rapi seperti semula apabila telah selesai melakukan tugasnya;
- j) Setiap hari mengisi presensi serta tugas yang diberikan atau dibebankan kedalam agenda harian, kemudian memintakan pengesahan kepada Pembimbing Institusi;
- k) Bekerjasama dan saling membantu antar peserta PGS dalam melaksanakan tugas;
- l) Menyimpan memelihara administrasi PSG dari sekolah;

Tata tertib yang harus dipatuhi oleh siswa prakerin dan sudah disepakati pihak sekolah maupun IP, akan disampaikan kepada siswa dalam jangka waktu kurang lebih seminggu sebelum penerjunan ke IP, namun pada saat penyerahan juga dibacakan kembali oleh pihak IP tentang tata tertib yang harus di patuhi oleh siswa selama melaksanakan prakerin. Hal tersebut senada dengan informan 2 tanggal 24 April 2012 yang menyatakan,

“Wali kelasnya membacakan di depan kelas masing-masing mbak tentang tata tertib yang harus diperhatikan oleh para siswa, biasanya itu dalam jangka waktu seminggu sebelum penerjunan ke IP”.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh informan 3 tanggal 24 April 2012 yaitu,

“Biasanya salah satu guru membacakan dan memberikan selebaran tentang tata terib yang harus diperhatikan oleh siswa yang harus dipatuhi di tempat IP mbak”.

Hal tersebut juga diperkuat oleh informan 8 tanggal 24 April 2012 yang menyatakan,

“Pada saat penyerahan siswa PSG itu dibacakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh siswa mbak”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sebelum penerjunan dalam jangka waktu kurang lebih satu minggu dan pada saat penerjunan di tempat IP siswa di beritakan tata tertib yang harus dilaksanakan atau yang harus dipatuhi oleh siswa di tempat IP masing-masing.

b. Pelaksanaan prakerin

Pelaksanaan prakerin diawali dengan penerjunan siswa pada IP (DUDI) masing-masing. Disini siswa mempraktekkan keterampilan dasar yang diperolehnya selama belajar di program keahlian masing-masing. Hal

ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan 1 tanggal 24 April 2012 yaitu,

“Penerjunannya itu disesuaikan dengan program keahliannya masing-masing mbak. Ya kalau anak jurusan administrasi perkantoran itu ditempatkan dikantor atau di instansi pemerintahan”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan 2 tanggal 24 April 2012 yaitu,

“Dalam penerjunan ini disesuaikan dengan kompetensinya masing-masing, ya supaya lancar dan baik nantinya. Sesuai dengan program jurusannya masing-masing”.

Hal senada diungkapkan oleh informan 3 tanggal 24 April 2012 yang menyatakan,

“Anak-anak administrasi perkantoran itu biasanya ditempatkan pada bagian kantor pemerintahan yang telah diajak bekerjasama oleh sekolah”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa, dalam penerjunan siswa prakerin di SMK Pancasila 5 Wonogiri disesuaikan dengan kompetensinya masing-masing, khususnya untuk program AP diterjunkan di instansi pemerintahan.

Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh peserta PSG sudah sesuai dengan kompetensi-kopetensi yang diajarkan di bangku sekolah. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan 5 tanggal 24 April 2012 yaitu,

“Pekerjaan saya di Dinas Pendidikan itu mbak, mengurus surat masuk dan surat keluar, mengurus SPJ dan SP2D, mengarsip surat, membuat sekapitulasi, mengagendakan surat dan kegiatan administrasi lainnya. Pokoknya yang pernah dapat disekolah saya praktekan di instansi tersebut”.

Hal senada juga diungkapkan oleh informan 6 tanggal 24 April 2012 yang menyatakan,

“Kalau saya di Dinas kependudukan dan catatan sipil mbak, pekerjaan-pekerjaan saya menangani surat-surat, melayani masyarakat membuat KK dan Akte Kelahiran, mengarsip dokumen dan mengagendakan dokumen”.

Hal tersebut juga diperkuat oleh informan 8 tanggal 13 April 2012 yang menyatakan,

“Disini para siswa yang melaksanakan prakerin itu saya beri pekerjaan mengenai mengetik SPJ, mengetik presensi pegawai, mengoperasikan mesin fotocopi, mengarsip surat masuk, dan membuat surat tugas”.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pekerjaan yang dilakukan siswa prakerin program diklat administrasi perkantoran adalah mengarsip surat, mengetik SPJ, mengoperasikan mesin fotocopi, membuat surat tugas, dan mengagendakan surat. Hal tersebut berarti pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan program diklat yang telah diberikan di sekolah.

Dalam pelaksanaan prakerin, perlu adanya pembimbingan. Pembimbingan dimaksudkan agar dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada saat pelaksanaan PSG. Pembimbing ada 2 (dua) pihak yaitu dari sekolah dan dari IP. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan 2 tanggal 24 April 2012 yaitu,

“Dalam proses pelaksanaan prakerin disini diperlukan adanya suatu pembimbingan. Yaitu guru dari pihak sekolah dan instruktur dari pihak IP”.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh informan 7 tanggal 24 April 2012 yang menyatakan,

“Saya pembimbingnya ada dua mbak, dari sekolahan satu dan dari instansi satu”.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh informan 3 tanggal 24 April 2012 yang menyatakan,

“Saya sebagai pembimbing anak yang melaksanakan prakerin mbak, di IP juga ada pembimbingnya sendiri mbak, disana untuk mengarahkan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan oleh siswa prakerin”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa karena prakerin melibatkan pihak sekolah dan pihak IP atau DUDI, maka pembimbing siswa prakerin adalah guru (sekolah) dan instruktur (IP).

Dalam tahap ini juga dilakukan monitoring saat siswa diterjunkan ke tempat IP, untuk mengetahui pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh siswa dan untuk memantau siswa yang tidak rajin atau tidak mematuhi peraturan prakerin. Monitoring ini dilakukan minimal 3kali selama melaksanakan prakerin di tempat IP, namun juga ditambah oleh ketua program jurusan masing-masing sesuai kebutuhan. Hal tersebut diperkuat oleh informan 1 tanggal 28 April 2012 yaitu,

“Ya perlu mbak, untuk mengetahui pekerjaannya siswa. Biasanya dilakukan minimal 3kali selama 2bulan melaksanakan prakerin”.

Hal senada juga diungkapkan oleh informan 2 tanggal 28 April 2012 yang menyatakan,

“Monitoring dilakukan oleh pembimbingnya masing-masing mbak, biasanya dilakukan kurang lebih 3kali selama prakerin berlangsung”.

Hal senada diperkuat oleh informan 3 tanggal 28 April 2012 yang menyatakan,

“Ada dong, yang pasti dilakukan minimal 3kali ditambah dengan ketua program jurusan masing-masing sesuai dengan kebutuhan”.

Berdasarkan informasi di atas dapat diketahui, bahwa pada saat pelaksanaan prakerin dari prakerin dilaksanakan monitoring untuk mengetahui kegiatan para siswa yang berada di tempat IP. Monitoring tersebut dilakukan oleh pembimbingnya masing-masing, minimal dilaksanakan tiga kali selama melaksanakan prakerin ditambah dengan ketua program jurusan sesuai dengan kebutuhan.

c. Penarikan siswa prakerin

Setelah siswa melaksanakan prakerin di DUDI atau IP selama 2 bulan, maka semua siswa ditarik kembali oleh pihak sekolah untuk melanjutkan pelajaran seperti biasa dikelas mereka masing-masing. Penarikan siswa prakerin dihadiri oleh pembimbing sekolah, pembimbing IP dan siswa. Pernyataan tersebut sesuai dengan informan 2 tanggal 24 April 2012 yang menyatakan,

“Ya kalau sudah terlaksana sesuai jadwal yaitu 2 bulan, maka siswa ditarik kembali oleh pihak sekolah untuk melanjutkan pembelajaran di sekolah mbak”.

Hal senada juga diungkapkan oleh informan 3 tanggal 24 April 2012 yang menyatakan,

“Pnarikannya itu kalau rencana-rencana awal tersebut terlaksana dan sudah selesai kemudian anak-anak ditarik , habis itu belajar disekolah kayak biasanya.. penarikannya itu ada pembimbing, instruktur dan siswa”.

Hal senada juga diungkapkan oleh informan 8 tanggal 13 April 2012 yang menyatakan,

“Kalau sudah selesai pihak sekolah memberikan surat yang menyatakan kalau program PSG sudah selesai. Habis itu anak-anak yang praktek disini ditarik oleh pihak sekolah”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa penarikan dilaksanakan setelah pelaksanaan prakerin selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam tahap ini juga dilakukan evaluasi hasil kerja peserta prakerin. Evaluasi ini bertujuan agar pihak IP, sekolah, siswa dapat mengetahui hasil kerja selama melaksanakan prakerin. Form evaluasi dibuat oleh pihak sekolah yang nantinya diberikan kepada IP. Hal tersebut diperkuat oleh informan 2 tanggal 24 April 2012 yaitu,

“Evaluasi disini dilakukan oleh kedua belah pihak mbak, kalo pihak IP itu diberi form penilaian dari kami, nanti pihak sana yang menilai. Kalau pihak saya selaku guru pembimbing membuat laporan pertanggungjawaban yang nantinya diberikan kepada Kepala Sekolah”.

Hal senada juga diperkuat oleh informan 8 tanggal 13 April 2012 yang menyatakan,

“Saya diberi form penilaian dari pihak SMK, lalu saya beri nilai sesuai dengan kemampuan anak, kemudian saya berikan pada pihak sekolah”.

Hal tersebut juga diperkuat oleh informan 3 tanggal 24 April 2012 yang menyatakan,

“Setiap guru pembimbing menyerahkan hasil evaluasi dari pihak IP lalu saya buat laporan pertanggungjawaban yang nantinya akan saya laporkan kepada Kepala Sekolah”.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa evaluasi prakerin dilakukan oleh pihak IP dan pihak sekolah yang pada akhirnya dilaporkan kepada Kepala Sekolah untuk dipertanggungjawabkan dan sebagai bahan masukan untuk evaluasi pelaksanaan prakerin berikutnya.

2. Hambatan SMK Pancasila 5 Wonogiri Dalam Melaksanakan Program Pendidikan Sistem Ganda Untuk Mempersiapkan Siswa Memasuki Dunia Kerja

Pelaksanaan program PSG di SMK Pancasila 5 Wonogiri mengalami berbagai hambatan. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain:

a. Kurangnya Dana Untuk Penyelenggaraan Pendidikan

Program PSG pada SMK merupakan sistem pendidikan yang menekankan pada pembelajaran teori dan praktek, untuk itu diperlukan yang lebih besar daripada sekolah lain. Kurangnya dana yang tersedia di SMK Pancasila 5 Wonogiri untuk pelaksanaan pendidikan merupakan salah satu hambatan dalam mempersiapkan siswa untuk dapat memasuki dunia kerja setelah lulus nanti. Seperti yang dikemukakan oleh informan 1 pada wawancara tanggal 02 April 2012 yang menyatakan,

“SMK ini adalah milik yayasan, jadi biaya-biaya pendidikan juga dikelola yayasan, biaya itu juga berasal dari pembayaran SPP para siswa, sedangkan pada kenyataannya siswa seringkali terlambat dalam membayar SPP”.

Hal ini juga senada dengan pendapat informan 3 pada wawancara tanggal 04 April 2012 yang menyatakan,

“Mbak, siswa disini itu kebanyakan berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, jadi pihak sekolah juga tidak bisa memaksakan apabila memang siswa belum bisa membayar uang sekolah atau SPP. Walaupun itu juga akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses belajar-mengajar nantinya, tapi yam au bagaimana lagi”.

Dari kedua pendapat tersebut dapat diketahui bahwa SMK Pancasila 5 Wonogiri tidak memiliki dana yang lebih dari cukup untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran bagi para siswanya. Hal ini dikarenakan para siswa yang sering terlambat dalam membayar SPP, yang

tidak hanya terlambat sebulan atau dua bulan tetapi banyak juga yang terlambat berbulan-bulan.

b. Kurangnya Sarana Laboratorium dalam Proses Pendidikan

Kelancaran proses belajar mengajar tidak lepas dari sarana dan prasarana yang tersedia, karena dengan sarana yang lengkap maka keberhasilan proses belajar-mengajar akan lebih mudah dicapai. Informan 3 tanggal 04 April 2012 yang menyatakan,

“Disini itu sarananya belum mencukupi mbak, misalnya alat-alat praktek perkantoran yang belum komplet dan jumlah komputer yang masih kurang”.

Sarana pendidikan yang dirasa masih kurang di SMK Pancasila 5 Wonogiri antara lain: komputer dan peralatan atau mesin-mesin kantor untuk praktek para siswa. Seperti yang telah peneliti amati, pada saat pelajaran praktek komputer, jumlah komputer lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah siswa, jadi setiap siswa tidak bisa mengoperasikan komputer sendiri-sendiri, tetapi satu komputer digunakan untuk 2 dan bahkan 3 siswa. Tentu saja ini sangat tidak efektif sehingga sulit bagi siswa untuk lebih mengenal dan menguasai komputer. Hal ini juga senada dengan pendapat informan 5 pada tanggal 05 April 2012 yang mengatakan,

“Mbak saya itu susah kalau sedang mengajar praktek komputer, sudah jumlah komputernya sedikit, belum lagi kalau komputernya rusak atau eror, jadi ya harus ekstra waktu dan tenaga untuk bisa menyelesaikan materi”.

Sehingga dari pendapat tersebut pada saat pembelajaran berlangsung belum bisa berlangsung dengan maksimal dikarenakan sarana pembelajarannya masih kurang.

c. Belum Adanya Uji dan Sertifikasi Profesi

Uji dan sertifikasi profesi belum diadakan di SMK Pancasila 5 Wonogiri, dikarenakan pihak sekolah masih kesulitan dalam beberapa hal diantaranya sarana, dana, dan asosiasi profesinya. Untuk melaksanakan uji profesi, sekolah harus memiliki sarana yang lengkap selain itu diperlukan biaya yang cukup besar, sedangkan siswa maupun sekolah belum mampu menanggung biaya tersebut. Hal tersebut senada dengan informan 1 pada tanggal 02 April 2012 yang menyatakan,

“Di SMK Pancasila 5 Wonogiri ini belum bisa mengadakan ujian profesi karena sarana dan prasarananya yang kurang menunjang, dana yang belum mencukupi, sehingga belum diadakan ujian profesi”.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh informan 3 tanggal 04 April 2012 yang menyatakan,

“Untuk ujian profesi di SMK Pancasila 5 Wonogiri belum dilaksanakan mbak karena sarana dan prasarananya masih kurang serta dana yang dikeluarkan terlalu mahal sehingga belum bisa melaksanakannya”.

d. Tidak Sesuai Jenis Pekerjaan yang ada di Institusi Pasangan (IP)

Walaupun di atas tadi terdapat kesesuaian antara teori dengan pekerjaan yang dilakukan di IP, namun masih terdapat siswa yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan teori yang sudah didapat dari sekolah. Ketidaksesuaian jenis pekerjaan di Industri dengan yang diberikan dari sekolah adalah salah satu hambatan dalam pelaksanaan program PSG. Karena mata diklat yang diberikan di sekolah tidak sesuai dengan yang dikerjakan. Seperti yang diungkapkan oleh informan 3 tanggal 04 April 2012

“Ya, kadang itu nggak sesuai mabk. Masak kemarin ada siswa yang laporan dengan saya, katanya kadang itu disuruh ngelimi. Memang sih itu pekerjaan yang semua orang bisa lakukan tapi itu kan nggak ada dalam mata diklat”.

Demikian juga yang diungkapkan oleh informan 6 tanggal 09 April 2012,

“Saya itu lho mbak, saya disuruh nganter-nganter surat-surat gitu. Padahal saya nggak tau tempatnya. Ya sudah saya kerjakan dan tanya-tanya gitu”.

Hal senada juga diungkapkan oleh informan 7 tanggal 11 April 2012 yaitu,

“Saya kan di bagian TU mbak nah disitu banyak surat masuk dan keluar masak saya disuruh keluar untuk fotocopy terus padahal itu kan nggak ada didalam materi”.

Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu hambatan dalam pelaksanaan prakerin yaitu adanya ketidaksesuaian jenis pekerjaan yang ada di industri.

3. Usaha SMK Pancasila 5 Wonogiri untuk Mengatasi Hambatan dalam Melaksanakan Program PSG

Usaha-usaha yang dilakukan SMK Pancasila 5 Wonogiri dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut di atas antara lain:

a. Memfungsikan Unit Produksi

Usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah kurangnya dana dalam proses pendidikan adalah dengan memfungsikan unit produksi yang ada di SMK Pancasila 5 Wonogiri, karena peranan unit produksi sebagai sarana pendidikan juga sebagai sumber pemasukan dana bagi sekolah.

Dengan demikian pihak SMK Pancasila 5 Wonogiri berusaha untuk benar-benar memfungsikan unit produksi agar dapat memberikan peranan yang lebih banyak pada sekolah. Selain itu dengan adanya unit produksi siswa juga dapat mengembangkan dirinya, menambah pengetahuannya serta mendapatkan pengalaman-pengalaman yang dapat bermanfaat bagi kemajuan dirinya. Informan 2 tanggal 03 April 2012 yang menyatakan,

“Terdapat unit produksi kantin dan koperasi itu dikelola oleh siswa khususnya jurusan manajemen bisnis, tapi untuk administrasi perkantoran belum ada unit produksinya mbak”.

Hal senada diungkapkan oleh Informan 3 pada wawancara tanggal 04 April 2012 yang mengatakan,

“Disini ada unit produksi mbak, diantaranya kantin dan koperasi, semuanya dikelola oleh para siswa dibawah bimbingan guru yang telah ditunjuk oleh kepala sekolah. Dari kegiatan masing-masing unit produksi pasti ada keuntungannya, nah 20% dari total keuntungan akan diberikan kepada sekolah, yang nantinya juga akan dimanfaatkan untuk kepentingan para siswa juga terutama dalam kegiatan belajarnya”.

Kemudian untuk mengatasi masalah uang SPP siswa yang tidak lancar dan sering terjadi keterlambatan, maka pihak sekolah dan yayasan telah mengadakan program pemberian beasiswa bagi para siswa yang tidak mampu dan atau berprestasi. Selain itu para guru juga menunjukkan kepeduliannya melalui sumbangan-sumbangan yang berasal dari gaji mereka, yaitu dengan menyisihkan sebagian gaji setiap bulan dalam jumlah tertentu kemudian dikumpulkan dan diberikan bagi siswa yang tidak mampu. Usaha-usaha di atas tentunya akan sangat membantu dalam mengatasi masalah kurangnya dana dalam penyelenggaraan pendidikan.

b. Menambah Sarana Laboratorium dalam Proses Pendidikan

Pihak sekolah berusaha menambah sarana dan prasarana yang diperlukan dengan menggunakan sebagian dana pengembangan yang merupakan bantuan dari orang tua siswa setiap awal tahun ajaran baru yang dikelola oleh komite sekolah. Informan 2 tanggal 03 April 2012 yang menyatakan,

“Untuk pengadaan sarana dan prasarana disekolahan sini selain mengandalkan dari yayasan dan SPP siswa juga mengalokasikan dana dari orang tua siswa mbak, yang nantinya juga untuk keperluan siswa”.

Hal tersebut senada dengan pendapat informan 3 tanggal, 04 April 2012 yang menyatakan,

“Sarana dan Prasarana pendidikan disini masih belum mencukupi mbak, kalau mengandalkan dana dari yayasan dan SPP anak-anak dan BOS tidaklah cukup, jadi kita mengalokasikan sumbangan yang berasal dari orang tua siswa untuk membeli peralatan-peralatan yang dibutuhkan atau yang masih kurang, tentu saja secara bertahap mengingat harganya yang tidak murah dan kebutuhan-kebutuhan sekolah lainnya yang juga penting”.

Dari kutipan wawancara tersebut di atas, dapat dilihat bahwa sekolah sudah berusaha untuk mengatasi kurangnya sarana pendidikan dengan cara mengalokasikan sebagian dari sumbangan orang tua siswa untuk membeliperalatan yang dibutuhkan meskipun pembeliannya masih dilakukan secara bertahap.

c. Mengajukan Permohonan Kepada Pemerintah

Yang dapat dilakukan oleh SMK Pancasila 5 Wonogiri hanyalah berusaha mengajukan permohonan kepada pemerintah agar bersedia membantu dan berperan serta agar SMK Pancasila 5 Wonogiri dan SMK lain

di wilayah Surakarta yang belum melaksanakan ujian dan sertifikasi profesi segera dapat dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan informan 1 tanggal 02 April, yang menyatakan,

“Saat ini pihak sekolah belum bisa melaksanakan ujian dan sertifikasi profesi mbak, karena sarannya belum menunjang selain itu biayanya tidak terjangkau untuk sekolahan ini, karena dilihat dari kondisi siswa dan sekolahan yang dari yayasan jadi kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah”.

Hal senada diungkapkan oleh informan 3 tanggal, 03 April 2012 yang menyatakan,

“Untuk masalah ujian dan sertifikasi profesi yang belum dapat kami selenggarakan, itu dikarenakan biayanya yang cukup mahal itu yang menjadi ganjalan bagi kami, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Di wilayah Wonogiri sini yang sudah melaksanakan ujian sertifikasi profesi baru SMK Negeri 1 Wonogiri mbak. Jadi kami hanya bisa berharap dan memohon bantuan dan peran serta pemerintah agar ujian profesi dapat dilaksanakan”.

Hal senada diperkuat oleh informan 2 tanggal, 03 April 2012 yang menyatakan,

“Uji dan sertifikasi profesi belum dapat menyelenggarakan mbak, karena menggunakan dana yang mahal dan sarana prasaranya kurang mencukupi, dilihat dari penghasilan orang tua siswa disini sebagian besar dari keluarga sedang kebawah”.

Dari kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa SMK Pancasila 5 Wonogiri belum bisa melaksanakan apa-apa selain meminta kepada pemerintah supaya dapat membantu dan berperan serta agar ujian profesi dapat terlaksana.

d. Penyesuaian Jenis Pekerjaan yang ada di IP Dengan Program Mata Diklat melalui Monitoring dan Evaluasi.

Menurut informan 2 tanggal, 03 April 2012 yang menyatakan,

“Untuk ketidaksesuaian jenis pekerjaan, ya kita sesuaikan saja. Dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi, siswa diharapkan dapat mencatat setiap pekerjaan yang dilakukan selama prakerin, lalu pembimbing mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan tersebut, apakah sudah sesuai dengan program diklat apa belum”.

Demikian juga diungkapkan oleh informan 1 tanggal 02 April 2012 yang menyatakan,

“Untuk mengatasi hambatan itu, yang diadakan monitoring dan evaluasi mbak, biar nantinya ada perbaikan”.

Hal senada juga diungkapkan oleh informan 3 tanggal, 04 April 2012 yang menyatakan,

“Monitoring dan evaluasi adalah salah satu upaya yang tepat mbak, untuk mengatasi hambatan itu, supaya pekerjaan dengan perogram diklat disekolah sesuai”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa untuk mengatasi ketidaksesuaian jenis pekerjaan diadakanlah monitoring dan evaluasi agar pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan mata diklat yang ada di sekolah.

C. Pembahasan

Permasalahan yang peneliti kaji pada penelitian ini adalah tentang program PSG dalam mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja, hambatan yang dialami pihak sekolah dalam melaksanakan program PSG serta usaha-usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dalam hal ini peneliti proses belajar-mengajar, pelaksanaan program PSG yaitu prakerin, dan ujian sertifikasi. Apabila ketiga hal

tersebut di atas telah terlaksana dengan baik dan berhasil maka dikatakan siswa tersebut sudah memiliki kesiapan dalam memasuki dunia kerja. Kemudian dalam usaha mempersiapkan para siswa tersebut pihak sekolah juga mengalami hambatan, sehingga pihak sekolah juga harus berusaha untuk mengatasi hambatan tersebut agar para tamatannya dapat unggul dalam melaksanakan program PSG dan memasuki dunia kerja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan berdasarkan perumusan masalah yang dihubungkan dengan kajian teori, dapat ditemukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program PSG Dalam Mempersiapkan Siswa Memasuki Dunia Kerja

Di SMK Pancasila 5 Wonogiri, untuk pelaksanaan program PSG dalam mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja, pihak sekolah harus melakukan usaha diantaranya melalui penyelenggaraan PBM, praktek kerja industry (prakerin), dan ujian sertifikasi. Hal-hal tersebut telah dilaksanakan oleh SMK Pancasila 5 Wonogiri.

a. Kesiapan Siswa Dilihat dari PBM

Menurut Uzer Usman (2011) “Proses adalah interaksi semua komponen atau unsur yang terdapat dalam belajar-mengajar yang satu sama lainnya saling berhubungan (*interdependent*) dalam ikatan untuk mencapai tujuan” (hlm. 4). Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam PBM ada aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa dan kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru. Dari serangkaian aktivitas tersebut tentu ada sesuatu yang ingin dicapai. Menurut Slameto (2003), “Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya” (hlm. 2). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan kegiatan belajar diharapkan seorang individu mengalami perubahan tingkah laku baik itu dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti dan dari tidak bisa

menjadi bisa. Jadi kriteria keberhasilan dalam PBM ditandai dengan terjadinya perubahan tingkah laku pada diri individu yang belajar dan perubahan ini sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan.

Penyelenggaraan PBM yang telah dilaksanakan dengan baik oleh SMK Pancasila 5 Wonogiri telah berdampak pada perkembangan dan kemajuan siswa. Karena pada saat di sekolah siswa tidak hanya dibekali dengan teori saja melainkan dengan ditambahkan materi praktek dasar keterampilan yang dilaksanakan di laboratorium masing-masing bidang keahlian. Di atas telah dijelaskan bahwa prestasi belajar siswa selama di kelas 1 dan 2, cukup baik dan sebagian besar siswa menguasai materi mata diklat yang disampaikan oleh guru, baik teori maupun prakteknya, untuk nantinya digunakan sebagai bekal ketika diterjunkan langsung ke dunia kerja.

Dari uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa siswa telah mengalami kemajuan setelah melaksanakan proses belajar-mengajar dan mendapatkan pengalaman ketika dalam kegiatan belajar, ini berarti tujuan dari PBM telah tercapai.

b. Kesiapan Siswa Melaksanakan Prakerin Dari Program PSG

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sebuah jenjang pendidikan yang menghasilkan calon tenaga kerja tingkat menengah. Dalam PP Nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah disebutkan bahwa “SMK adalah Pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu”. Dari pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa SMK adalah sebagai jenjang pendidikan yang akan menghasilkan lulusan yang terampil dalam bidang pekerjaan tertentu. Dengan kata lain para siswanya dipersiapkan untuk menjadi lulusan yang siap memasuki dunia kerja. Jadi materi pelajaran atau isi dari program pengajarannya juga harus relevan dengan kondisi di dunia

kerja. Maka salah satu program yang digalakkan pemerintah pada jenjang pendidikan menengah kejuruan adalah Program Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Menurut Depdiknas (2004),

“Program PSG pola penyelenggaraan diklat yang dikelola bersama-sama antara SMK dengan industri/asosiasi profesi sebagai Institusi Pasangan (IP), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi dan sertifikasi yang merupakan suatu kesatuan program yang menggunakan berbagai bentuk alternative pelaksanaan (hlm. 8)”.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa PSG merupakan program bersama SMK dengan DUDI dimana proses pendidikan dan pelatihan dilaksanakan di dua tempat yaitu di sekolah dan di IP, siswa ditugaskan untuk mempraktekkan apa yang telah mereka peroleh selama PBM di sekolah. Jadi siswa tidak hanya dibekali dengan teori saja melainkan dibekali dengan keterampilan pada bidangnya sesuai dengan program keahlian yang mereka pelajari. Program praktek kerja atau kegiatan terjun langsung di DUDI tersebut dikenal dengan istilah Praktek kerja industri (Prakerin).

Usaha yang telah dilaksanakan oleh SMK Pancasila 5 Wonogiri dalam pelaksanaan program PSG dalam mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja adalah program praktek kerja industri (prakerin). Pelaksanaan prakerin dapat memantapkan diri siswa untuk memasuki dunia kerja setelah mereka lulus nanti. Hal tersebut dikarenakan selama melaksanakan prakerin di DUDI para siswa mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan mengetahui kondisi dunia kerja yang sesungguhnya sebelum lulus, sehingga dapat menanamkan sikap professional pada diri siswa sejak dini.

Pendapat dari pihak IP tempat siswa melaksanakan prakerin, pihak sekolah dan siswa sendiri, serta dokumen pelaksanaan prakerin, maka ditinjau dari pelaksanaan prakerin, para siswa SMK Pancasila 5 Wonogiri

sudah siap untuk memasuki dunia kerja karena para siswa sudah memenuhi standar kualifikasi yang telah ditetapkan di dunia kerja yaitu telah memiliki cukup pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan sikap professional dalam bekerja. Dimana kesiapan tersebut dapat dilihat dari hasil penilaian siswa selama melaksanakan prakerin di IP.

c. Kesiapan Siswa Melaksanakan Uji Sertifikasi

Menurut GBPP pedoman pelaksanaan kurikulum SMK, ujian dan sertifikasi keahlian adalah suatu proses pemberian pengakuan keahlian dan kewenangan peserta dan tau tamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan tertentu, melalui suatu proses sistem pengujian keahlian yang mengacu kepada standar keahlian yang berlaku dan diakui di lapangan kerja. Uji sertifikasi keahlian dibagi kedalam dua kategori yaitu uji keahlian dan uji profesi (1999: 32).

Dalam sistem pengujian dan sertifikasi PSG (1995) dijelaskan bahwa, “Uji kompetensi adalah suatu bentuk evaluasi hasil belajar yang melibatkan pihak pemakai tamatan dan lembaga-lembaga profesi sehingga strategi untuk memperoleh tamatan yang memiliki kemampuan produksi sesuai dengan standar yang dipersyaratkan pemakai (hlm. 6)”. Sedangkan uji profesi menurut Majelis Pendidikan kejuruan Nasional (MPKN), adalah “Proses pengukuran dan penilaian penguasaan keahlian seseorang berdasarkan penguasaannya terhadap standar kemampuan yang dipersyaratkan untuk dinyatakan ahli dan berwenang pada bidang pekerjaan tertentu, sesuai standar resmi (baku) yang berlaku pada suatu jenis keahlian tertentu”.

Ujian dan sertifikasi kompetensi telah dilakukan oleh siswa SMK Pancasila 5 Wonogiri yang merupakan tahap penilaian dan pemberian pengakuan atas penguasaan keahlian yang telah dimiliki siswa selama

melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Hasil ujian kompetensi dari siswa SMK Pancasila 5 Wonogiri juga baik dan memuaskan. Semua siswa kelas III yang melaksanakan ujian dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata diatas 7. Dari sini dapat disimpulkan bahwa siswa SMK Pancasila 5 Wonogiri telah berhasil dalam menguasai kompetensi pada bidang keahlian. Untuk uji profesi, belum dapat dilaksanakan oleh SMK Pancasila 5 Wonogiri dan hal tersebut adalah salah satu hambatan untuk pelaksanaan program PSG dalam mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja.

2. Hambatan SMK Pancasila 5 Wonogiri Untuk Pelaksanaan Program PSG Dalam Mempersiapkan Siswa Memasuki Dunia Kerja

Berdasarkan data yang ada di lapangan, hambatan yang dialami SMK Pancasila 5 Wonogiri dalam pelaksanaan program PSG dalam memasuki dunia kerja meliputi

a. Kurangnya dana untuk penyelenggaraan pendidikan

Menurut Ahmad Sonhadji K.H (1998), “dalam program pendidikan system ganda pada SMK terdapat beberapa komponen/sub system, antara lain:

- 1) Program pendidikan dan pelatihan kejuruan
- 2) Sumber Daya Manusia
- 3) Fasilitas Pendidikan
- 4) Siswa
- 5) Biaya
- 6) Institute Pasangan” (hlm. 24)

Dari pendapat diatas dapat kita lihat bahwa biaya/dana adalah salah satu dari tujuh komponen dalam PSG. Ketujuh komponen tersebut adalah satu kesatuan yang apabila salah satu darinya terjadi masalah maka akan mengganggu kelancaran proses pendidikan nantinya.

Di SMK Pancasila 5 Wonogiri, dana/biaya pendidikan saat ini masalah yang harus segera dapat dipecahkan. Dengan status sekolah swasta milik yayasan, yang tidak banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah

menjadikan SMK Pancasila 5 Wonogiri kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sekolah yang kompleks.

Berdasarkan data yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa SMK Pancasila 5 Wonogiri mengalami masalah dalam pelaksanaan Program PSG yaitu masalah dana/biaya.

b. Kurangnya sarana labolatorium dalam proses pendidikan

Menurut pendapat Ahmad Sonhadji K.H yang dapat kita lihat pada penjelasan diatas, salah komponen pada PSG adalah fasilitas pendidikan atau bisa disebut sarana pendidikan. Sama halnya dengan biaya, sarana/fasilitas pendidikan juga perlu untuk diperhatikan (1998: 24).

Di SMK Pancasila 5 Wonogiri, sarana/fasilitas pendidikan masih kurang memenuhi, baik dari segi jumlah maupun kelengkapannya. Seperti alat-alat kantor yang digunakan untuk praktek, komputer yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah siswa, dan lain-lain. Hal ini tentu mengganggu kelancaran Proses belajar-mengajar dan menghambat siswa untuk mencapai tingkat keterampilan dalam menggunakan alat-alat tertentu.

c. Belum Adanya Ujian dan Sertifikasi Profesi

Menurut Majelis Pendidika Kejuruan Nasional (MPKN), “Uji profesi adalah proses pengukuran dan penilaian penguasaan keahlian seseorang berdasarkan penguasaannya terhadap standar kemampuan yang dipersyaratkan untuk dinyatakan ahli dan berwenang pada bidang pekerjaan tertentu, sesuai standar resmi (buku) yang berlaku pada suatu jenis keahlian tertentu”. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa uji profesi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan siswa dalam menguasai keahlian sesuai dengan standar resmi (buku) yang berlaku pada suatu jenis keahlian dan untuk memberikan pengakuan terhadap siswa

tersebut, apakah bisa dinyatakan ahli dan berwenang pada profesinya atau belum.

SMK Pancasila 5 Wonogiri belum melaksanakan uji dan sertifikasi profesi sehingga para lulusannya juga belum bisa dinyatakan ahli dan berwenang pada bidang keahliannya. Seharusnya ketika lulus, mereka memperoleh dua sertifikat yaitu sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi. Namun karena mengingat biayanya juga tidak sedikit, maka uji profesi belum dapat dilaksanakan. Hal ini sungguh sangat disayangkan karena berdampak pada kesiapan siswa dalam memasuki dunia kerja nantinya setelah mereka lulus. Materi dan tes uji profesi seharusnya bisa dijadikan pengalaman bagi para siswa dan sertifikasinya juga dapat dijadikan nilai tambah pada saat mereka bersaing dalam mendapatkan pekerjaan.

Jadi, belum adanya uji dan sertifikasi profesi di SMK Pancasila 5 Wonogiri merugikan pihak siswa karena tidak memiliki sertifikasi profesi dan menghambat pihak sekolah dalam usaha mempersiapkan siswa agar siap memasuki dunia kerja setelah mereka lulus.

Pada dasarnya hambatan yang dialami SMK Pancasila 5 Wonogiri untuk pelaksanaan program PSG dalam mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja tersebut terkait dengan Pelaksanaan Prakerin serta pelaksanaan ujian dan sertifikasi keahlian.

3. Usaha SMK Pancasila 5 Wonogiri Mengatasi Hambatan Pelaksanaan PSG Dalam Mempersiapkan Siswa Memasuki Dunia Kerja

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kendala yang dialami SMK Pancasila 5 Wonogiri tentang pelaksanaan program PSG dalam mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja. Usaha untuk mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain :

a. Memfungsikan Unit Produksi

Menurut Ahmad Sonhadji K.H (1998), “Dalam pelaksanaan program PSG yang berlangsung di dua tempat, maka konsekuensi biaya menjadi tanggungan bersama antara SMK dengan institusi pasangan sesuai dengan beban yang disepakati” (hlm. 24). Jadi dana atau biaya adalah salah satu komponen pendidikan di SMK yang harus diperhatikan dan diperhitungkan terutama oleh pihak sekolah.

Pihak sekolah sudah berusaha dengan maksimal yaitu mengerahkan semua potensi yang ada dari warga sekolah, antara lain dengan memfungsikan unit produksi yang selain bermanfaat bagi keterampilan siswa dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa tetapi juga bermanfaat bagi sekolah yaitu sebagian keuntungannya menjadi suntikan dana guna kelancaran proses belajar-mengajar. Hal ini merupakan bentuk usaha keras dari sekolah dalam rangka memberikan yang terbaik bagi siswanya agar menjadi Sumber Daya Manusia yang unggul. Selain itu para guru di SMK Pancasila 5 Wonogiri juga menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi belajar anak didiknya, karena tanggung jawab dan peran guru yang besar dalam pembelajaran maka sudah sewajarnya guru melakukan segala sesuatu apapun demi perkembangan dan kemajuan peserta didiknya. Tentu saja apa yang dilakukan oleh guru dan komite sekolah tersebut di atas sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dunia pendidikan pada umumnya.

b. Menambah Sarana Laboratorium untuk Proses Pendidikan

Menurut HAR Tilaar, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melaksanakan *link and match* pada Sekolah Menengah Kejuruan adalah ;

- 1) Pengembangan kurikulum pendidikan
- 2) Peningkatan Sarana Dan Prasarana
- 3) Meningkatkan kualitas tenaga pengajar
- 4) Perbaikan program pendidikan (1995: 577)

Untuk dapat melaksanakan prinsip *link and match* maka pihak sekolah harus memperhatikan keberadaan sarana dan prasarana pendidikan dalam menunjang mutu proses belajar-mengajar. Untuk dapat menguasai suatu ketrampilan tertentu yang disyaratkan di dunia kerja maka sebelumnya siswa harus diajari terlebih dahulu di sekolah. Misalnya ketrampilan dalam mengoperasikan suatu alat kantor. Jadi pihak sekolah harus menyediakan alat-alat perkantoran yang akan digunakan sebagai media belajar siswa.

SMK Pancasila 5 Wonogiri menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan sarana pendidikan adalah sangat penting dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Maka dari itu SMK Pancasila 5 Wonogiri berusaha semaksimal mungkin dalam hal pengadaan sarana maupun prasarana pendidikan demi kelangsungan dan kualitas proses belajar-mengajar. Namun adakalanya usaha mengatasi masalah tersebut juga terbentur oleh terbatasnya dana. Tetapi pasti pihak SMK Pancasila 5 Wonogiri telah berusaha dengan cara mengalokasikan dana sumbangan dari orang tua siswa, tentu saja pembeliannya dilakukan secara bertahap mengingat harganya yang mahal dan kebutuhan lainnya yang juga penting.

c. Mengajukan Permohonan Proposal Kepada Pemerintah

Keberhasilan peserta didik mencapai kemampuan sesuai dengan standar profesi, dilakukan melalui proses ujian profesi. Materi ujian profesi pelaksanaan ujian dan penentuan hasil disepakati dan dilakukan oleh suatu tim ujian profesi yang anggotanya terdiri atas unsur SMK, industri/perusahaan pasangan, asosiasi profesi dan organisasi pekerja.

Menurut Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN), “Uji profesi adalah proses pengukuran dan penilaian penguasaan keahlian seseorang berdasarkan penguasaannya terhadap standar kemampuan yang dipersyaratkan untuk dinyatakan ahli dan berwenang pada bidang pekerjaan

tertentu, sesuai standar resmi (baku) yang berlaku pada suatu jenis keahlian tertentu”.

Untuk masalah belum terselenggarakannya uji sertifikasi profesi, pihak SMK Pancasila 5 Wonogiri kurang maksimal dalam mengusahakannya. Seharusnya setiap SMK menyelenggarakan ujian sertifikasi keahlian secara menyeluruh. Tidak hanya setengah-setengah. Selama ini SMK Pancasila 5 Wonogiri hanya menyelenggarakan ujian dan sertifikasi kompetensi saja. Sedangkan ujian profesi belum bisa dilaksanakan, seharusnya SMK Pancasila 5 Wonogiri memahami arti pentingnya ujian dan sertifikasi profesi, karena ini akan dijadikan siswa sebagai bentuk pengakuan atas dirinya bahwa dia memang benar-benar layak dan berkompetensi dalam menjalani profesinya di kelak kemudian hari. Ini penting dalam proses dan perjalanannya dalam mencari pekerjaan sampai pada kewenangannya dalam melaksanakan tugas pekerjaannya nantinya.

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) SMK Pancasila 5 Wonogiri dalam mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja.

Pelaksanaan program PSG harus melalui beberapa tahapan-tahapan terlebih dahulu yaitu, persiapan, pelaksanaan, dan penarikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Persiapan pelaksanaan PSG

Tahap persiapan ini siswa dibekali keterampilan sesuai dengan kompetensinya. Dalam pelaksanaan program PSG ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan antara lain:

1) Persiapan peserta program PSG

Bahwa peserta program PSG di SMK Pancasila 5 Wonogiri adalah para siswa yang telah menguasai dasar-dasar kejuruan sesuai dengan programnya masing-masing, misalnya jurusan AP harus terampil mengetik menggunakan 10 jari buta, menguasai komputer minimal Ms. Office, menulis stenografi dengan cepat, dan membuat surat masuk maupun surat keluar.

2) Pemilihan Institusi Pasangan (IP) dan waktu pelaksanaan program PSG

Bahwa pemilihan IP untuk pelaksanaan program PSG, khususnya dilaksanakan di instansi pemerintahan yaitu, dinas pendidikan, BAPPEDA, DPPKAD, dinas kependudukan dan Catatan Sipil.

Sedangkan waktu pelaksanaannya dilaksanakan 2 bulan yang dimulai pada tanggal 5 September-5 November pada saat kenaikan kelas II ke kelas III.

- 3) Sosialisasi tata tertib PSG yang harus disepakati dari pihak sekolah maupun dari pihak IP

Bahwa sebelum penerjunan dalam jangka waktu kurang lebih satu minggu dan pada saat penerjunan ditempat IP siswa diberitaukan tata tertib yang harus dilaksanakan atau yang harus dipatuhi oleh siswa ditempat IP masing-masing.

b. Pelaksanaan program PSG

Dapat disimpulkan bahwa karena PSG melibatkan pihak sekolah dan pihak IP atau DUDI, maka pembimbing siswa PSG adalah guru (sekolah) dan instruktur (IP). Dalam tahap pelaksanaan ini juga dilakukan monitoring untuk mengetahui kegiatan para siswa yang berada di tempat IP, monitoring tersebut dilakukan oleh pembimbingnya masing-masing, minimal dilaksanakan 3kali selama melaksanakan prakerin ditambah dengan ketua program jurusan sesuai dengan kebutuhan.

c. Penarikan peserta PSG

Bahwa penarikan dilaksanakan setelah pelaksanaan program PSG selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahap penarikan ini juga terdapat tahap evaluasi, dalam evaluasi program PSG dilakukan oleh pihak IP dan pihak sekolah yang pada akhirnya dilaporkan kepada Kepala Sekolah untuk dipertanggungjawabkan dan sebagai bahan masukan untuk evaluasi pelaksanaan program PSG berikutnya.

2. Hambatan pelaksanaan program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) SMK Pancasila 5 Wonogiri dalam mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja.

- a. Kurangnya dana untuk penyelenggaraan pendidikan.
- b. Kurangnya sarana laboratorium dalam proses pendidikan seperti komputer dan mesin-mesin kantor lainnya.
- c. Belum adanya uji sertifikasikasi profesi.
- d. Tidak sesuainya jenis pekerjaan yang ada di Institusi Pasangan (IP)

3. Usaha yang dilakukan SMK Pancasila 5 Wonogiri mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dalam mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja.

- a. Untuk mengatasi kurangnya dana dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pihak sekolah memaksimalkan kegiatan di unit produksi, karena selain berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi siswa, unit produksi juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan sekolah.
- b. Untuk mengatasi kurangnya sarana laboratorium dalam proses pendidikan seperti komputer dan mesin-mesin kantor lainnya adalah dengan menggunakan sebagian dana pengembangan sekolah yang merupakan bantuan dari orang tua siswa, untuk membeli sarana tersebut secara bertahap.
- c. Untuk mengatasi hambatan belum adanya uji sertifikasi profesi pihak sekolah berusaha memohon kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana supaya dapat membantu dan berperan serta agar SMK Pancasila 5 Wonogiri dan SMK lain yang belum dapat melaksanakan segera bisa melaksanakan ujian dan sertifikasi profesi.
- d. Untuk mengatasi ketidaksesuaian jenis pekerjaan diadakanlah monitoring dan evaluasi agar pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan mata diklat yang ada di sekolah.

B. IMPLIKASI

Berdasarkan kesimpulan di atas dan fakta yang ditemukan berkaitan dengan penelitian ini yaitu analisis pelaksanaan program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dalam mempersiapkan siswa SMK Pancasila 5 Wonogiri memasuki dunia kerja, maka implikasi dari hasil penelitian ini dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat membuktikan kepada masyarakat bahwa lulusan SMK Pancasila 5 Wonogiri disamping mempunyai pengetahuan dan keterampilan juga memiliki pengalaman kerja yang dapat digunakan sebagai bekal untuk nantinya memasuki dunia kerja, sehingga para lulusan tersebut bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul yang dapat bersaing dengan para tamatan lain dalam mencari kerja tingkat menengah.
2. Hasil penelitian bahwa SMK Pancasila 5 Wonogiri telah melaksanakan program PSG dalam mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja. Usaha melalui program PSG, dimana pelaksanaan PSG tersebut tidak lepas dari tiga unsur yaitu proses belajar mengajar di kelas, pelaksanaan prakerin dan penyelenggaraan ujian dan sertifikasi keahlian merupakan nilai tambah bagi siswa yang dapat meningkatkan kualitas dan kesiapan lulusan SMK Pancasila 5 Wonogiri untuk memasuki dunia kerja setelah mereka lulus nantinya, sehingga masyarakat akan lebih percaya untuk menyekolahkan putra putrinya di SMK Pancasila 5 Wonogiri.
3. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan masukan bagi dunia kerja agar lebih memahami adanya program PSG pada dunia pendidikan di SMK Pancasila 5 Wonogiri yang sangat membutuhkan kerjasamanya, sehingga diharapkan dunia kerja akan meningkatkan peranannya di dunia pendidikan dalam rangka menciptakan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

C. SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah peneliti bahas di atas, maka penulis ingin menyampaikan saran kepada kepala SMK Pancasila 5 Wonogiri, kepada wakasek hubungan industri dan humas SMK Pancasila 5 Wonogiri, kepada Guru SMK Pancasila wonogiri dan kepada pihak IP SMK Pancasila 5 Wonogiri, sebagai berikut:

1. Kepada Kepala SMK Pancasila 5 Wonogiri

Laboratorium untuk praktik administrasi perkantoran hendaknya segera dilengkapi keberadaan peralatannya karena akan sangat membantu para siswa dalam mengasah keterampilannya, seperti dalam penggunaan alat-alat kantor. Kepala sekolah hendaknya mengajukan permohonan bantuan kepada pihak pengelola yayasan atau dengan mengalokasikan dana bantuan dari orang tua siswa secepatnya.

2. Kepada Wakasek Hubungan Industri dan Humas SMK Pancasila 5 Wonogiri

Wakil kepala sekolah bidang Hubungan Industri dan Humas diharapkan selalu meningkatkan jalinan kerjasama yang baik dengan DUDI di sekitar lingkungan sekolah, agar DUDI tersebut mudah untuk diajak bekerjasama demi suksesnya pelaksanaan program PSG.

3. Kepada Komite Sekolah

Komite Sekolah diharapkan dapat mengadakan penggalangan dana kepada orang tua siswa dan mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk pengalokasian dana pendidikan, sehingga dapat melengkapi sarana laboratorium dalam proses pendidikan secara berkala.

4. Kepada Guru SMK Pancasila 5 Wonogiri

Guru diharapkan lebih meningkatkan monitoring paling tidak dilakukan seminggu sekali, sehingga siswa dapat mengasah kemampuannya serta lebih memiliki keterampilan yang banyak. Dengan adanya monitoring yang sering dilakukan maka pekerjaan yang dilakukan siswa di tempat IP akan sesuai dengan teori yang telah diperoleh di sekolah.

5. Kepada Institusi Pasangan SMK Pancasila 5 Wonogiri

- a. Ketika melaksanakan praktik kerja industri, pengetahuan dan teori yang telah dimiliki siswa setelah proses belajar mengajar di sekolah hendaknya dapat dipraktikkan. Maka dari itu pihak IP diharapkan dapat menerima dan menempatkan siswa peserta prakerin sesuai dengan bidang keahliannya (di sekolah).
- b. IP hendaknya selalu memberikan bimbingan dan arahan secara lebih intensif lagi. Supaya siswa memperoleh kesiapan diri untuk memasuki dunia kerja dengan mengajarkan cara kerja yang baik, memberikan pembimbingan yang nyaman serta selalu melakukan monitoring dan evaluasi guna memperbaiki kekurangan/kesalahan yang dilakukan siswa selama melaksanakan prakerin.
- c. IP diharapkan lebih membangun komunikasi dua arah ke sekolah, sehingga ada link and match antara kebutuhan dunia kerja dengan sekolah dalam usahanya meningkatkan kualitas lulusan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dengan cara memberikan masukan-masukan yang positif kepada pihak sekolah berkaitan dengan pelaksanaan proses pendidikan.